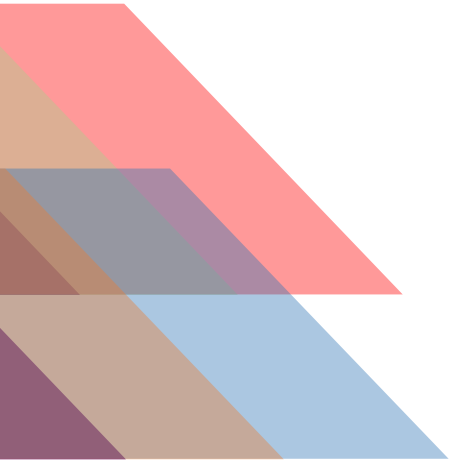




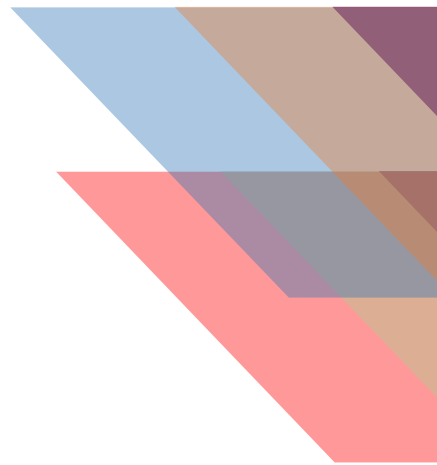
**TAHUN
2024**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



KATA PENGANTAR





BUPATI GRESIK

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia – Nya, sehingga kami telah menyelesaikan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 untuk di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur. Laporan ini dibuat untuk memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal 69 dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2024 mengalami perubahan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 dan Surat Pj.Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Januari 2025 Nomor 100.1.7/1430/011.1/2025 tentang Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dalam rangka melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik selama satu tahun anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

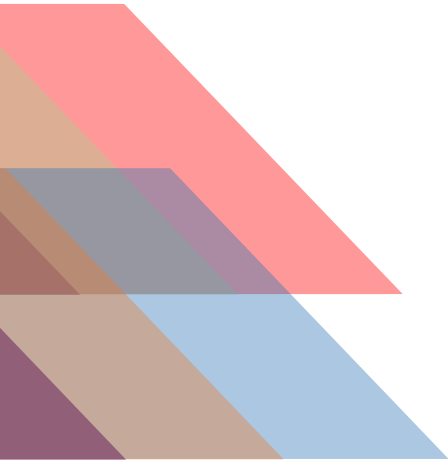
Kabupaten (RKPD) Gresik Tahun 2024 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Laporan ini memuat informasi tentang capaian ekonomi makro, target dan capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang biasanya disampaikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP), gambaran narasi tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 6 urusan pelayanan dasar dan pengisian Indikator Kinerja Kunci yang sudah dilakukan perubahan format antara lain : Perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penunjang Pemerintah. Sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 diperoleh dari data mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2024 yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

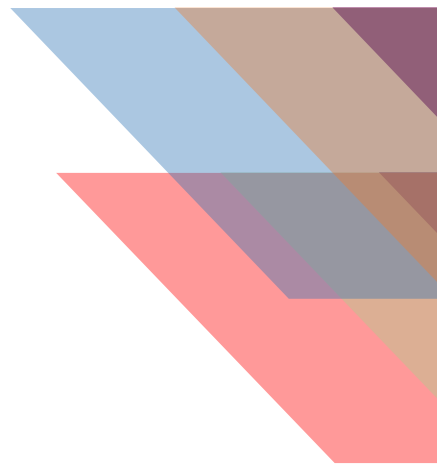
Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna baik dari secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan, karena belum seluruh tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek baik perubahan anggaran maupun terganggunya pelaksanaan program pemerintahan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini dibuat, terima kasih kepada semua pihak dan seluruh dukungan data dari Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak untuk diketahui masyarakat seluas-luasnya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



DAFTAR ISI





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
a.1 Latar Belakang.....	2
a.1.1 Penjelasan Umum.....	2
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	2
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Informasi Umum Data Kependudukan.....	10
d. Jumlah Kecamatan.....	11
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	16
f. Rincian Aparatur Sipil Negara.....	22
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	24
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	39
a.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	42
a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....	42
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	44
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	44
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	
a.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	45
a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM	45
b. Dasar Penerepan SPM.....	47
c. Kebijakan Penerapan SPM.....	50



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro	58
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	59
2. Angka Kemiskinan.....	59
3. Angka Pengangguran	60
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	60
5. PDRB Perkapita	62
6. Ketimpangan Pendapatan	63
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	65
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	63
2.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan Dasar.....	63
a. Urusan Pendidikan.....	64
b. Urusan Kesehatan.....	66
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	69
d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	71
e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	72
g. Urusan Sosial	74
2.2.1.2 Urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar	75
a. Urusan Wajib Tenaga Kerja.....	76
b. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.....	77
c. Urusan Pangan.....	78
d. Urusan Pertanahan.....	79
e. Urusan Lingkungan Hidup.....	80
f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	81
g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	82
h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82
i. Urusan Perhubungan.....	84



j.	Urusan Komunikasi dan Informatika	84
k.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .	85
l.	Urusan Penanaman Modal	86
m.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	87
n.	Urusan Statistik.....	87
o.	Urusan Persandian	89
p.	Urusan Kebudayaan.....	89
q.	Urusan Perpustakaan	89
r.	Urusan Kearsipan.....	90
2.2.1.3	Urusan Pemerintah Pilihan	91
a.	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan..	92
b.	Urusan Pilihan Pariwisata.....	93
c.	Urusan Pilihan Pertanian.....	94
d.	Urusan Kehutanan Kabupaten Kota	95
e.	Urusan Pilihan Perdagangan	95
f.	Urusan Pilihan Perindustrian	96
g.	Urusan Transmigrasi	98
2.2.2	Penunjang Urusan Pemerintahan	98
a.	Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	100
b.	Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan	102
c.	Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	103
d.	Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan.....	104
e.	Penunjang Urusan Pemerintahan Transparansi dan Partisipasi Publik.....	105
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	107
a.	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	108
b.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	111
c.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Sebelumnya	118
d.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam pembangunan jangka Menengah.....	115



e. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian Nasional/Prov. Jatim	117
f. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	119
g. Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan	127
h. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai	130
i. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	133

BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Gresik	165
---	-----

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan	167
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	167
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	167
4.1.3 Alokasi Anggaran	171
4.1.4 Dukungan Personil	174
4.1.5 Hasil Capaian	176
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	180
4.2 Urusan Kesehatan.....	181
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	184
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	184
4.2.3 Alokasi Anggaran	200
4.2.4 Dukungan Personil	201
4.2.5 Hasil Capaian	203
4.2.6 Permasalahan	218
4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	219
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	219
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	219
4.3.4 Dukungan Personil	224
4.3.4 Hasil Capaian	226



4.3.5 Permasalahan dan Solusi	229
4.4 Urusan Perumahan dan Pemukiman.....	230
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	230
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	230
4.4.3 Alokasi Anggaran	232
4.4.4 Dukungan Personil	233
4.4.5 Hasil Capaian	234
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	236
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	237
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	237
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	238
4.5.3 Alokasi Anggaran	242
4.5.4 Dukungan Personil	245
4.5.5 Hasil Capaian	248
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	254
4.6 Urusan Sosial.....	258
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	258
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	258
4.6.3 Alokasi Anggaran	265
4.6.4 Dukungan Personil	266
4.6.5 Hasil Capaian	267
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	268
BAB V PENUTUP	269



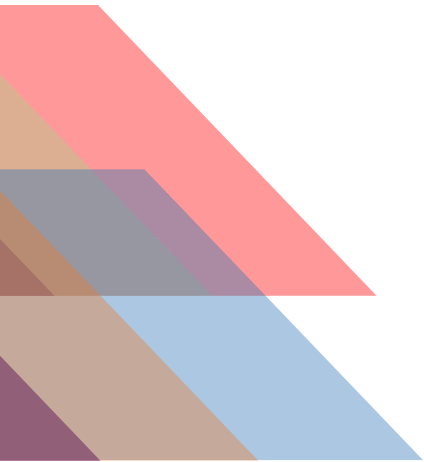
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Luas Wilayah Menurut Kecamatan Se Kabupaten Gresik.....	4
Tabel 1.2 Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)...	6
Tabel 1.3 Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (ha)...	7
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024	11
Tabel 1.5 Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2024.....	13
Tabel 1.6 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik.....	14
Tabel 1.7 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	22
Tabel 1.10 Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada di Setiap Perangkat Daerah	24
Tabel 1.11 Laporan Realisasi Anggaran.....	27
Tabel 1.12 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahab Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024.....	29

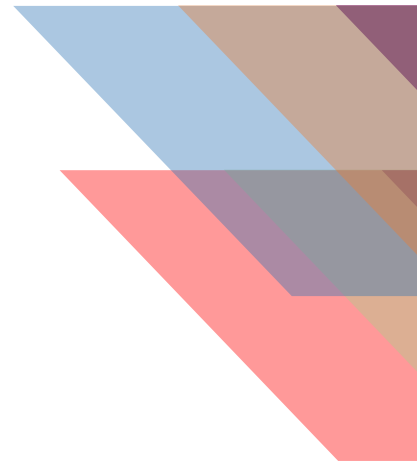


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	5
Gambar 1.2	Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik	8
Gambar 1.3	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik.....	9
Gambar 1.4	Prosentase Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	12
Gambar 1.5	Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2024	13
Gambar 1. 6	Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2024	13
Gambar 1.7	Grafik Sebaran Keluarga dan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2024.....	14



PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPPD);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 2024 Nomor : 100.2.7/10571/OTDA perihal Sosialisasi Pedoman Umum LPPD dan RLLPPD Tahun Anggaran 2024;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025;

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Gresik termasuk salah satu kabupaten di dalam wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Gresik berada di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan ibu Kota Provinsi. Pusat Pemerintahan Kabupaten Gresik yaitu Kecamatan Kebomas berada 20 Km sebelah Utara Kota Surabaya. Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak Antara 112°–113° BT dan 7°–8° LS dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Gresik berbatasan dengan :

1. Sebalah Utara : Laut Jawa
2. Sebalah Timur : Kota Surabaya dan Selat Madura
3. Sebalah Selatan : Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto
4. Sebalah Barat : Kabupaten Lamongan

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Gresik beriklim tropis basah dan kering dan mengenal 2 musim kemarau dan musimz penghujan. Musim Penghujan di Kabupaten Gresik biasanya berlangsung sejak bulan Desember hingga Maret dengan Bulan terbasah Januari yang Jumlah curah hujan perbulan lebih dari 250 mm per bulan, sedangkan musim kemarau dari bulan mei hingga bulan Oktober dengan Bulan terkering adalah Agustus Suhu Rata-rata tahunan di Wilayah Kabupaten Gresik adalah $\pm 28,3$ °C dan tingkat kelembapan nisbi sebesar $\pm 76\%$. Jumlah curah



hujan tahunan di wilayah Gresik adalah 1200–1600 mm per tahun dan dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari hujan per tahun.

Luas wilayah Kabupaten Gresik dengan total luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi di wilayah daratan luasnya 993,83 Km² dan wilayah kepulauan luasnya 197,42 Km². Wilayah administrasi terbagi dalam 18 Kecamatan (2 Kecamatan berada di Pulau Bawean) yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Kecamatan Sangkapura merupakan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Gresik yaitu dengan luas 118,72 Km² atau sekitar 9,97 % terhadap luas Kabupaten Gresik. Sedangkan wilayah terkecil di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Gresik yaitu seluas 5,54 Km² atau sekitar 0,47 % terhadap luas Kabupaten Gresik.

Tabel 1.1.1
Data Luas Wilayah
Menurut Kecamatan Se Kabupaten Gresik

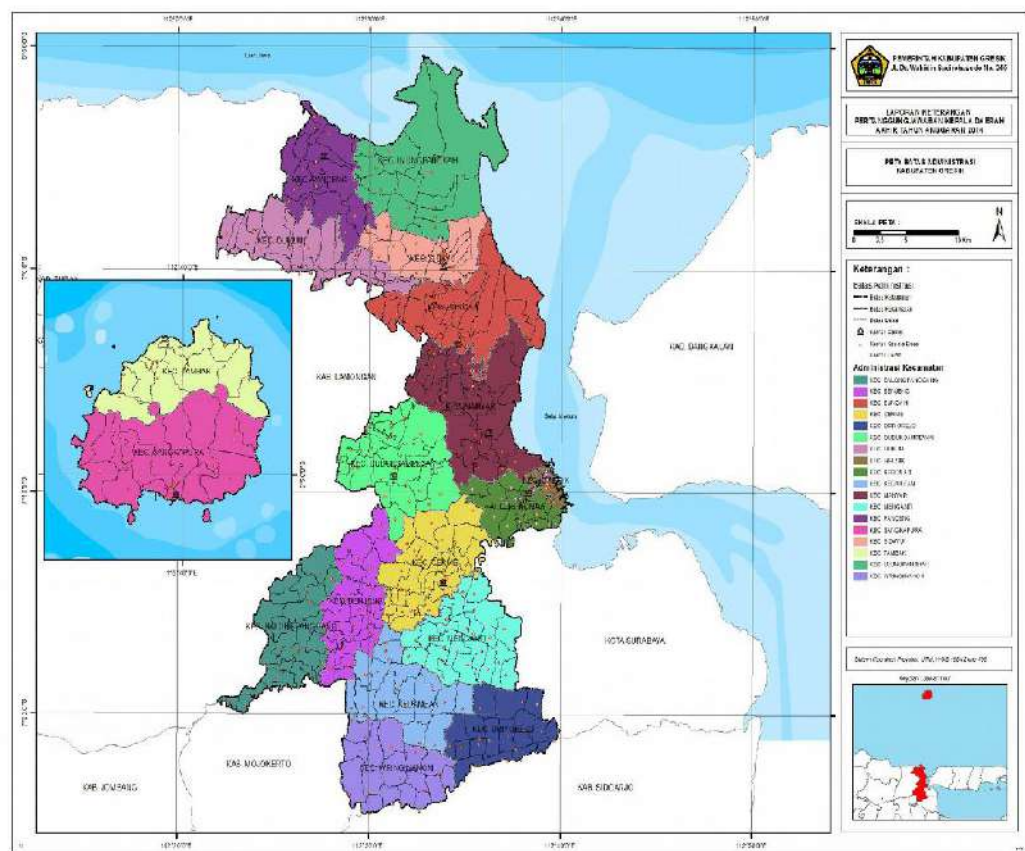
NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Dukun	59,03 Km ²	4.96
2	Balongpanggang	63,88 Km ²	5.36
3	Panceng	62,59 Km ²	5.25
4	Benjeng	61,26 Km ²	5.14
5	Duduksampeyan	74,29 Km ²	6.24
6	Wringinanom	62,62 Km ²	5.26
7	Ujungpangkah	94,82 Km ²	7.96
8	Kedamean	65,96 Km ²	5.54
9	Sidayu	47,13 Km ²	3.96
10	Manyar	95,42 Km ²	8.01
11	Cerme	71,73 Km ²	6.02
12	Bungah	79,49 Km ²	6.67
13	Menganti	68,71 Km ²	5.77
14	Kebomas	30,06 Km ²	2.52
15	Driyorejo	51,30 Km ²	4.31
16	Gresik	5,54 Km ²	0.47
17	Sangkapura	118,72 Km ²	9.97
18	Tambak	78,70 Km ²	6.61

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
	Jumlah	1.191,25 Km ²	100,00

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kab. Gresik

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Gambar 1.1.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik



Sumber data : Bapelitbangda Kab.Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat

Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila(Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Gresik, Lamongan).

Berdasarkan kondisi topografis, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
- Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.2

Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 Ha atau sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% lebih sedikit 1.072,23Ha atau sekitar 0,91% yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2 (dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kelerengan beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.3
Keterangan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

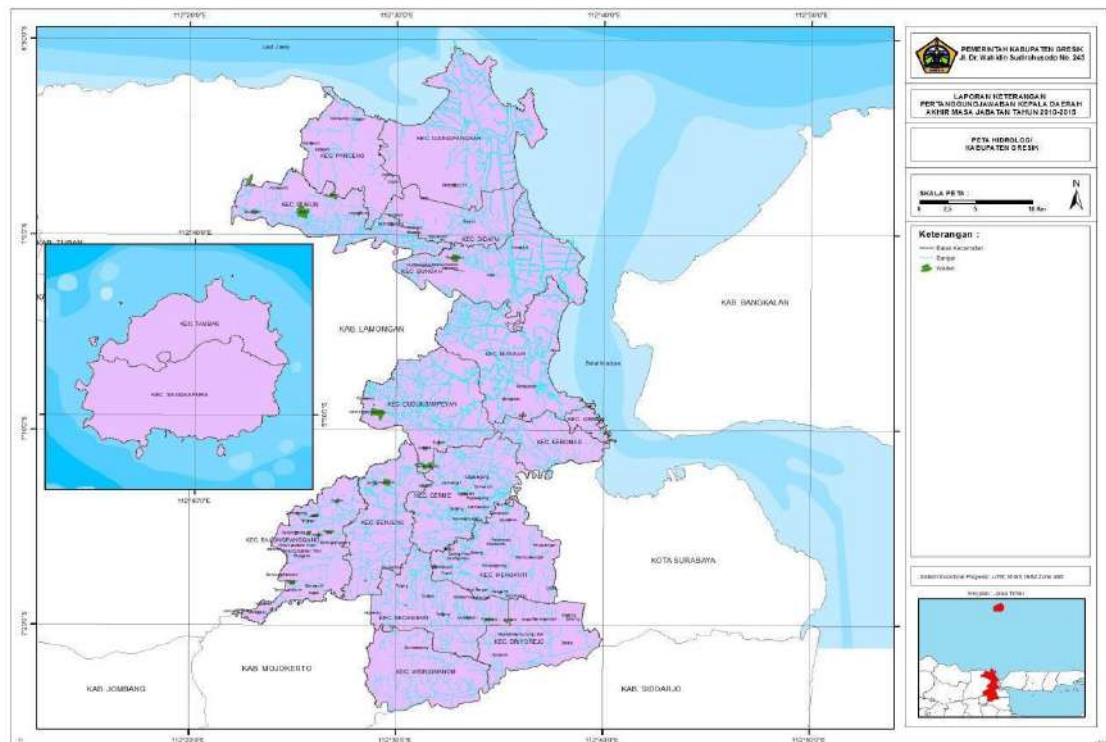
Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan

adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor.

Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan.

Gambar 1.1.2
Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik

Secara **Klimatologi**, seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

- musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;



- b. musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- c. musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- d. musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

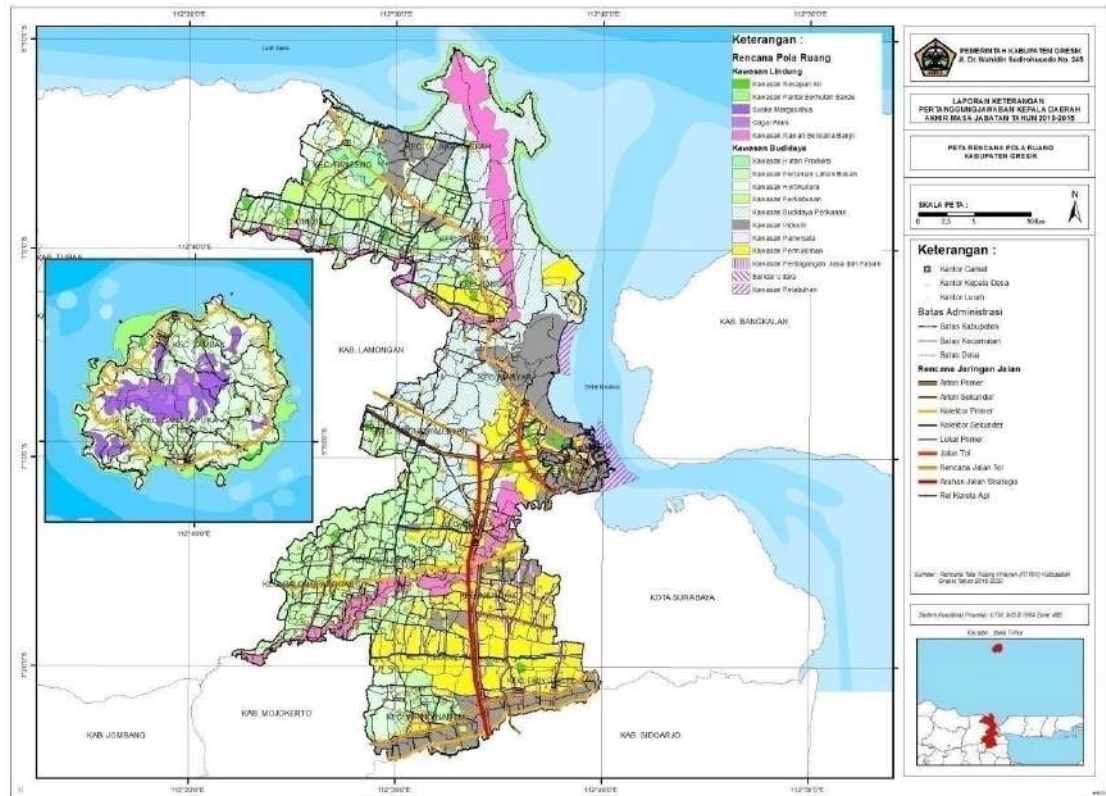
Adapun secara **Penggunaan Lahan**, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung
 - 1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar;
 - 2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar;
 - 3. Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar;
 - 4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3,831.60 hektar;
 - 5. Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar;
 - 6. Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar;
- b. Kawasan Budidaya
 - 1. Kawasan Permukiman 26,063.55 hektar;
 - 2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23,372.70 hektar;
 - 3. Kawasan Perikanan Budidaya 21,678.36 hektar;
 - 4. Kawasan Hortikultura 16,885.48 hektar;
 - 5. Kawasan Industri 12,448.03 hektar;
 - 6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6,644.01 hektar;
 - 7. Kawasan Perkebunan 2,573.67 hektar;
 - 8. Kawasan Hutan Produksi 1,017.00 hektar;
 - 9. Kawasan Pertambangan 817.25 hektar;
 - 10. Kawasan Pariwisata 82.85 hektar;
 - 11. Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar;
 - 12. Kawasan Pelabuhan 1,257.69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar. I.3

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

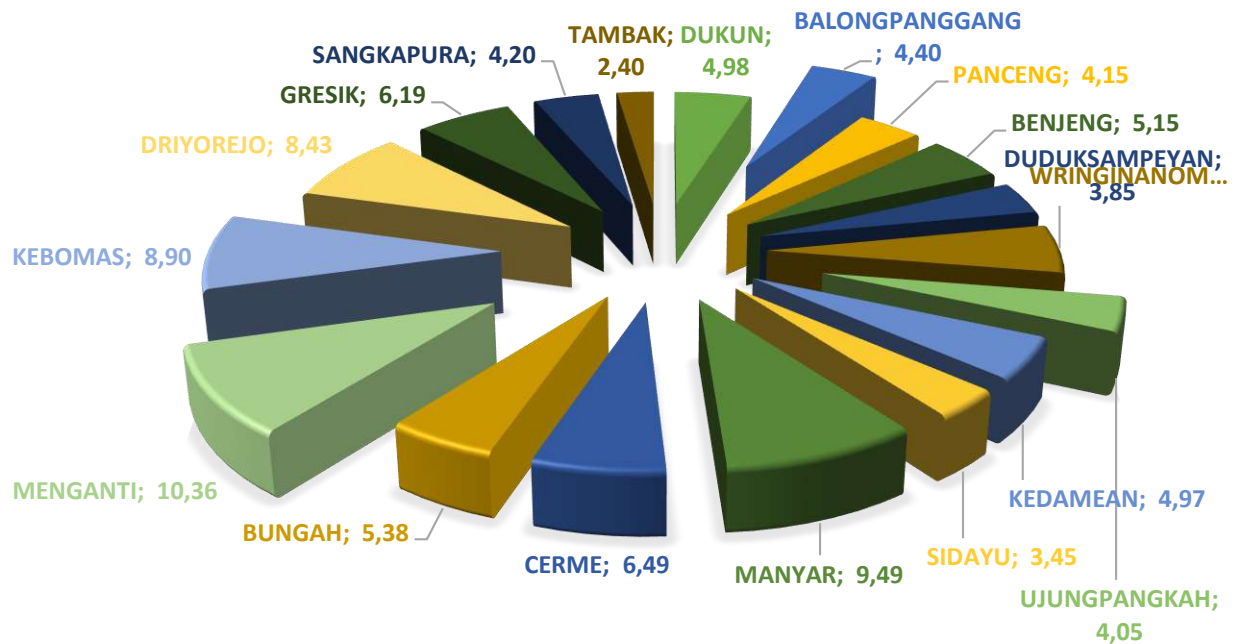
c. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2024 sebanyak **1.327.497** jiwa yang terdiri dari **667.540** laki-laki dan **659.957** perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar **1.084** jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2024 sebesar 1:1.

Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Menganti dengan jumlah penduduk sebanyak 133.875 jiwa dan wilayah dengan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Tambak dengan jumlah penduduk 31.009 jiwa.



Gambar.1.4
Prosentase Penduduk Per Kecamatan



Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Gresik sebesar 14.710 jiwa/Km² dan terendah ada di Kecamatan Tambak yaitu 400 jiwa/Km².

d. Jumlah kecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten dengan rincian per kecamatan dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk					
		Tahun 2023			Tahun 2024		
		L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	33.085	32.547	65,632	33.321	32.765	66,086
2	BALONGPANGGANG	28.055	28,285	56,290	28.240	28,622	56,862
3	PANCENG	26.318	26.308	52,626	26.845	26.761	53,606
4	BENJENG	32.926	32.686	65,612	33.421	33.187	66,608
5	DUDUKSAMPEYAN	24.726	24.744	49,470	24.868	24.868	49,736
6	WRINGINANOM	36.620	36.052	72,672	37.372	36.782	74,154
7	UJUNGPAKKAH	25.982	25.778	51,760	26.387	25.972	52,359
8	KEDAMEAN	31.907	31.383	63,290	32.448	31.765	64,213
9	SIDAYU	22.041	21.648	43,689	22.444	22.098	44,542
10	MANYAR	59.782	58.655	118,437	61.933	60.712	122,645
11	CERME	41,028	40,432	81,460	42.291	41.612	83,903

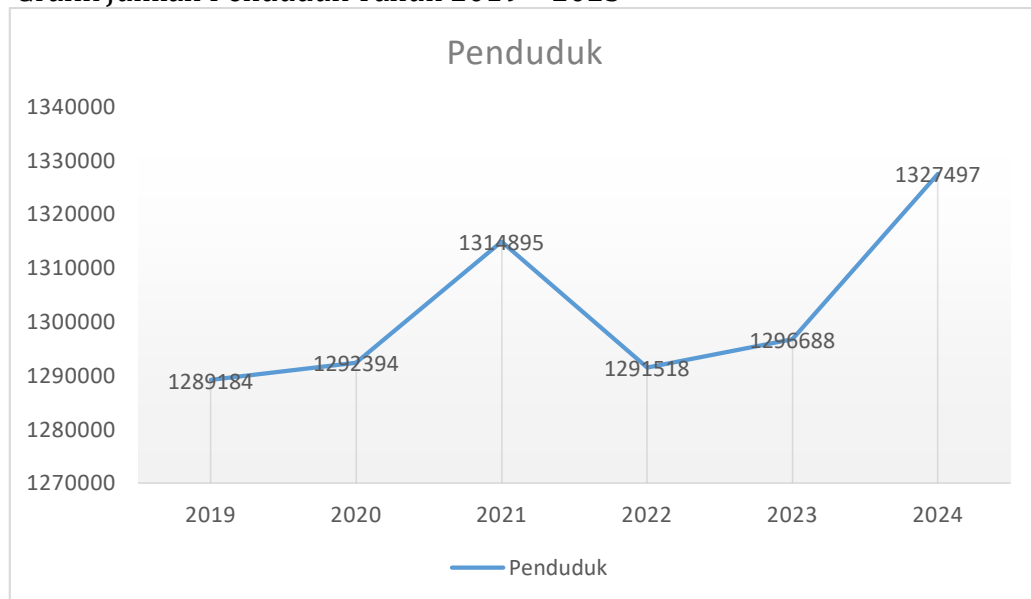
12	BUNGAH	34.455	33.746	68.201	35.240	34.341	69.581
13	MENGANTI	64.398	63.411	12.809	67.540	66.335	133.875
14	KEBOMAS	56.122	55.946	112.068	57.627	57.415	115.078
15	DRIYOREJO	52.559	51.843	104.402	54.918	54.006	108.924
16	GRESIK	39.584	40.231	79.815	39.737	40.268	80.005
17	SANGKAPURA	26.819	26.303	53.122	27.434	26.877	54.311
18	TAMBAK	15.106	15.227	30.333	15.474	15.535	31.009
JUMLAH		651.463	645.255	1.296.688	667.540	659.957	1.327.497
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)				0,004			
KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km²)		0,002	0,002	0,001			

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2024

Dari Tabel di atas Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2024 di banding tahun 2023 mengalami Kenaikan penduduk sebesar 30,809 dibanding tahun sebelumnya (Tahun 2024) ini dipengaruhi fluktuatif kenaikan dan penurunan dipengaruhi mortalitas, ferlitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas.

Gambar 1. 6

Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2019 – 2023



Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 sebanyak 428.915 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 404.702 keluarga maka terjadi Penurunan jumlah keluarga sebanyak 3.748 Keluarga atau 0,93 %. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1. 5
Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2023 - 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN	JUMLAH KK
			2024
1	DUKUN	26	21.524
2	BALONGPANGGANG	25	19.545
3	PANCENG	14	17.120
4	BENJENG	23	22.144
5	DUDUKSAMPEYAN	23	15.894
6	WRINGINANOM	16	25.431
7	UJUNGPANGKAH	13	16.877
8	KEDAMEAN	15	21.604
9	SIDAYU	21	13.846
10	MANYAR	23	37.815
11	CERME	25	26.410
12	BUNGAH	22	21.710
13	MENGANTI	22	43.749
14	KEBOMAS	21	36.041
15	DRIYOREJO	16	36.029
16	GRESIK	21	26.034
17	SANGKAPURA	17	17.110
18	TAMBAK	13	10.032
	JUMLAH	356	428.915

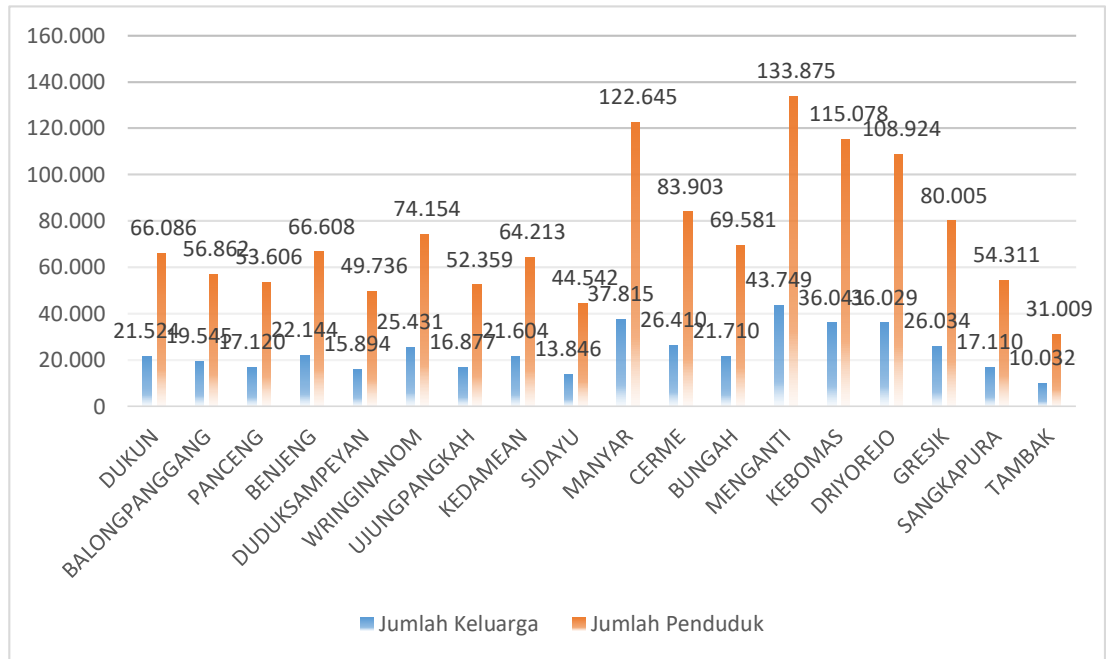
Sumber data: Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 31 Desember 2024

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pada tahun 2024, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 43.749 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 133.875 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 10.032 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.009 jiwa.



Gambar 1.7

Grafik Sebaran Keluarga dan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2024



Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.6

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
1	Dukun	26 Desa	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Irebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	38 Dusun
2	Balongpanggang	25 Desa	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekarang, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	85 Dusun
3	Panceng	14 Desa	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	14 Dusun
4	Benjeng	23 Desa	Jatirembe, Jogodal, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok,	78 Dusun



No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
			Kedungsekar, Sirnobojo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranpelo, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	
5	Duduksampeyan	23 Desa	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebalan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjuran, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	39 Dusun
6	Wringinanom	16 Desa	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	72 Dusun
7	Ujungpangkah	13 Desa	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk	28 Dusun
8	Kedamean	15 Desa	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	60 Dusun
9	Sidayu	21 Desa	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambi Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	16 Dusun
10	Manyar	23 Desa	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejanggan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	47 Dusun
11	Cerme	25 Desa	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooroo, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	60 Dusun
12	Bungah	22 Desa	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan, Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	67 Dusun



No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
13	Menganti	22 Desa	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	78 Dusun
14	Kebomas	11 Desa	Dahanrejo, Giri, Karangkering, Kedanyang, Kembangan, Klangonan, Randuagung, Segoromadu, Sekarkurung, Sukorejo, Prambangan	56 Dusun
		10 Kelurahan	Gending, Gulomantung, Indro, KawisAnyar, Kebomas, Ngargosari, Sidomoro, Sidomukti, Singosari, Tenggulunan	
15	Driyorejo	16 Desa	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosari, Mulung, Sumpat, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	49 Dusun
16	Gresik	5 Desa	Gapurosukolilo, Kramatinggil, Pulopancikan, Sidorukun, Tlogobendung	Tidak Ada Dusun
		16 Kelurahan	Bedilan, Karangpoh, Karangturi, Kebungson, Kemuteran, Kroman, Lumpur, Ngipik, Pekauman, Pekelingan, Sidokumpul, Sukodono, Sukorame, Tlogopatut, Tlogopojok, Trate.	
17	Sangkapura	17 Desa	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	116 Dusun
16	Tambak	13 Desa	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongbug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	90 Dusun
	Jumlah	330 Desa dan 26 Kelurahan		993 Dusun

E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang melaksanakan urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel. 1.7

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik serta Dasar Hukum
Pembentukan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
Dinas		
1	Dinas Pendidikan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Non Formal
2	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2021 Tusi Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
4	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Dinas Sosial	Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik
7	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2019
8	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
10	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik



No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik
13	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Nomor 57 Tusi Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tusi Dinas Komunikasi Dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Nomor 60 Tusi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Gresik
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Gresik
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik
20	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 Tentang &Nbsp;Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik



No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
21	Dinas Pertanian	Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian
Badan		
22	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
23	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
24	Badan Kepegawaian Daerah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik
Sekretariat		
27	Sekretariat Daerah	
	- Bagian Umum	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Humas dan Protokol	Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi



No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Hukum	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Pemerintahan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Perekonomian dan SDA	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Program Pembangunan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik



No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
28	Sekretariat Dewan	
Kecamatan		
29	Kecamatan Gresik	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
30	Kecamatan Kebomas	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
31	Kecamatan Manyar	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
32	Kecamatan Cerme	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
33	Kecamatan Benjeng	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
34	Kecamatan Balongpanggang	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
35	Kecamatan Duduksampean	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
36	Kecamatan Driyorejo	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
37	Kecamatan Wringinanom	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
38	Kecamatan Kedamean	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan



No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
39	Kecamatan Menganti	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
40	Kecamatan Sidayu	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
41	Kecamatan Ujung Pangkah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
42	Kecamatan Panceng	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
43	Kecamatan Bungah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
44	Kecamatan Dukun	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
45	Kecamatan Sangkapura	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
46	Kecamatan Tambak	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
Inspektorat		
48	Inspektorat Daerah	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2022

F. Rincian Aparatur Sipil Negara

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan konkuren dan Urusan pemerintahan umum perlu dukungan pegawai yang ada pada setiap OPD. Pada tahun 2024 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik berjumlah 8.036 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 4.972. orang dan pegawai perempuan sejumlah 3.064 orang.



Tabel 1.10

Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada di Setiap Perangkat Daerah.

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SELURUH PEGAWAI PER JENIS JABATAN		
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8 Orang	12 Orang	29 Orang
2	Sekretariat Dprd	6 Orang	7 Orang	18 Orang
3	Sekretariat Daerah	16 Orang	29 Orang	80 Orang
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14 Orang	85 Orang	12 Orang
NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SELURUH PEGAWAI PER JENIS JABATAN		
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA
5	Inspektorat	7 Orang	31 Orang	8 Orang
6	Dinas Tenaga Kerja	7 Orang	13 Orang	9 Orang
8	Dinas Pertanian	66 Orang	12 Orang	33 Orang
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4 Orang	7 Orang	15 Orang
10	Dinas Perikanan	7 Orang	3 Orang	13 Orang
11	Dinas Perhubungan	14 Orang	7 Orang	35 Orang
12	Dinas Pendidikan	15 Orang	71 Orang	271 Orang
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Orang	19 Orang	27 Orang
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6 Orang	6 Orang	14 Orang
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	9 Orang	21 Orang	72 Orang
17	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	9 Orang	7 Orang	21 Orang
18	Dinas Lingkungan Hidup	10 Orang	12 Orang	50 Orang
19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	6 Orang	12 Orang	28 Orang
20	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7 Orang	8 Orang	17 Orang
21	Dinas Kesehatan	32 Orang	276 Orang	23 Orang
23	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9 Orang	5 Orang	9 Orang



24	Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	10 Orang	22 Orang	48 Orang
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	8 Orang	14 Orang	18 Orang
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6 Orang	3 Orang	8 Orang
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 Orang	2 Orang	14 Orang

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp3,915,508,009.350.00 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.730.417.815.425,76 atau mencapai 95.25%. Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 86,68%, capaian Pendapatan Transfer mencapai 101,15% dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah mencapai 0% Berikut Rincian Realisasi Jenis Pendapatan pada Tahun 2024:

Tabel 1.11

PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
1	2		3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1,038,700,000,000.00	960,468,393,710.00	92.47	793,322,673,442.23
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	236,145,900,000.00	118,008,753,104.60	49.97	87,430,225,680.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	12,645,000,000.00	12,267,234,269.30	97.01	13,425,554,336.30
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	310,353,235,728.00	294,284,303,516.86	94.82	276,843,902,540.56
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	1,597,844,135,728.00	1,385,028,684,600.76	86.68	1,171,022,355,999.09
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1	221,213,304,000.00	252,458,013,000.00	114.12	200,617,875,334.00
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1	952,986,932,000.00	976,604,015,000.00	102.48	915,176,119,975.00
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1	102,267,487,000.00	98,720,516,184.00	96.53	122,396,553,183.00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1	367,434,277,840.00	353,934,571,941.00	96.33	334,220,697,453.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1,643,902,000,840.00	1,681,717,116,125.00	102.30	1,572,411,245,945.00



No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
1	2		3	4	5	6
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
16	Dana Desa	5.1.1.2.2	321,507,175,000.00	321,507,175,000.00	100.00	318,788,865,000.00
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2	36,385,778,000.00	36,385,778,000.00	100.00	0.00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	357,892,953,000.00	357,892,953,000.00	100.00	318,788,865,000.00
19	Pendapatan Transfer Antar daerah	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3	300,596,613,624.00	289,414,392,200.00	96.28	334,088,066,900.00
21	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	16,180,867,000.00	16,180,867,000.00	100.00	16,190,424,121.00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	316,777,480,624.00	305,595,259,200.00	96.47	350,278,491,021.00
23	Jumlah Pendapatan Transfer	5.1.1.2	2,318,572,434,464.00	2,345,205,328,325.00	101.15	2,241,478,601,966.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	0.00	186,000,000.00	0.00	3,890,000,000.00
26	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2an	5.1.1.3	0.00	0.00	-	0.00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.1.1.3	0.00	186,000,000.00	-	3,890,000,000.00
28	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	3,916,416,570,192.00	3,730,420,012,925.76	95.25	3,416,390,957,965.09
29	BELANJA DAERAH	5.1.2				
30	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1,127,045,955,366.13	1,085,548,797,241.45	96.32	1,009,787,854,448.88
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1,143,117,115,411.87	1,010,692,655,425.09	88.42	868,397,712,028.13

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
33	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	964,120,371.00	964,120,370.60	100.00	0.00
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	398,709,272,025.00	382,505,675,850.32	95.94	303,819,808,881.60
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	27,467,447,500.00	15,651,445,000.00	56.98	20,473,066,972.00
36	Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	2,697,303,910,674.00	2,495,362,693,887.46	92.51	2,202,478,442,330.61
37	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	9,517,500,000.00	1,727,306,005.00	18.15	11,021,176,466.00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	108,896,637,327.00	86,126,274,741.00	79.09	123,664,589,654.00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	134,290,136,174.00	118,169,885,080.81	88.00	149,832,834,297.05
41	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	220,349,338,060.00	208,508,996,188.58	94.63	133,679,243,538.30
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8,626,438,504.00	8,617,485,563.00	99.90	10,702,434,291.00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1,324,275,000.00	1,312,000,000.00	99.07	2,440,000,000.00
44	Jumlah Belanja Modal	5.1.2.2	483,004,325,065.00	424,461,947,578.39	87.88	431,340,278,246.35
45	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
46	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	6,221,807,986.00	2,026,255,613.38	32.57	1,183,127,722.00
47	Jumlah Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	6,221,807,986.00	2,026,255,613.38	32.57	1,183,127,722.00
48	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				



49	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	103,870,000,000.00	99,090,915,050.00	95.40	84,525,792,400.00
50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.2	23,598,390,000.00	16,322,812,800.00	69.17	12,026,574,200.00
51	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.3	660,763,137,197.00	660,311,350,000.00	99.93	687,083,019,791.00
52	Jumlah Belanja Transfer	5.1.2.4	788,231,527,197.00	775,725,077,850.00	98.41	783,635,386,391.00
53	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.1.2	3,974,761,570,922.00	3,697,575,974,929.23	93.03	3,418,637,234,689.96
54	SURPLUS / DEFISIT	5.1.3	-58,345,000,730.00	32,844,037,996.53	-56.29	-2,246,276,724.87
55	PEMBIAYAAN	5.1.4				
56	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
57	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1	78,495,000,730.00	76,370,858,730.47	97.29	59,002,535,455.34
58	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1	0.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00
59	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1	0.00	7,000,000.00	0.00	45,925,000.00
60	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1	78,495,000,730.00	76,377,858,730.47	97.30	79,048,460,455.34
61	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
62	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
63	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00
64	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2	20,150,000,000.00	20,150,000,000.00	0.00	0.00
65	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4	58,345,000,730.00	56,227,858,730.47	96.37	79,048,460,455.34
66	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	0.00	89,071,896,727.00		76,802,183,730.47

**Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama*



Tabel 1.12

Pemerintahan Kabupaten Gresik

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	3,916,416,570,192.00	3,730,420,012,925.76	-185,996,557,266.24	-4.75
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	309,529,135,728.00	288,491,643,212.97	-21,037,492,515.03	-6.80
1.02 1.02.0.00.0.00.01.	KESEHATAN	307,223,235,728.00	286,626,377,838.61	-20,596,857,889.39	-6.70
	DINAS KESEHATAN	307,223,235,728.00	286,626,377,838.61	-20,596,857,889.39	-6.70
1.03 1.03.2.10.0.00.00.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	510,000,000.00	179,001,000.00	-330,999,000.00	-64.90
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	510,000,000.00	179,001,000.00	-330,999,000.00	-64.90
1.04 1.04.1.03.0.00.01.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,795,900,000.00	1,686,264,374.36	-109,635,625.64	-6.10
	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,795,900,000.00	1,686,264,374.36	-109,635,625.64	-6.10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	133,340,000,000.00	62,549,020,374.36	-70,790,979,625.64	-53.09
2.11 2.11.0.00.0.00.01.	LINGKUNGAN HIDUP	8,600,000,000.00	3,643,108,934.00	-4,956,891,066.00	-57.64
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,600,000,000.00	3,643,108,934.00	-4,956,891,066.00	-57.64
2.15 2.15.0.00.0.00.01.	PERHUBUNGAN	21,800,000,000.00	5,929,593,508.00	-15,870,406,492.00	-72.80
	DINAS PERHUBUNGAN	21,800,000,000.00	5,929,593,508.00	-15,870,406,492.00	-72.80
2.17 2.17.3.30.3.31.07.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,500,000,000.00	2,062,249,771.00	-437,750,229.00	-17.51
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,500,000,000.00	2,062,249,771.00	-437,750,229.00	-17.51
2.18 2.18.0.00.0.00.23.	PENANAMAN MODAL	100,440,000,000.00	50,914,068,161.36	-49,525,931,838.64	-49.31
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,440,000,000.00	50,914,068,161.36	-49,525,931,838.64	-49.31
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1,130,000,000.00	1,130,290,023.00	290,023.00	0.03
3.25 3.25.0.00.0.00.21.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	165,000,000.00	166,045,000.00	1,045,000.00	0.63
	DINAS PERIKANAN	165,000,000.00	166,045,000.00	1,045,000.00	0.63
3.26 3.26.2.22.2.19.02.	PARIWISATA	850,000,000.00	786,621,023.00	-63,378,977.00	-7.46
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	850,000,000.00	786,621,023.00	-63,378,977.00	-7.46
3.27 3.27.2.09.0.00.10.	PERTANIAN	115,000,000.00	177,624,000.00	62,624,000.00	54.46
	DINAS PERTANIAN	115,000,000.00	177,624,000.00	62,624,000.00	54.46
	UNSUR PENUNJANG	3,472,417,434,464.00	3,378,249,059,315.43	-94,168,375,148.57	-2.71
5.02 5.02.0.00.0.00.05.	KEUANGAN	3,472,417,434,464.00	3,378,249,059,315.43	-94,168,375,148.57	-2.71
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,472,417,434,464.00	3,378,249,059,315.43	-94,168,375,148.57	-2.71
	BELANJA	3,974,761,570,922.00	3,697,575,974,929.23	-277,185,595,992.77	-6.97
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.	Pendidikan	1,030,998,567,356.00	993,929,098,739.51	-37,069,468,616.49	-3.60

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.	DINAS PENDIDIKAN	1,030,998,567,356.00	993,929,098,739.51	-37,069,468,616.49	-3.60
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	985,087,804,623.00	949,134,527,072.96	-35,953,277,550.04	-3.65
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	522,465,946,309.13	514,333,879,269.96	-8,132,067,039.17	-1.56
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180,687,802,673.87	164,606,606,219.00	-16,081,196,454.87	-8.90
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	278,914,855,640.00	270,194,041,584.00	-8,720,814,056.00	-3.13
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3,019,200,000.00	0.00	-3,019,200,000.00	-100.00
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	45,910,762,733.00	44,794,571,666.55	-1,116,191,066.45	-2.43
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,147,292,578.00	15,053,757,992.00	-93,534,586.00	-0.62
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,230,622,100.00	21,210,525,544.55	-1,020,096,555.45	-4.59
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.2.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,532,848,055.00	8,530,288,130.00	-2,559,925.00	-0.03
1.02 1.02.0.00.0.00.01.	KESEHATAN	758,428,652,559.00	710,547,619,525.10	-47,881,033,033.90	-6.31
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.	DINAS KESEHATAN	758,428,652,559.00	710,547,619,525.10	-47,881,033,033.90	-6.31
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	668,797,294,472.00	640,384,157,609.77	-28,413,136,862.23	-4.25
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	268,845,673,090.00	265,513,532,416.93	-3,332,140,673.07	-1.24
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	397,151,621,382.00	372,072,457,553.84	-25,079,163,828.16	-6.31
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	2,800,000,000.00	2,798,167,639.00	-1,832,361.00	-0.07
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	89,631,358,087.00	70,163,461,915.33	-19,467,896,171.67	-21.72
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,070,228,087.00	50,347,957,927.00	-10,722,270,160.00	-17.56
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,811,130,000.00	19,815,503,988.33	-7,995,626,011.67	-28.75
1.02 1.02.0.00.0.00.01.5.2.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	750,000,000.00	0.00	-750,000,000.00	-100.00
1.03 1.03.2.10.0.00.00.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	368,451,610,940.00	351,085,339,759.49	-17,366,271,180.51	-4.71
1.03 1.03.2.10.0.00.00.5.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	253,170,832,872.00	240,623,590,844.53	-12,547,242,027.47	-4.96
1.03 1.03.2.10.0.00.00.5.1.	BELANJA OPERASI	69,995,217,911.00	65,735,628,113.67	-4,259,589,797.33	-6.09
1.03 1.03.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	12,942,697,553.00	12,609,796,110.03	-332,901,442.97	-2.57
1.03 1.03.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57,052,520,358.00	53,125,832,003.64	-3,926,688,354.36	-6.88
1.03 1.03.2.10.0.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	183,175,614,961.00	174,887,962,730.86	-8,287,652,230.14	-4.52
1.03 1.03.2.10.0.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,029,497,275.00	793,445,784.00	-236,051,491.00	-22.93
1.03 1.03.2.10.0.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,927,172,631.00	1,304,896,027.69	-622,276,603.31	-32.29
1.03 1.03.2.10.0.00.00.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180,218,945,055.00	172,789,620,919.17	-7,429,324,135.83	-4.12
1.03 1.04.1.03.0.00.01.5.	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	115,280,778,068.00	110,461,748,914.96	-4,819,029,153.04	-4.18
1.03 1.04.1.03.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	19,826,619,693.00	18,037,577,394.85	-1,789,042,298.15	-9.02
1.03 1.04.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14,391,619,693.00	12,602,577,394.85	-1,789,042,298.15	-12.43
1.03 1.04.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	5,435,000,000.00	5,435,000,000.00	0.00	0.00
1.03 1.04.1.03.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	95,454,158,375.00	92,424,171,520.11	-3,029,986,854.89	-3.17
1.03 1.04.1.03.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,858,650.00	33,300,000.00	-62,558,650.00	-65.26
1.03 1.04.1.03.0.00.01.5.2.04.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,171,037,353.00	68,342,958,515.46	-1,828,078,837.54	-2.61

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.03 1.04.1.03.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25,187,262,372.00	24,047,913,004.65	-1,139,349,367.35	-4.52
1.04 1.04.1.03.0.00.01.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	46,920,811,187.00	44,980,209,894.52	-1,940,601,292.48	-4.14
1.04 1.04.1.03.0.00.01.5.	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	46,920,811,187.00	44,980,209,894.52	-1,940,601,292.48	-4.14
1.04 1.04.1.03.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	35,980,382,974.00	34,861,961,436.60	-1,118,421,537.40	-3.11
1.04 1.04.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	10,517,398,022.00	10,382,126,935.87	-135,271,086.13	-1.29
1.04 1.04.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17,757,984,952.00	17,524,834,500.73	-233,150,451.27	-1.31
1.04 1.04.0.00.0.00.01.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	7,705,000,000.00	6,955,000,000.00	-750,000,000.00	-9.73
1.04 1.04.1.03.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	10,940,428,213.00	10,118,248,457.92	-822,179,755.08	-7.52
1.04 1.04.1.03.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	445,651,275.00	487,502,478.00	41,851,203.00	9.39
1.04 1.04.1.03.0.00.01.5.2.04.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	934,088,410.00	928,669,320.36	-5,419,089.64	-0.58
1.04 1.04.1.03.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9,560,688,528.00	8,702,076,659.56	-858,611,868.44	-8.98
1.05 1.05.0.00.0.00.01.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	44,449,566,443.00	42,305,466,402.66	-2,144,100,040.34	-4.82
1.05 1.05.0.00.0.00.01.5.	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26,874,136,986.00	26,536,644,089.54	-337,492,896.46	-1.26
1.05 1.05.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	26,871,572,661.00	26,534,080,089.54	-337,492,571.46	-1.26
1.05 1.05.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	14,239,915,398.00	14,034,511,385.54	-205,404,012.46	-1.44
1.05 1.05.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12,631,657,263.00	12,499,568,704.00	-132,088,559.00	-1.05
1.05 1.05.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	2,564,325.00	2,564,000.00	-325.00	-0.01
1.05 1.05.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,564,325.00	2,564,000.00	-325.00	-0.01
1.05 1.05.0.00.0.00.02.5.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	10,650,671,646.00	9,532,301,422.57	-1,118,370,223.43	-10.50
1.05 1.05.0.00.0.00.02.5.1.	BELANJA OPERASI	10,270,693,788.00	9,277,104,139.57	-993,589,648.43	-9.67
1.05 1.05.0.00.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,294,016,000.00	4,043,034,248.62	-250,981,751.38	-5.84
1.05 1.05.0.00.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5,976,677,788.00	5,234,069,890.95	-742,607,897.05	-12.43
1.05 1.05.0.00.0.00.02.5.2.	BELANJA MODAL	379,977,858.00	255,197,283.00	-124,780,575.00	-32.84
1.05 1.05.0.00.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354,690,425.00	230,099,850.00	-124,590,575.00	-35.13
1.05 1.05.0.00.0.00.02.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,287,433.00	25,097,433.00	-190,000.00	-0.75
1.05 1.05.0.00.0.00.04.5.1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,924,757,811.00	6,236,520,890.55	-688,236,920.45	-9.94
1.05 1.05.0.00.0.00.04.5.1.01.	BELANJA OPERASI	6,924,757,811.00	6,236,520,890.55	-688,236,920.45	-9.94
1.05 1.05.0.00.0.00.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,993,460,000.00	2,874,106,709.02	-119,353,290.98	-3.99
1.05 1.05.0.00.0.00.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3,931,297,811.00	3,362,414,181.53	-568,883,629.47	-14.47
1.06 1.06.0.00.0.00.01.	SOSIAL	31,769,993,294.00	24,233,411,237.01	-7,536,582,056.99	-23.72
1.06 1.06.0.00.0.00.01.5.	DINAS SOSIAL	31,769,993,294.00	24,233,411,237.01	-7,536,582,056.99	-23.72
1.06 1.06.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	31,595,391,718.00	24,068,858,237.01	-7,526,533,480.99	-23.82
1.06 1.06.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,933,910,794.00	3,719,768,321.01	-214,142,472.99	-5.44
1.06 1.06.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13,888,233,424.00	11,594,369,916.00	-2,293,863,508.00	-16.52
1.06 1.06.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	75,000,000.00	58,275,000.00	-16,725,000.00	-22.30
1.06 1.06.0.00.0.00.01.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	13,698,247,500.00	8,696,445,000.00	-5,001,802,500.00	-36.51
1.06 1.06.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	174,601,576.00	164,553,000.00	-10,048,576.00	-5.76

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.06 1.06.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174,601,576.00	164,553,000.00	-10,048,576.00	-5.76
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07 2.07.0.00.0.00.01.	TENAGA KERJA	11,540,775,900.00	10,649,453,736.22	-891,322,163.78	-7.72
2.07 2.07.0.00.0.00.01.5.	DINAS TENAGA KERJA	11,540,775,900.00	10,649,453,736.22	-891,322,163.78	-7.72
2.07 2.07.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10,675,280,604.00	9,837,709,692.15	-837,570,911.85	-7.85
2.07 2.07.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,832,006,000.00	4,703,196,377.15	-128,809,622.85	-2.67
2.07 2.07.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5,843,274,604.00	5,134,513,315.00	-708,761,289.00	-12.13
2.07 2.07.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	865,495,296.00	811,744,044.07	-53,751,251.93	-6.21
2.07 2.07.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	607,679,096.00	557,807,000.00	-49,872,096.00	-8.21
2.07 2.07.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257,816,200.00	253,937,044.07	-3,879,155.93	-1.50
2.08 2.14.2.08.0.00.05.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,612,616,000.00	3,051,243,698.00	-561,372,302.00	-15.54
2.08 2.14.2.08.0.00.05.5.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,612,616,000.00	3,051,243,698.00	-561,372,302.00	-15.54
2.08 2.14.2.08.0.00.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3,612,616,000.00	3,051,243,698.00	-561,372,302.00	-15.54
2.08 2.14.2.08.0.00.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3,612,616,000.00	3,051,243,698.00	-561,372,302.00	-15.54
2.09 3.27.2.09.0.00.10.	PANGAN	880,408,825.00	699,829,150.00	-180,579,675.00	-20.51
2.09 3.27.2.09.0.00.10.5.	DINAS PERTANIAN	880,408,825.00	699,829,150.00	-180,579,675.00	-22.99
2.09 3.27.2.09.0.00.10.5.1.	BELANJA OPERASI	874,468,825.00	694,029,150.00	-180,439,675.00	-20.63
2.09 3.27.2.09.0.00.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	874,468,825.00	694,029,150.00	-180,439,675.00	-20.63
2.09 3.27.2.09.0.00.10.5.2.	BELANJA MODAL	5,940,000.00	5,800,000.00	-140,000.00	-2.36
2.09 3.27.2.09.0.00.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,940,000.00	5,800,000.00	-140,000.00	-2.36
2.10 1.03.2.10.0.00.00.	PERTANAHAN	10,875,000,000.00	2,416,732,779.00	-8,458,267,221.00	-77.78
2.10 1.03.2.10.0.00.00.5.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	10,875,000,000.00	2,416,732,779.00	-8,458,267,221.00	-77.78
2.10 1.03.2.10.0.00.00.5.1.	BELANJA OPERASI	1,357,500,000.00	689,426,774.00	-668,073,226.00	-49.21
2.10 1.03.2.10.0.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,357,500,000.00	689,426,774.00	-668,073,226.00	-49.21
2.10 1.03.2.10.0.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	9,517,500,000.00	1,727,306,005.00	-7,790,193,995.00	-81.85
2.10 1.03.2.10.0.00.00.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	9,517,500,000.00	1,727,306,005.00	-7,790,193,995.00	-81.85
2.11 2.11.0.00.0.00.01.	LINGKUNGAN HIDUP	49,076,735,294.00	41,911,699,872.11	-7,165,035,421.89	-14.60
2.11 2.11.0.00.0.00.01.5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49,076,735,294.00	41,911,699,872.11	-7,165,035,421.89	-14.60
2.11 2.11.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	37,959,438,870.00	35,016,646,609.22	-2,942,792,260.78	-7.75
2.11 2.11.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	9,135,965,489.00	8,914,487,747.55	-221,477,741.45	-2.42
2.11 2.11.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28,254,293,413.00	25,532,978,893.67	-2,721,314,519.33	-9.63
2.11 2.11.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	569,179,968.00	569,179,968.00	0.00	0.00
2.11 2.11.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	11,117,296,424.00	6,895,053,262.89	-4,222,243,161.11	-37.98
2.11 2.11.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,226,831,271.00	3,804,116,656.00	-2,422,714,615.00	-38.91
2.11 2.11.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,279,108,908.00	2,483,580,361.89	-1,795,528,546.11	-41.96

[illegible]



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.21 2.16.2.20.2.21.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	248,756,275.00	234,909,366.00	-13,846,909.00	-5.57
2.22 3.26.2.22.2.19.02.	KEBUDAYAAN	2,790,999,900.00	2,000,473,337.00	-790,526,563.00	-28.32
2.22 3.26.2.22.2.19.02.5.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH	2,790,999,900.00	2,000,473,337.00	-790,526,563.00	-28.32
2.22 3.26.2.22.2.19.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2,768,679,900.00	1,978,161,832.00	-790,518,068.00	-28.55
2.22 3.26.2.22.2.19.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2,109,679,900.00	1,978,161,832.00	-131,518,068.00	-6.23
2.22 3.26.2.22.2.19.02.5.1.05.	Belanja Hibah	659,000,000.00	0.00	-659,000,000.00	-100.00
2.22 3.26.2.22.2.19.02.5.2.	BELANJA MODAL	22,320,000.00	22,311,505.00	-8,495.00	-0.04
2.22 3.26.2.22.2.19.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,320,000.00	22,311,505.00	-8,495.00	-0.04
2.23 2.23.2.24.0.00.02.	PERPUSTAKAAN	7,155,738,606.00	6,767,017,917.52	-388,720,688.48	-5.43
2.23 2.23.2.24.0.00.02.5.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7,155,738,606.00	6,767,017,917.52	-388,720,688.48	-5.43
2.23 2.23.2.24.0.00.02.5.1.	BELANJA OPERASI	6,769,055,112.00	6,382,825,957.52	-386,229,154.48	-5.71
2.23 2.23.2.24.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,093,506,606.00	3,881,830,513.52	-211,676,092.48	-5.17
2.23 2.23.2.24.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2,675,548,506.00	2,500,995,444.00	-174,553,062.00	-6.52
2.23 2.23.2.24.0.00.02.5.2.	BELANJA MODAL	386,683,494.00	384,191,960.00	-2,491,534.00	-0.64
2.23 2.23.2.24.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376,835,994.00	374,591,960.00	-2,244,034.00	-0.60
2.23 2.23.2.24.0.00.02.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,847,500.00	9,600,000.00	-247,500.00	-2.51
2.24 2.23.2.24.0.00.02.	KEARSIPAN	125,030,000.00	124,098,225.00	-931,775.00	-0.75
2.24 2.23.2.24.0.00.02.5.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	125,030,000.00	124,098,225.00	-931,775.00	-0.75
2.24 2.23.2.24.0.00.02.5.1.	BELANJA OPERASI	110,030,000.00	109,098,225.00	-931,775.00	-0.85
2.24 2.23.2.24.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110,030,000.00	109,098,225.00	-931,775.00	-0.85
2.24 2.23.2.24.0.00.02.5.2.	BELANJA MODAL	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2.24 2.23.2.24.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25 3.25.0.00.0.00.21.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	15,243,196,857.00	10,324,197,693.85	-4,918,999,163.15	-32.27
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.	DINAS PERIKANAN	15,243,196,857.00	10,324,197,693.85	-4,918,999,163.15	-32.27
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.1.	BELANJA OPERASI	12,891,018,949.00	9,573,191,107.90	-3,317,827,841.10	-25.74
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,341,352,832.00	4,088,829,622.18	-252,523,209.82	-5.82
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6,914,266,117.00	4,313,655,065.72	-2,600,611,051.28	-37.61
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.1.05.	Belanja Hibah	1,635,400,000.00	1,170,706,420.00	-464,693,580.00	-28.41
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.2.	BELANJA MODAL	2,352,177,908.00	751,006,585.95	-1,601,171,322.05	-68.07
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	599,677,908.00	173,750,000.00	-425,927,908.00	-71.03
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,690,000,000.00	515,099,906.75	-1,174,900,093.25	-69.52
3.25 3.25.0.00.0.00.21.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62,500,000.00	62,156,679.20	-343,320.80	-0.55
3.26 3.26.2.22.2.19.02.	PARIWISATA	1,550,004,764.00	1,110,198,390.83	-439,806,373.17	-28.37
3.26 3.26.2.22.2.19.02.5.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH	1,550,004,764.00	1,110,198,390.83	-439,806,373.17	-28.37



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.26 3.26.2.22.2.19.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1,550,004,764.00	1,110,198,390.83	-439,806,373.17	-28.37
3.26 3.26.2.22.2.19.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,550,004,764.00	1,110,198,390.83	-439,806,373.17	-28.37
3.27 3.27.2.09.0.00.10.	PERTANIAN	50,158,085,514.00	45,638,659,184.94	-4,519,426,329.06	-9.01
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.	DINAS PERTANIAN	50,158,085,514.00	45,638,659,184.94	-4,519,426,329.06	-9.01
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.1.	BELANJA OPERASI	47,523,356,989.00	44,917,109,184.94	-2,606,247,804.06	-5.48
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.1.01.	Belanja Pegawai	12,622,414,999.00	12,442,692,652.67	-179,722,346.33	-1.42
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31,777,106,190.00	29,840,830,232.27	-1,936,275,957.73	-6.09
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.1.05.	Belanja Hibah	3,123,835,800.00	2,633,586,300.00	-490,249,500.00	-15.69
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.2.	BELANJA MODAL	2,634,728,525.00	721,550,000.00	-1,913,178,525.00	-72.61
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	911,592,525.00	721,550,000.00	-190,042,525.00	-20.85
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199,136,000.00	0.00	-199,136,000.00	-100.00
3.27 3.27.2.09.0.00.10.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,524,000,000.00	0.00	-1,524,000,000.00	-100.00
3.30 2.17.3.30.3.31.07.	PERDAGANGAN	2,022,500,000.00	336,564,838.00	-1,685,935,162.00	-83.36
3.30 2.17.3.30.3.31.07.5.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,022,500,000.00	336,564,838.00	-1,685,935,162.00	-83.36
3.30 2.17.3.30.3.31.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1,284,807,025.00	336,564,838.00	-948,242,187.00	-73.80
3.30 2.17.3.30.3.31.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,284,807,025.00	336,564,838.00	-948,242,187.00	-73.80
3.30 2.17.3.30.3.31.07.5.2.	BELANJA MODAL	737,692,975.00	0.00	-737,692,975.00	-100.00
3.30 2.17.3.30.3.31.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,692,975.00	0.00	-7,692,975.00	-100.00
3.30 2.17.3.30.3.31.07.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	730,000,000.00	0.00	-730,000,000.00	-100.00
3.31 2.17.3.30.3.31.07.	PERINDUSTRIAN	175,000,000.00	104,571,686.00	-70,428,314.00	-40.24
3.31 2.17.3.30.3.31.07.5.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	175,000,000.00	104,571,686.00	-70,428,314.00	-40.24
3.31 2.17.3.30.3.31.07.5.1.	BELANJA OPERASI	175,000,000.00	104,571,686.00	-70,428,314.00	-40.24
3.31 2.17.3.30.3.31.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175,000,000.00	104,571,686.00	-70,428,314.00	-40.24
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01 4.01.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH	109,404,068,905.00	90,859,936,862.08	-18,544,132,042.92	-16.95
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.	SEKRETARIAT DAERAH	109,404,068,905.00	90,859,936,862.08	-18,544,132,042.92	-16.95
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	107,081,181,358.00	88,810,266,216.08	-18,270,915,141.92	-17.06
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	24,989,948,000.00	22,558,838,766.23	-2,431,109,233.77	-9.73
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52,482,138,358.00	45,003,586,449.85	-7,478,551,908.15	-14.25
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	26,564,095,000.00	21,247,841,000.00	-5,316,254,000.00	-20.01
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3,045,000,000.00	0.00	-3,045,000,000.00	-100.00
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	2,322,887,547.00	2,049,670,646.00	-273,216,901.00	-11.76
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,911,844,818.00	1,645,707,000.00	-266,137,818.00	-13.92
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380,304,646.00	378,863,646.00	-1,441,000.00	-0.38
4.01 4.01.0.00.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30,738,083.00	25,100,000.00	-5,638,083.00	-18.34

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.02 4.02.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DPRD	110,103,971,901.00	84,074,570,764.36	-26,029,401,136.64	-23.64
4.02 4.02.0.00.0.00.01.5.	SEKRETARIAT DEWAN	110,103,971,901.00	84,074,570,764.36	-26,029,401,136.64	-23.64
4.02 4.02.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	107,713,236,059.00	82,550,372,814.36	-25,162,863,244.64	-23.36
4.02 4.02.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	36,307,109,901.00	35,676,678,960.05	-630,430,940.95	-1.74
4.02 4.02.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71,406,126,158.00	46,873,693,854.31	-24,532,432,303.69	-34.36
4.02 4.02.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	2,390,735,842.00	1,524,197,950.00	-866,537,892.00	-36.25
4.02 4.02.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,390,735,842.00	1,524,197,950.00	-866,537,892.00	-36.25
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01 5.01.5.05.0.00.02.	PERENCANAAN	12,369,070,900.00	11,547,343,545.31	-821,727,354.69	-6.64
5.01 5.01.5.05.0.00.02.5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12,369,070,900.00	11,547,343,545.31	-821,727,354.69	-6.64
5.01 5.01.5.05.0.00.02.5.1.	BELANJA OPERASI	12,227,309,025.00	11,409,793,545.31	-817,515,479.69	-6.69
5.01 5.01.5.05.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	5,975,097,000.00	5,782,853,561.31	-192,243,438.69	-3.22
5.01 5.01.5.05.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6,252,212,025.00	5,626,939,984.00	-625,272,041.00	-10.00
5.01 5.01.5.05.0.00.02.5.2.	BELANJA MODAL	141,761,875.00	137,550,000.00	-4,211,875.00	-2.97
5.01 5.01.5.05.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141,761,875.00	137,550,000.00	-4,211,875.00	-2.97
5.02 5.02.0.00.0.00.05.	KEUANGAN	867,540,972,938.00	827,473,895,276.03	-40,067,077,661.97	-4.62
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	867,540,972,938.00	827,473,895,276.03	-40,067,077,661.97	-4.62
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.1.	BELANJA OPERASI	72,448,089,430.00	49,156,035,490.65	-23,292,053,939.35	-32.15
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	52,005,539,154.00	34,873,332,870.50	-17,132,206,283.50	-32.94
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19,478,429,905.00	13,318,582,249.55	-6,159,847,655.45	-31.62
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.1.03.	Belanja Bunga	964,120,371.00	964,120,370.60	-0.40	-0.00
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.2.	BELANJA MODAL	639,548,325.00	566,526,322.00	-73,022,003.00	-11.42
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535,814,325.00	482,476,900.00	-53,337,425.00	-9.95
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103,734,000.00	84,049,422.00	-19,684,578.00	-18.98
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,221,807,986.00	2,026,255,613.38	-4,195,552,372.62	-67.43
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	6,221,807,986.00	2,026,255,613.38	-4,195,552,372.62	-67.43
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.4.	BELANJA TRANSFER	788,231,527,197.00	775,725,077,850.00	-12,506,449,347.00	-1.59
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	127,468,390,000.00	115,413,727,850.00	-12,054,662,150.00	-9.46
5.02 5.02.0.00.0.00.05.5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	660,763,137,197.00	660,311,350,000.00	-451,787,197.00	-0.07
5.03 5.03.5.04.0.00.02.	KEPEGAWAIAN	14,013,251,704.00	11,846,968,104.99	-2,166,283,599.01	-15.46
5.03 5.03.5.04.0.00.02.5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14,013,251,704.00	11,846,968,104.99	-2,166,283,599.01	-15.46
5.03 5.03.5.04.0.00.02.5.1.	BELANJA OPERASI	13,316,031,789.00	11,271,009,104.99	-2,045,022,684.01	-15.36
5.03 5.03.5.04.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	6,800,056,816.00	6,639,173,044.99	-160,883,771.01	-2.37
5.03 5.03.5.04.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6,515,974,973.00	4,631,836,060.00	-1,884,138,913.00	-28.92
5.03 5.03.5.04.0.00.02.5.2.	BELANJA MODAL	697,219,915.00	575,959,000.00	-121,260,915.00	-17.39

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.03 5.03.5.04.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	511,117,915.00	390,589,000.00	-120,528,915.00	-23.58
5.03 5.03.5.04.0.00.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186,102,000.00	185,370,000.00	-732,000.00	-0.39
5.04 5.03.5.04.0.00.02.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2,759,612,113.00	2,019,621,105.00	-739,991,008.00	-26.82
5.04 5.03.5.04.0.00.02.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,759,612,113.00	2,019,621,105.00	-739,991,008.00	-26.82
5.04 5.03.5.04.0.00.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2,759,612,113.00	2,019,621,105.00	-739,991,008.00	-26.82
5.04 5.03.5.04.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2,759,612,113.00	2,019,621,105.00	-739,991,008.00	-26.82
5.05 5.01.5.05.0.00.02.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,440,000,000.00	1,310,558,698.00	-129,441,302.00	-8.99
5.05 5.01.5.05.0.00.02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,440,000,000.00	1,310,558,698.00	-129,441,302.00	-8.99
5.05 5.01.5.05.0.00.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1,440,000,000.00	1,310,558,698.00	-129,441,302.00	-8.99
5.05 5.01.5.05.0.00.02.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,440,000,000.00	1,310,558,698.00	-129,441,302.00	-8.99
	UNSUR PENGAWAS				
6.01 6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT	29,178,315,379.00	13,390,148,705.94	-15,788,166,673.06	-54.11
6.01 6.01.0.00.0.00.01.5.	INSPEKTORAT	29,178,315,379.00	13,390,148,705.94	-15,788,166,673.06	-54.11
6.01 6.01.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	24,019,277,189.00	13,067,937,705.94	-10,951,339,483.06	-45.59
6.01 6.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7,977,808,768.00	7,573,117,708.94	-404,691,059.06	-5.07
6.01 6.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16,041,468,421.00	5,494,819,997.00	-10,546,648,424.00	-65.75
6.01 6.01.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	5,159,038,190.00	322,211,000.00	-4,836,827,190.00	-93.75
6.01 6.01.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,159,038,190.00	322,211,000.00	-4,836,827,190.00	-93.75
	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01 7.01.0.00.0.00.	KECAMATAN	108,079,118,754.00	99,672,258,186.28	-8,406,860,567.72	-7.78
7.01 7.01.0.00.0.00.01.	KECAMATAN GRESIK	27,606,310,730.00	24,419,455,593.53	-3,186,855,136.47	-11.54
7.01 7.01.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	24,532,864,639.00	21,781,676,300.53	-2,751,188,338.47	-11.21
7.01 7.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	14,054,547,354.00	12,211,139,298.18	-1,843,408,055.82	-13.12
7.01 7.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10,478,317,285.00	9,570,537,002.35	-907,780,282.65	-8.66
7.01 7.01.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	3,073,446,091.00	2,637,779,293.00	-435,666,798.00	-14.18
7.01 7.01.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,558,208,929.00	1,203,293,000.00	-354,915,929.00	-22.78
7.01 7.01.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	956,171,902.00	949,739,622.00	-6,432,280.00	-0.67
7.01 7.01.0.00.0.00.01.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	559,065,260.00	484,746,671.00	-74,318,589.00	-13.29
7.01 7.01.0.00.0.00.02.	KECAMATAN KEBOMAS	19,335,637,348.00	17,205,202,992.17	-2,130,434,355.83	-11.02
7.01 7.01.0.00.0.00.02.5.1.	BELANJA OPERASI	16,383,549,253.00	14,531,584,458.57	-1,851,964,794.43	-11.30
7.01 7.01.0.00.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	8,933,244,000.00	7,698,272,500.57	-1,234,971,499.43	-13.82
7.01 7.01.0.00.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7,450,305,253.00	6,833,311,958.00	-616,993,295.00	-8.28
7.01 7.01.0.00.0.00.02.5.2.	BELANJA MODAL	2,952,088,095.00	2,673,618,533.60	-278,469,561.40	-9.43
7.01 7.01.0.00.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	730,153,495.00	514,263,000.00	-215,890,495.00	-29.57
7.01 7.01.0.00.0.00.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	343,984,000.00	341,829,523.60	-2,154,476.40	-0.63

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7.01 7.01.0.00.0.00.03.5.1.	BELANJA OPERASI	3,859,243,269.00	3,750,556,959.02	-108,686,309.98	-2.82
7.01 7.01.0.00.0.00.02.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,875,520,600.00	1,815,126,010.00	-60,394,590.00	-3.22
7.01 7.01.0.00.0.00.02.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,430,000.00	2,400,000.00	-30,000.00	-1.23
7.01 7.01.0.00.0.00.03.	KECAMATAN MANYAR	3,859,243,269.00	3,750,556,959.02	-108,686,309.98	-2.82
7.01 7.01.0.00.0.00.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,807,923,655.00	2,731,704,807.02	-76,218,847.98	-2.71
7.01 7.01.0.00.0.00.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,051,319,614.00	1,018,852,152.00	-32,467,462.00	-3.09
7.01 7.01.0.00.0.00.04.	KECAMATAN CERME	3,390,858,026.00	3,197,380,874.02	-193,477,151.98	-5.71
7.01 7.01.0.00.0.00.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3,309,960,626.00	3,168,039,074.02	-141,921,551.98	-4.29
7.01 7.01.0.00.0.00.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,404,917,056.00	2,302,467,080.02	-102,449,975.98	-4.26
7.01 7.01.0.00.0.00.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	905,043,570.00	865,571,994.00	-39,471,576.00	-4.36
7.01 7.01.0.00.0.00.04.5.2.	BELANJA MODAL	80,897,400.00	29,341,800.00	-51,555,600.00	-63.73
7.01 7.01.0.00.0.00.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80,897,400.00	29,341,800.00	-51,555,600.00	-63.73
7.01 7.01.0.00.0.00.05.	KECAMATAN BENJENG	4,414,251,262.00	4,143,221,510.37	-271,029,751.63	-6.14
7.01 7.01.0.00.0.00.05.5.1.	BELANJA OPERASI	4,353,908,098.00	4,143,221,510.37	-210,686,587.63	-4.84
7.01 7.01.0.00.0.00.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,386,554,000.00	3,245,753,480.37	-140,800,519.63	-4.16
7.01 7.01.0.00.0.00.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	967,354,098.00	897,468,030.00	-69,886,068.00	-7.22
7.01 7.01.0.00.0.00.05.5.2.	BELANJA MODAL	60,343,164.00	0.00	-60,343,164.00	-100.00
7.01 7.01.0.00.0.00.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,343,164.00	0.00	-60,343,164.00	-100.00
7.01 7.01.0.00.0.00.06.	KECAMATAN BALONGPANGGANG	4,292,302,020.00	4,117,514,619.69	-174,787,400.31	-4.07
7.01 7.01.0.00.0.00.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4,273,064,520.00	4,098,289,619.69	-174,774,900.31	-4.09
7.01 7.01.0.00.0.00.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,477,712,820.00	3,339,353,042.69	-138,359,777.31	-3.98
7.01 7.01.0.00.0.00.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	795,351,700.00	758,936,577.00	-36,415,123.00	-4.58
7.01 7.01.0.00.0.00.06.5.2.	BELANJA MODAL	19,237,500.00	19,225,000.00	-12,500.00	-0.06
7.01 7.01.0.00.0.00.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,237,500.00	19,225,000.00	-12,500.00	-0.06
7.01 7.01.0.00.0.00.07.	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	3,783,577,246.00	3,713,427,547.47	-70,149,698.53	-1.85
7.01 7.01.0.00.0.00.07.5.1.	BELANJA OPERASI	3,759,659,796.00	3,690,597,547.47	-69,062,248.53	-1.84
7.01 7.01.0.00.0.00.07.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,737,333,246.00	2,710,916,436.47	-26,416,809.53	-0.97
7.01 7.01.0.00.0.00.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,022,326,550.00	979,681,111.00	-42,645,439.00	-4.17
7.01 7.01.0.00.0.00.07.5.2.	BELANJA MODAL	23,917,450.00	22,830,000.00	-1,087,450.00	-4.55
7.01 7.01.0.00.0.00.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,917,450.00	22,830,000.00	-1,087,450.00	-4.55
7.01 7.01.0.00.0.00.08.	KECAMATAN DRIYOREJO	3,400,084,500.00	3,272,339,886.87	-127,744,613.13	-3.76
7.01 7.01.0.00.0.00.08.5.1.	BELANJA OPERASI	3,373,823,625.00	3,246,489,886.87	-127,333,738.13	-3.77
7.01 7.01.0.00.0.00.08.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,622,427,000.00	2,507,547,773.87	-114,879,226.13	-4.38
7.01 7.01.0.00.0.00.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	751,396,625.00	738,942,113.00	-12,454,512.00	-1.66
7.01 7.01.0.00.0.00.08.5.2.	BELANJA MODAL	26,260,875.00	25,850,000.00	-410,875.00	-1.56

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7.01 7.01.0.00.0.00.08.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,260,875.00	25,850,000.00	-410,875.00	-1.56
7.01 7.01.0.00.0.00.09.	KECAMATAN WRINGINANOM	3,634,348,057.00	3,489,653,144.86	-144,694,912.14	-3.98
7.01 7.01.0.00.0.00.09.5.1.	BELANJA OPERASI	3,606,479,657.00	3,461,924,144.86	-144,555,512.14	-4.01
7.01 7.01.0.00.0.00.09.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,782,177,944.00	2,658,120,459.86	-124,057,484.14	-4.46
7.01 7.01.0.00.0.00.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	824,301,713.00	803,803,685.00	-20,498,028.00	-2.49
7.01 7.01.0.00.0.00.09.5.2.	BELANJA MODAL	27,868,400.00	27,729,000.00	-139,400.00	-0.50
7.01 7.01.0.00.0.00.09.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,868,400.00	27,729,000.00	-139,400.00	-0.50
7.01 7.01.0.00.0.00.10.	KECAMATAN KEDAMEAN	3,353,787,873.00	3,249,365,409.76	-104,422,463.24	-3.11
7.01 7.01.0.00.0.00.10.5.1.	BELANJA OPERASI	3,339,546,048.00	3,249,365,409.76	-90,180,638.24	-2.70
7.01 7.01.0.00.0.00.10.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,334,029,873.00	2,304,674,836.76	-29,355,036.24	-1.26
7.01 7.01.0.00.0.00.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,005,516,175.00	944,690,573.00	-60,825,602.00	-6.05
7.01 7.01.0.00.0.00.10.5.2.	BELANJA MODAL	14,241,825.00	0.00	-14,241,825.00	-100.00
7.01 7.01.0.00.0.00.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,241,825.00	0.00	-14,241,825.00	-100.00
7.01 7.01.0.00.0.00.11.	KECAMATAN MENGANTI	3,676,810,041.00	3,560,983,228.49	-115,826,812.51	-3.15
7.01 7.01.0.00.0.00.11.5.1.	BELANJA OPERASI	3,631,147,641.00	3,526,483,228.49	-104,664,412.51	-2.88
7.01 7.01.0.00.0.00.11.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,737,252,000.00	2,661,934,255.49	-75,317,744.51	-2.75
7.01 7.01.0.00.0.00.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	893,895,641.00	864,548,973.00	-29,346,668.00	-3.28
7.01 7.01.0.00.0.00.11.5.2.	BELANJA MODAL	45,662,400.00	34,500,000.00	-11,162,400.00	-24.45
7.01 7.01.0.00.0.00.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,662,400.00	34,500,000.00	-11,162,400.00	-24.45
7.01 7.01.0.00.0.00.12.	KECAMATAN SIDAYU	3,976,844,100.00	3,595,402,215.10	-381,441,884.90	-9.59
7.01 7.01.0.00.0.00.12.5.1.	BELANJA OPERASI	3,970,230,450.00	3,588,789,215.10	-381,441,234.90	-9.61
7.01 7.01.0.00.0.00.12.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,947,449,000.00	2,602,743,352.10	-344,705,647.90	-11.70
7.01 7.01.0.00.0.00.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,022,781,450.00	986,045,863.00	-36,735,587.00	-3.59
7.01 7.01.0.00.0.00.12.5.2.	BELANJA MODAL	6,613,650.00	6,613,000.00	-650.00	-0.01
7.01 7.01.0.00.0.00.12.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,613,650.00	6,613,000.00	-650.00	-0.01
7.01 7.01.0.00.0.00.13.	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	3,512,191,803.00	3,351,473,275.32	-160,718,527.68	-4.58
7.01 7.01.0.00.0.00.13.5.1.	BELANJA OPERASI	3,486,160,428.00	3,325,448,275.32	-160,712,152.68	-4.61
7.01 7.01.0.00.0.00.13.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,680,452,464.00	2,520,562,678.32	-159,889,785.68	-5.97
7.01 7.01.0.00.0.00.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	805,707,964.00	804,885,597.00	-822,367.00	-0.10
7.01 7.01.0.00.0.00.13.5.2.	BELANJA MODAL	26,031,375.00	26,025,000.00	-6,375.00	-0.02
7.01 7.01.0.00.0.00.13.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,031,375.00	26,025,000.00	-6,375.00	-0.02
7.01 7.01.0.00.0.00.14.	KECAMATAN PANCENG	3,988,420,566.00	3,916,032,411.63	-72,388,154.37	-1.81
7.01 7.01.0.00.0.00.14.5.1.	BELANJA OPERASI	3,911,753,391.00	3,839,473,211.63	-72,280,179.37	-1.85
7.01 7.01.0.00.0.00.14.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,975,268,820.00	2,911,848,119.63	-63,420,700.37	-2.13
7.01 7.01.0.00.0.00.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	936,484,571.00	927,625,092.00	-8,859,479.00	-0.95
7.01 7.01.0.00.0.00.14.5.2.	BELANJA MODAL	76,667,175.00	76,559,200.00	-107,975.00	-0.14

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7.01 7.01.0.00.0.00.14.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,667,175.00	76,559,200.00	-107,975.00	-0.14
7.01 7.01.0.00.0.00.15.	KECAMATAN BUNGAH	4,338,096,867.00	4,119,875,602.15	-218,221,264.85	-5.03
7.01 7.01.0.00.0.00.15.5.1.	BELANJA OPERASI	4,228,882,242.00	4,011,532,852.15	-217,349,389.85	-5.14
7.01 7.01.0.00.0.00.15.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,280,889,250.00	3,092,187,813.15	-188,701,436.85	-5.75
7.01 7.01.0.00.0.00.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	947,992,992.00	919,345,039.00	-28,647,953.00	-3.02
7.01 7.01.0.00.0.00.15.5.2.	BELANJA MODAL	109,214,625.00	108,342,750.00	-871,875.00	-0.80
7.01 7.01.0.00.0.00.15.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,834,625.00	53,513,750.00	-320,875.00	-0.60
7.01 7.01.0.00.0.00.15.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55,380,000.00	54,829,000.00	-551,000.00	-0.99
7.01 7.01.0.00.0.00.16.	KECAMATAN DUKUN	4,324,724,200.00	4,220,989,001.99	-103,735,198.01	-2.40
7.01 7.01.0.00.0.00.16.5.1.	BELANJA OPERASI	4,299,884,200.00	4,196,149,001.99	-103,735,198.01	-2.41
7.01 7.01.0.00.0.00.16.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,335,889,000.00	3,233,567,588.99	-102,321,411.01	-3.07
7.01 7.01.0.00.0.00.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	963,995,200.00	962,581,413.00	-1,413,787.00	-0.15
7.01 7.01.0.00.0.00.16.5.2.	BELANJA MODAL	24,840,000.00	24,840,000.00	0.00	0.00
7.01 7.01.0.00.0.00.16.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,840,000.00	24,840,000.00	0.00	0.00
7.01 7.01.0.00.0.00.17.	KECAMATAN SANGKAPURA	3,769,955,896.00	3,271,152,192.43	-498,803,703.57	-13.23
7.01 7.01.0.00.0.00.17.5.1.	BELANJA OPERASI	3,687,612,268.00	3,256,448,137.43	-431,164,130.57	-11.69
7.01 7.01.0.00.0.00.17.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,624,149,797.00	2,521,555,087.43	-102,594,709.57	-3.91
7.01 7.01.0.00.0.00.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,063,462,471.00	734,893,050.00	-328,569,421.00	-30.90
7.01 7.01.0.00.0.00.17.5.2.	BELANJA MODAL	82,343,628.00	14,704,055.00	-67,639,573.00	-82.14
7.01 7.01.0.00.0.00.17.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82,343,628.00	14,704,055.00	-67,639,573.00	-82.14
7.01 7.01.0.00.0.00.18.	KECAMATAN TAMBAK	3,421,674,950.00	3,078,231,721.41	-343,443,228.59	-10.04
7.01 7.01.0.00.0.00.18.5.1.	BELANJA OPERASI	3,364,246,317.00	3,022,333,722.41	-341,912,594.59	-10.16
7.01 7.01.0.00.0.00.18.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,481,384,950.00	2,263,665,234.41	-217,719,715.59	-8.77
7.01 7.01.0.00.0.00.18.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	882,861,367.00	758,668,488.00	-124,192,879.00	-14.07
7.01 7.01.0.00.0.00.18.5.2.	BELANJA MODAL	57,428,633.00	55,897,999.00	-1,530,634.00	-2.67
7.01 7.01.0.00.0.00.18.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57,428,633.00	55,897,999.00	-1,530,634.00	-2.67
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01 8.01.0.00.0.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	82,953,008,185.00	79,411,941,302.06	-3,541,066,882.94	-4.27
8.01 8.01.0.00.0.00.01.5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	82,953,008,185.00	79,411,941,302.06	-3,541,066,882.94	-4.27
8.01 8.01.0.00.0.00.01.5.1.	BELANJA OPERASI	82,769,581,752.00	79,317,816,302.06	-3,451,765,449.94	-4.17
8.01 8.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,350,101,786.00	3,224,619,833.78	-125,481,952.22	-3.75
8.01 8.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7,171,574,349.00	4,009,261,264.96	-3,162,313,084.04	-44.10
8.01 8.01.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	72,247,905,617.00	72,083,935,203.32	-163,970,413.68	-0.23
8.01 8.01.0.00.0.00.01.5.2.	BELANJA MODAL	183,426,433.00	94,125,000.00	-89,301,433.00	-48.69
8.01 8.01.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158,139,000.00	69,125,000.00	-89,014,000.00	-56.29
8.01 8.01.0.00.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,287,433.00	25,000,000.00	-287,433.00	-1.14

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Pedukung Urusan Pemerintahan yang Menurut Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Belanja	Realisasi Belanja
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp328.484.513.140	Rp311.525.427.036,55
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp40.782.750.000	Rp30.892.692.220
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaaya Kesehatan Masyarakat	Rp201.432.553.015	Rp189.226.643.560
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp7.500.173.850	Rp6.007.957.213
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp719.595.000	Rp686.088.420
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Rp1.476.324.743	Rp1.438.380.961
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	509.511.000	468.558.706
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	50.000.000	49.233.320
		Program Penyelenggaraan Jalan	199.628.253.651	192.507.508.712

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Belanja	Realiasai Belanja
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.102.827.903	1.051.313.671
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	34.990.000	11.139.500
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	10.840.010.000	2.405.593.279
		Program Pengembangan Perumahan	1.200.000	1.199.450.540
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.785.806.975	24.632.337.577
		Program Pengelolaan danb Pengembangan Sistem Air Limbah	6.664.821.000	6.523.764.783
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.310.079.096	7.759.217.239
		Program Penataan Bangunan Gedung	70.795.928.150	68.690.996.850
		Program Penataa Bangunan dan Lingkunganya	1.639.781.264	1.635.937.034

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Belanja	Realisasi Belanja
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	434.358.000	295.061.396
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program pengembangan Perumahan	373.478.827	300.569.833
		Program Kawasan	19.237.015.451	864.486.848
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	10.296.197.824	9.245.574.944
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	950.003.583	924.434.035
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.459.417.200	7.371.623.084
		Program Penanggulangan Bencana	2.003.756.485	1.521.068.708
6.	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	2.924.004.000	2.844.121.135
		Program Rehabilitasi Sosial	6.578.000	6.069.351.019
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	15.699.863.955	9.235.595.023
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	536.953.800	408.679.950
		Persebtase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	249.999.200	182.053.702

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gresik tahun 2022 adalah sebesar 9,75 tahun, sementara angka Harapan Lama Sekolah 13,96 tahun. Dalam hal ini, ada kesenjangan antara rata-rata lama sekolah, maka yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, antara lain :

1. Dari sisi siswa, mencegah putus sekolah dan mendorong masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan, mengintensifkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat;
2. Dari sisi guru, meningkatkan kuantitas dan kualitas guru guna keberlanjutan proses dan peningkatan kualitas pendidikan; dan
3. Dari sisi sarana/prasarana pendidikan, melengkapi dan membangun sarana/prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Mengacu pada permasalahan secara umum di Jawa Timur terkait urusan kesehatan masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan Penanganan Stunting.

Dalam rangka upaya menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (angka Kematian Bayi) perlu pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader dalam rangka penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (angka Kematian Bayi), melahirkan dan nifas untuk diketahui pada Tahun 2022. Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 94,18 per 100.000 KH dan Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) 4,34 per 100.000 KH.

Dalam rangka upaya pemerintah untuk menurunkan pravelensi stunting, pada tahun 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 Balita Stunting sebagaimana data resmi SSGI menunjukkan angka 23%, namun pada tahun 2022 Kabupaten Gresik berhasil menurunkan ke angka 10,70%. Angka ini jauh jika dibandingkan dengan Stunting di Provinsi Jawa Timur dengan angka 19,20% dan Indonesia 21,60%.

Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu upaya evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan program dan kegiatan ditahun selanjutnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Gresik yang menjadi isu strategis adalah sebagaimana berikut:

1. Infrastruktur Jalan.

Kondisi Jalan lingkungan di Kabupaten Gresik sudah cukup baik, berbeda dengan Jalan raya poros utama di Kabupaten Gresik yang kondisinya masih memprihatinkan baik itu yang berstatus jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Potret jalan yang kondisinya memprihatinkan terdapat di Kecamatan Driyorejo. Tidak sedikit rusaknya jalan raya di titik tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat. Langkah awal yang perlu dilakukan terkait perbaikan infrastruktur jalan ini adalah dengan memetakan kondisi jalan dalam empat kategori yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Dengan dipetakannya kondisi jalan maka akan lebih tepat dalam menentukan lokasi strategis untuk perbaikan jalan sehingga dapat teratasi dengan baik dan tuntas.

2. Penanganan Banjir.

Di Kabupaten Gresik pada setiap musim hujan selalu mengalami banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Sudah menjadi bencana rutin yang terjadi di sebagian teritori kabupaten dengan luas wilayah sekitar 1.191,25 km² ini. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi manusia serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Wilayah kecamatan Benjeng, Balongpanggang dan Cerme menjadi 3 titik terparah pada setiap tahunnya, karena terletak tidak jauh dari aliran anak sungai Bengawan Solo, yaitu Kali Lamong. Beberapa permasalahan dalam mengatasi banjir antara lain:

- a. Belum tuntasnya upaya pengurangan wilayah genangan banjir, sementara itu muncul wilayah genangan baru.
- b. Belum optimalnya penataan wilayah Kabupaten dalam membangun lahan-lahan serapan air.
- c. Belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana pematusan.
- d. Semakin meningkatnya kerusakan jalan akibat banjir.

3. Kemiskinan Ekstrem.

Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Gresik tahun 2022 sebesar 2.74% masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur (1.80%) dan Nasional (2.04%). Penanggulangan kemiskinan belum menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten, program penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara terfokus, berkesinambungan dan terukur. Selain itu kurangnya sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) serta hilangnya variabel pendukung seperti tingkat kesejahteraan sosial pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga penentuan penerima bantuan sosial menjadi kurang valid dan salah sasaran. Kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha dan kerja untuk menghapus kemiskinanekestrem. Perbaikan data adalah kunci utama dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim pada Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan oleh dan untuk masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspirasi dan segala kepentingan daerah

yang tumbuh dari masyarakat harus diarahkan untuk menjaga keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam upaya menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Visi dan Misi yang dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

1.1. Misi

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

1) Pendidikan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 6 Program 16 kegiatan dan 77 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.030.998.567.356,00 yang terealisasi sebesar Rp993.929.098.739,51 atau 96,40%.

2) Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Ibnu Sina melalui 5 program 15 kegiatan dan 83 Sub Kegiatan dengan alokasi Anggaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp758.428.652.559,00 yang terealisasi sebesar Rp710.547.619.528 atau 93,69% tidak terserap sebesar Rp47.881.033.033,90.

3) Pekerjaan Umum dan tata Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Dinas Cipta Karya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 10 program 24 kegiatan dan 83 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebagai berikut:

- a) Alokasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp264.045.832.872 yang terealisasi sebesar Rp243.040.323.624 atau 92,04% tidak terserap sebesar Rp21.005.509.248.
- b) Alokasi Anggaran pada Dinas Cipta Karya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp162.201.589.255,00 yang terealisasi sebesar Rp155.441.958.809,48 atau 95,83% tidak terserap sebesar Rp 6.759.630.445,52

4) Perumahan Rakyat dan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 4 program 16 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp... yang terealisasi sebesar Rp... atau ...% tidak terserap sebesar Rp...

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan melalui 4 program 17 kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebagai berikut :

- a) Alokasi Anggaran pada Dinas Polisi Pamong Praja sebesar Rp26.874.136.986,00 yang terealisasi sebesar Rp26.536.644.089,54 atau 98,74% tidak terserap sebesar Rp337.492.896,46;
- b) Alokasi Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.924.757.811,00 yang terealisasi sebesar Rp6.236.520.890,55 atau 90,06% tidak terserap sebesar Rp688.236.920,45;
- c) Alokasi Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sebesar Rp10.650.671.646,00 yang terealisasi sebesar Rp9.532.301.422,57 atau 89,50% tidak terserap sebesar Rp1.118.370.223,43;
- d) Penyelenggaraan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 6 program 14 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp31.769.993.294,00 yang terealisasi sebesar Rp24.233.411.237,01 atau 76,28% tidak terserap sebesar Rp7.536.582.056,9.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (Latar belakang)

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan

dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Gresik juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM

yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

b. Dasar Penerapan SPM

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

c. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang

menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan kunci dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/ terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:

- a) Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b) Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arah ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah kabupaten dengan seluruh PD, dan pemerintahan desa.
- c) Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d) Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

d. Kebijakan Penerapan Spm

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

a) Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

- ii. Target Pencapaian SPM oleh DaerahTarget pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	2024
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2024

3	Pendidikan AnakUsia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2024
---	--------------------------	--	------	------

- b) Bidang Urusan Kesehatan
- Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.
- i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2024
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	2024

c) Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2024

d) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2024

e) Bidang Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentangperubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di

Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yangJenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	2024
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	2024

- f) Bidang Urusan Sosial
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
2	Rehabilitasi sosial dasaranak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2024
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	2024

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Capaian tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yang selaras dengan Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah dirinci menjadi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah secara makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

TABEL 2.1

Capaian Indikator Kinerja IPM Kabupaten Gresik

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	4,62	78,93	0,95
2.	Tingkat Kemiskinan	10,96	10,32	0,64
3.	Angka Pengangguran	6,82	6,45	0,37
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,620	4,790	0,170
5.	Pendapatan Perkapita	130,386.300	102,622.770	2,776.350
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,330	0,322	0,008



2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data strategis yang menjadi salah satu ukuran kinerja Pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan mudah. IPM dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik dilakukan untuk melihat sejauh mana pembangunan kualitas hidup manusia di wilayah Kabupaten Gresik yang dilakukan selama tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 berada pada level 77,98 Persen dan Pada Tahun 2024 sebesar 78,93 persen Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ini disebabkan adanya peningkatan di ketiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan dimensi standart layak yang diukur

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.



Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami Penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Angka Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berada pada level 10,96 persen dan pada tahun 2024 sebesar 10,32 persen. Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan karena di Tahun 2024 kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik yang mulai menggeliat setelah pandemic covid-19 dan beragamnya program bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Gresik.

2.1.3 Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kabupaten Gresik sebagai wilayah yang mempunyai banyak industri tentunya memberikan peran dalam menyerap tenaga kerja. Penurunan angka pengangguran.

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Angka pengangguran Kabupaten Gresik mengalami Penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Angka Pengangguran Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 level 6,82 persen dan pada Tahun 2024 sebesar 6,45 persen. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 adanya penurunan pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik yang berarti menurunnya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mampu menggambarkan proses perkembangan dan perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja dan



pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi daerah umumnya berupa angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu daerah.

PDB dan PDRB disusun menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha yang merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas pelbagai aktivitas produksi; dan pendekatan sisi pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan nilai tambah bruto. PDB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana seluruh agregat yang dinilai menggunakan harga pada tahun berjalan; dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang penilaiannya didasarkan pada harga tahun dasar tertentu. Indikator pertumbuhan ekonomi daerah umumnya berupa angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 berada pada level 4,62 persen dan pada tahun 2024 sebesar 4,790 persen. Kenaikan kondisi perekonomian ini disebabkan karena berhasilnya upaya Pemerintah dalam pengendalian pandemic Covid-19. Konsumsi Pemerintah terus memegang peranan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemic. Alhasil, upaya ini dapat mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.



2.1.5 Pendapatan Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Makin tinggi pendapatan per kapita berarti makin menuju kemakmuran. Kabupaten Gresik merupakan daerah yang mengandalkan sektor industri dan perdagangan dalam pembentukan PDRBnya. Pendapatan per kapita Kabupaten Gresik pada tahun 2023 mencapai 130,386.300, pada Tahun 2024 mencapai 102,622.770.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Untuk melihat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Ratio Gini) bisa dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi nilai indeksnya berarti bahwa pengeluaran diantara penduduk miskin semakin timpang. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan terjadinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,008 dibandingkan dengan Tahun 2023. Dari yang sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar 0.330 menjadi 0,322 pada Tahun 2024.



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan pemerintahan atau Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Kabupaten/kota melalui Kepada Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Selain Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan juga ada juga Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan Fungsi Penunjang urusan penunjang.

2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib adalah merupakan bagian urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib *yang berkaitan* dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik meliputi:

- a. Urusan pendidikan;
- b. Urusan kesehatan;
- c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. Urusan sosial.

Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

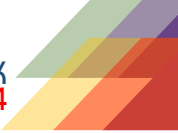
NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Ibnu Sina
3	Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
4	Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Urusan Sosial	Dinas Sosial

Ringkasan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Gresik untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disampaikan secara rinci sebagai berikut:

- a. Urusan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala katagori Sangat Baik. Adapun Capaian Indikator Kinerja Output Urusan Wajib Pendidikan sebagaimana berikut :

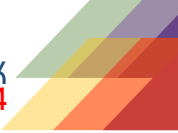
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	104,59%	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	107,44%	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,02%	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	45,35%	Dinas Pendidikan	

Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD pada tahun 2023 sebesar 101,44 % sedangkan pada tahun 2024 sebesar 104,59%. Terjadi peningkatan capaian pada Tahun 2024 Untuk Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar pada tahun 2023 sebesar 105,75%.

Untuk Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar sebesar Pada Tahun 2023 98,364 terjadi Penurunan Pada Tahun 2024 sebesar 95,24 % Untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada Tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2024 turun sebesar 45,35% hal ini setelah Muncul setelah ada Aplikasi Dapodik yang terpusat sehingga bias terpotret.

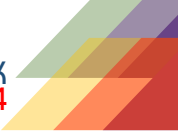


b. Urusan Wajib Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan RSUD Ibnu sina dengan rincian:

Capaian indikator kinerja urusan kesehatan pada tahun 2024 dengan Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,15%	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	95,24%	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standard	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang	104,34%	Dinas Kesehatan	

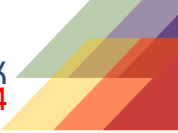


No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard			
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	104,60%	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	104,35%	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100%	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standard	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100%	Dinas Kesehatan	

Bahwa Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan pada Tahun 2023 1,49% sedangkan Pada Tahun 2024 daya Tampung Rumah Sakit 0,15% hal ini karena berkurangnya Rumah Sakit Cadangan saat terjadi Pandemi Covid-19, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi Pada Tahun sebesar 2023 100% dan pada Tahun 2024 sebesar 95,24%,

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 100% pada Tahun 2024. dengan Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 16.166, dibandingkan dengan Jumlah ibu hamil Kabupaten Gresik 16.166,, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 %, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 16.687, %, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% dengan Jumlah bayi baru lahir 16,686%, Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100%, 7 dengan Jumlah 71,151% Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 95,05942 %, Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 104,6017% Pada Tahun 2024 sedangkan Pada Tahun 2023 100%



terjadi kenaikan, Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 104.3454 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

c. Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang

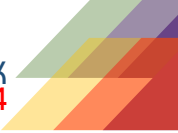
Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2024 dengan sasaran “Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Pekerjaan Uum & Tata Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	56,19%	Dinas PUTR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0%		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76,03%	Dinas PUTR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	86,41%	DCKPKP	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,50%	DCKPKP	
		Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100%	DPMPTS P	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	70,75%	Dinas PUTR	
		Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DCKPKP	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	100%	DCKPKP	

Bahwa Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota Capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas didukung dengan Capaian 56,19%, Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh



infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota dengan Capaian 0% hal tersebut merupakan kewenangan Provinsi Jawa Timur, Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan Capaian 76,03 %, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dengan 86,4150%, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 92,5032%, Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten IMB dengan Capaian 100%, Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota dengan capaian 70,7453%, Rasio tenaga operator/ teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian 100 % dan Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan capaian 100%.

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2024 dengan sasaran “Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni” Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100,00	DCKPKP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	100%	DCKKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kabupaten yang ditangani			
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0%	DCKPKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	88,68%	DCKPKP	

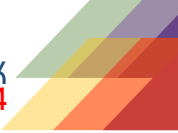
Bahwa Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten dengan Capaian 100% , Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten dengan Capaian 0 % hal ini dikarenakan Pada Tahun 2024 tidak ada Program Relokasi Pemerintah kabupaten Gresik, Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kabupaten yang ditangani dengan capaian 88.68 %, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan capaian 2,0609 %, dan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan capaian 32,0368%.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

No	Urusan Pmerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana	100,00	DISDAMKAR LA	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13 Menit	DISDAMKAR LA	

Bahwa tahun 2024 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terkait Indikator Kinerja Kunci Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan Capaian 100%, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan Capaian 100%, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%, Persentase pelayanan penyelematan dan



evakuasi korban bencana dengan Capaian 100%, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dengan Capaian 100%

f. Urusan Wajib Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Capaian indikator kinerja urusan sosial pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintah an	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOS	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	DINSOS	

Dari data Dinas Sosial Tahun 2024 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) dengan Capaian 100% dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan Capaian 100%.

2.2.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang *tidak berkaitan* dengan pelayanan dasar ada 18 urusan meliputi :

a.	Tenaga kerja;	j.	komunikasi dan informatika;
b.	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	k.	koperasi, usaha kecil, dan menengah;
c.	pangan;	l.	penanaman modal;
d.	pertanahan;	m.	kepemudaan dan olah raga;
e.	lingkungan hidup;	n.	statistik;
f.	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	o.	persandian;
g.	pemberdayaan masyarakat dan Desa;	p.	kebudayaan;
h.	pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	q.	perpustakaan
i.	perhubungan;	r.	kearsipan

Urusan Wajib Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, ada beberapa OPD yang menangani lebih dari 1 urusan wajib, adapun rincian OPD yang menangani urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut:

NO	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
1	Urusan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Urusan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3	Urusan Pangan	Dinas Pertanian
4	Urusan Pertanahan	Dinas Pertanahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
6	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

NO	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
8	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
9	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan
10	Urusan Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi & Informatika
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian
12	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP
13	Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan & Olah Raga
14	Urusan Statistik	Dinas Komunikasi & Informatika
15	Urusan Persandian	Dinas Komunikasi & Informatika
16	Urusan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
18	Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Ringkasan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disampaikan secara rinci sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja pada tahun 2022 dengan sasaran “Menurunnya tingkat pengangguran” Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	100%	DISNAKER	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	96,68%	DISNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	166,673,076.0363		
		Perusahaan yang menerapkan tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah ,dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	92,02%	DISNAKER	
		Tenaga kerja yang di tempatkan (Dalam & Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten / Kota	13,52%	DISNAKER	

Bahwa Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja dengan Capaian 100 %, Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi 96,68% %, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 166,673,076.0363, Perusahaan yang menerapkan tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah ,dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) 92,02% % dan Tenaga kerja yang di tempatkan (Dalam & Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten / Kota sebanyak 13,52%

b. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Capaian indikator kinerja

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2024
Sebagaimana berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggaran Reponsif Gender pada belanja Langsung APBD	30,72%	Dinas KBPPA	
		Persentase anak korban yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100%	Dinas KBPPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	25,46%	Dinas KBPPPA	

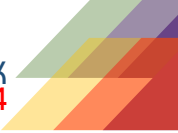
Bahwa Anggaran Reponsif Gender pada belanja Langsung APBD 30,7173 %, Persentase anak korban yang ditangani instansi terkait Kabupaten 100 % dan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100,000 Penduduk 25,46%.

c. Urusan Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Wajib Pangan	Persentase Ketersediaan pangan Kabupaten	92,47%	Dinas Pertanian	

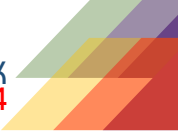
Rasio ketersediaan pangan utama di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai 92,4702 %. Capaian ini didapat dari jumlah cadangan pangan kabupaten Gresik sebesar 17.426 tahun 2024 sedangkan jumlah kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 18.845.



d. Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan dilaksanakan oleh dinas pertanahan Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2024 sebagaimana berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Wajib Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas PUTR	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	50%	Dinas PUTR	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	DPMPTSP	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	Dinas PUTR	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	Dinas PUTR	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kerja	Sumber Data	Ket
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Dinas PUTR	

Bahwa Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dengan capaian 100 %, Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum dengan Capaian 50 %, Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal dengan Capaian 100%, Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Bahwa Di Kabupaten Gresik tidak Tersedianya Obyek Landreform, dan Tidak tersedianya Tanah untuk masyarakat serta ada 1 kasus sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi Pada Tahun 2024.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Lingkungan Hidup	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60,12%	DLH	
		Terlaksannya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	77,21%	DLH	
		Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan	5,81%	DLH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota			

Bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mencapai 60,12% dengan Capaian Indeks Kualitas Pencemaran Air 50, Indeks Kualitas Pencemaran Udara 82,94 dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 35,30, Terlaksannya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Capaian 77,21%, dan Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan capaian 5,81%

f. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2024 sebagaimana berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	100%	Disdukcapil	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	73,79%	Disdukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	99,18%	Disdukcapil	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	21,74%	Disdukcapil	



Bahwa Perekaman KTP Elektronik Tahun 2024 mencapai 100% dengan 996,332 dibagi Jumlah Penduduk wajib KTP-el 996,332, Persentase anak usai 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan Capaian 73,79%, Kepemilikan Akta Kelahiran dengan Capaian 99,18% dan Jumlah Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama mencapai 21,7391 .

g. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indicator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DPMD	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	DPMD	

Bahwa pada Tahun 2024 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memenuhi target Indikator Kinerja Kunci Persentase pengentasan desa tertinggal pada Tahun 2024 mencapai 100% dan Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri mencapai 100%

h. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2024 Sebagaimana berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mengukur Angka Kelahiran Total (TFR)	1,92%	Dinas KBPPPA	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,56%	Dinas KBPPPA	
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,18%	Dinas KBPPPA	

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu daerah dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Di Kabupaten Gresik angka TFR sendiri sebesar 1,92% anak per wanita.

Tingkat capaian pemakaian Kontrasepsi Modern di Kabupaten sebesar 67,5601 % sehingga cukup signifikan dalam upaya mendukung program keluarga berencana. Di Kabupaten Gresik sendiri Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) 9,1842%

i. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Capaian indikator kinerja urusan perhubungan pada tahun 2022 dengan sasaran "Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu" Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indicator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Wajib Perhubungan	Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Sungai, Danau dan Penyebrangan di Wilayah Kewenangan Kabupaten/Kota	0,97%	Dishub	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,39%	Dishub	

Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Sungai, Danau dan Penyebrangan di Wilayah Kewenangan Kabupaten Gresik dengan Capaian Kinerja 0,97% dan V/C Adalah rasio dari arus dan kapasitas. V/C mungkin terbaru atau rancangan rata-rata dari arus pada kelompok tertentu pada puncak 15 menit ditentukan dengan kapasitas dari jalurnya. Rasio V/C adalah ukuran untuk perpindahan subject. Rendahnya rasio V/C berarti arus sedang lengang. V/C yang tinggi menunjukkan kepadatan yang tinggi. sebenarnya rasio V/C dihitung dari data jumlah kendaraan (diartikan volume) dan geometri dari jalan raya (perkiraan kapasitas). Rasio V/C digunakan untuk mengatasi masalah wilayah pada jalan dan membuat jalan keluar operasional pada jalan tersebut. Pada kasus yang sama, rasio V/C digunakan untuk penegasan. Pada Tahun 2024 V/C Kabupaten Gresik sebesar 0.3992 %

j. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2023 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100%	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Komunikasi dan Informatika	yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	96,77%		
		Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	475,73 %		

Bahwa Presentase pada tahun 2024 Komunikasi dan Informatika dengan Capaian Indikator Kinerja Kunci Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan Capaian 100%, Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan Capaian 100% dan Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten dengan Capaian 475,73%.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian Capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	30,55%	Diskoperindag	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	97,75%	Diskoperindag	

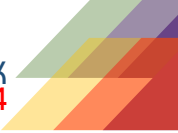
Koperasi berkualitas merupakan koperasi yang bisa meningkatkan kualitasnya berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Volume Usaha dan Pencatatan Aset di Kabupaten Gresik Tahun 2024 Koperasi yang berkualitas sebesar 249 Koperasi di banding jumlah seluruh Koperasi di Kabupaten Gresik sampai Tahun 2024 sebesar 815 Koperasi.

1. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Penanaman Modal	Persentase peningkatan Investasi di kabupaten / kota	-24,7545%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik mengalami penurunan pada Tahun 2024 dengan total investasi akumulatif mencapai -247547%.



m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga Capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

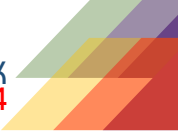
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,55%	Disparekraf budpora	
		Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	24,57%	Disparekraf budpora	
		3.Peningkatan Prestasi Olahraga	69	Disparekraf budpora	

Bahwa Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 dengan indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan Capaian Kinerja 5,55%, Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial dengan Capaian 24,57% Prestasi Atlit Kabupaten Gresik selama tahun 2024 yang memperoleh sebanyak 69 mendali di kejuaraan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional

n. Urusan Statistik

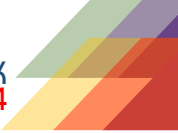
Penyelenggaraan urusan statistik dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan Capaian indikator kinerja urusan statistik pada tahun 2024 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Statistik	Persentase Perangkat Daerah	100%	Diskominfo	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		(PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Diskominfo	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Diskominfo	

Di Kabupaten Gresik sampai tahun 2024 Perangkat Daerah yang telah menggunakan Data Statistik dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebanyak 46 Perangkat Daerah artinya semua Perangkat Daerah sudah seluruhnya menggunakan Data Statistik dalam perencanaan Pembangunan, Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan Capaian 100% dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.



o. Urusan Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika. Capaian indikator kinerja urusan persandian pada tahun 2024 sebagaimana berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintahan	77,83%	Diskominfo	

Bahwa Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan Capaian Kinerja 77,83% dengan membandingkan Jumlah Nilai Keamanan Informasi 502% dibagi Jumlah area penilaian.

p. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan. Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan pada tahun Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Disparekras budpora	

Ada sebanyak 42 agar budaya yang terdata dan di lestarikan di Kabupaten pada tahun 2024 sehingga tingkat pelestarian cagar budaya sebesar 100%.

q. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengukuran kinerja pada urusan perpustakaan terintegrasi dengan sasaran pada urusan kependudukan dan catatan sipil pada Tahun 2024 dengan sasaran "Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan



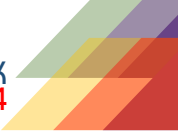
pelayanan publik”. Berikut merupakan capaian sasaran urusan perpustakaan yang dapat dilihat melalui indikator sasaran nilai survey kepuasan masyarakat :

No	Urusan Pemerintahan	Indicator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67,51%	Disperpussip	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	44,46	Disperpussip	

Bahwa Urusan Perpustakaan Tahun 2024 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan Capaian 67,51% dinilai dengan membandingkan Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survey/kajian kegemaran membaca masyarakat dimana dengan Capaian 67,51% merupakan katagori (sedang) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota Urusan Kearsipan dengan Capaian 44,46%

r. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Dilaksanakan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan capaian sasaran urusan kearsipan sebagaimana berikut :

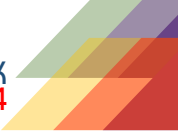


No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	33,49 %	Disperpussip	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	Disperpussip	

Bahwa Urusan Kearsipan Tahun 2024 dengan Indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan Capaian 33,49% dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan Capaian 100%.

2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan dalam urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dilaksanakan kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, ada sebanyak 6 (enam) urusan pilihan antara lain urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Urusan Pilihan tidak semua daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan urusan pilihan tersebut sehingga kabupaten Gresik tidak melakukan urusan transmigrasi, karena hal ini



didasarkan kepada potensi atau sumber daya yang pada suatu daerah. Urusan pilihan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	URUSAN PILIHAN	NAMA OPD
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
2.	Urusan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian
4.	Urusan ESDM	-
5.	Urusan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6.	Urusan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Urusan Transmigrasi	-

Ringkasan pelaksanaan urusan Pilihan disampaikan secara rinci sebagai berikut:

a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas perikanan Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2023 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	101,06%	Dinas Perikanan	



Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Di Kabupaten Gresik Total Produksi Perikanan dari sebesar 164.866 ton /tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 total produksi perikanan sebesar 169.519 ton dibandingkan dengan Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan) 167,745 dengan Capaian 101,0576%.

b. Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga Capaian indikator kinerja urusan pariwisata pada tahun 2023 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2,04%	Dispare krafbud pora	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	8,90%	Dispare krafbud pora	
		Tingkat Hunian Akomodasi	60,07 %	Dispare krafbud pora	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,44%	Dispare krafbud pora	

Tragedi Bencana Alam di Bawean pada bulan Maret 2024 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten



Gresik. Tidak main-main, sejak bulan Maret 2024 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang sangat drastis. Di Kabupaten Gresik sendiri pada tahun 2024 jumlah wisatawan yang masuk di Kabupaten Gresik baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara mengalami penurunan. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 18.655 dengan pengukuran Indikator Jumlah Wisatawan Tahun 2024- Jumlah Wisatawan Tahun 2023 sebesar 18.281 Untuk Wisatawan Nusantara yang masuk ke Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 sebesar 8,90%, Tingkat Hunian Akomodasi 60,07 dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang berlaku 1,44%.

c. Urusan Pilihan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Capaian indikator kinerja urusan pertanian pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indicator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	615,92%	Dinas Pertanian	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	170,35%	Dinas Pertanian	

Produktivitas pertanian merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Di Kabupaten Gresik Tingkat Produktivitas Pertanian sebesar 615,9157% yang diperoleh dari produktivitas pertanian per hektar sebesar 633.477,36 ton/hektar dibandingkan dengan luas panen sebesar 102.846,43 hektar, Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Pada Tahun 2024 yang diperoleh dari Jumlah Kejadian penyakit/kasus Tahun 2024-Jumlah Kejadian Kasus Penyakit hewan menular Tahun 2023 sebesar 4,915 dibagi

Jumlah Kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2023 sebesar 1,818 sehingga total Capaian Indikator Kinerja Kunci sebesar 170,3520%

d. Urusan Kehutanan Kabupaten Kota

Pelaksanaan Urusan Kehutanan sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Gresik No.78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, bahwa Urusan Kehutanan bukan menjadi bagian dari Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dan sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa timur. Sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tidak dapat memenuhi data indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan adapun Capaian indikator kinerja urusan pertanian pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kehutanan	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota			

e. Urusan Pilihan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Capaian indikator kinerja tahun 2024 dalam hal perdagangan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pedagangan	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	81,27%	Dinas Pertanian	

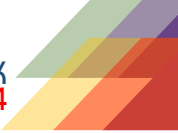
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	158,00,%	Diskoperi ndag	

Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/ SIUP Toko Swalayan) mencapai 100%, sedangkan Capaian Persentase Kinerja Realisasi Pupuk mencapai 81,2712 % dan Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku mencapai 157,9973%, Data Dukung Indikator Kinerja Kunci tersebut didukung dengan Capain Indikator Kinerja Kunci Output sebagai berikut :

f. Urusan Pilihan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1,1450	Doikope rindag	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK	69,72%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	100%		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada		

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota mencapai 1,1450%, Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) di Kabupaten Gresik

untuk di Tahun 2024 dengan Capaian 69,7249%, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait mencapai 100 %, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait mencapai 100% dan Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100% serta Tersedia informasi industri secara lengkap dan terkini.

g. Urusan Transmigrasi

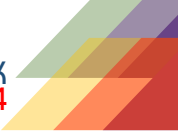
Penyelenggaraan urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Transmigrasi	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota			

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Tidak mengamanatkan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan Transmigrasi

2.2.2 Penunjang Urusan Pemerintahan

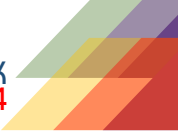
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur penunjang Pemerintahan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan konkuren.



Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Organisasi Perangkat Daerah tersebut melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah sebagai berikut :

NO.	URUSAN PENUNJANG	NAMA OPD PELAKSANA
1	Inspektorat	Inspektorat
2	Urusan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah
3	Urusan Keuangan	Badan Pendapatran, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
4	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan & Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
5	Urusan Penelitian & Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan
6	Sekretariat	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD
7	Kecamatan	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
		Kecamatan Bungah
		Kecamatan Sidayu
		Kecamatan Ujung Pangkah
		Kecamatan Panceng

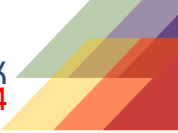


NO.	URUSAN PENUNJANG	NAMA OPD PELAKSANA
		Kecamatan Dukun
		Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduk Sampeyan
		Kecamatan Menganti
		Kecamatan Balong Panggang
		Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Kedamean
		Kecamatan Wringin anom
		Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Tambak
		Kecamatan Sangkapura

a. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Keuangan) Kabupaten

Penyelenggaraan urusan pemerintahan (Perencanaan Keuangan Kabupaten) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Capaian indikator kinerja urusan Pemerintah pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
Perencanaan Uang	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,11%	BPPKA D	
	Rasio PAD	37,12%		
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3		



Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	56,69%		
	Opini Laporan Keuangan	9 WTP		

Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan adapun Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Rp336,966,927,847 sedangkan Jumlah Anggaran Pendapatan Asli Daerah Rp. 3,697,576,887,477.23 sehingga Capaian Kinerja 9,1132%, Rasio Pendapatan Asli Daerah Jumlah PAD Rp. 1,385,026,487,100.76 dan Jumlah Pendapatan Pada APBD mencapai 3,730,417,815,425.76 sehingga Capaian Kinerja 37,1279%, Maturasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Kabupaten Gresik pada Level 3, Nilai SPIP yang masih rendah dan perlu ditingkatkan terdapat pada unsur Lingkungan Pengendalian dengan Skor komponen SPIP 3,343, MR 2,955 dan IEPK 2,258. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki Skor Kapabilitas Level 3 dengan Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Skor 0,540, Praktik Profesional 0,540, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 0,225, Budaya dan Hubungan Organisasi 0,180 dan Struktur Tata Kelola 0,400 serta Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan Peran layanan 1,200 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) Jumlah belanja Urusan pemerintahan - transfer expenditures Rp. 2,096,242,365,214.51 dan Jumlah APBD Rp. 3,697,576,887,477.23 adapun Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 mencapai 56,6923%. Opini Laporan



Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir Tahun 2014 hingga Tahun 2014 Status WDP dan mulai Tahun 2015 hingga 2024 Status Kabupaten Gresik Wajar Tanpa Pengecualian

b. Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan Capaian indikator Penunjang Urusan Pemerintahan pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	BLP	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	50,56%	BLP	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	49,35%	BLP	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-29,63%	BLP	

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama Tahun 2024 Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani kuartal pertama tahun 2024 0 dan Jumlah Kontrak keseluruhan tahun 2024 184 sehingga capaian kinerja 0, Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif meliputi Jumlah pengadaan dengan metode kompetitif sebanyak 2,846 Pengadaan dibandingkan Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 5,628 sehingga capain kinerja pada tahun 2024 mencapai



50.5686%, Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan Rp. 1,824,664,869,416.80 dibandingkan Jumlah total belanja operasional dan modal Rp. 3,697,576,887,477.23 sehingga capaian Kinerja Pada Tahun 2023 49,3476%. serta Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) Rp291.714.176.411 dibandingkan Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) Rp. 414,571,964,246,00 sehingga Capaian Indikator pada Tahun 2024 -29.6349 %.

c. Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan (kepegawaian) Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Capaian indikator Penunjang Urusan Pemerintahan pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

No	Fungsi Penghujung	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	67,07%	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,72%		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35,22%		



Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 1,654 dibagi dengan Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2,466 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai 67,0722%, Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 511 dibandingkan Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2.466 sehingga capaian indikator pada Tahun 2023 yakni 20,7218% , Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi 180 dibandingkan Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 511 sehingga indikator pada Tahun 2024 yakni 35,2250%

d. Penunjang Urusan Pemerintah (Manajemen Keuangan)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan (manajemen Keuangan) Kabupaetn dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Capaian indikator kinerja urusan Pemerintah pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

No	Fungsi Penghujung	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kepegawaian	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	-4.88%	BPPKAD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	- 13.13%	BPPKAD	
		Assets Management	4	BPPKAD	



No	Fungsi Penghujung	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	2,6054	BPPKAD	

Bahwa Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal) dengan acuan data Realisasi Belanja Nilai absolut dari Rp. 3,697,576,887,477.23 dibandingkan Total Belanja APBD (sebelum perubahan) Rp. 3,887,408,009,350 sehingga capaian indikator pada tahun 2024 yakni - 4,8832%, Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal) Total PAD dalam realisasi absholut dari 1,385,026,487,100.76 dibandingkan Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan) Rp. 1,594,370,914,605 sehingga capaian indikator pada tahun 2024 - 13,1302%, Assets Management Ada Aset tetap, menyusun daftar aset tetap, Proses Inventarisasi asset tahunan dan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya nilai Silpa Rp89,068,786,679 dibandingkan Total belanja anggaran tahun sebelumnya Rp. 3,418,637,234,689.96 sehingga Capaian Indikator pada Tahun 2024 yakni 2,6054%.

e. Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dengan Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 Sebagaimana berikut:

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	107,49	BPPKAD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83,33	DISKOMINF O	

Bahwa Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya) Rp3974.761.570.922 dibandingkan Realisasi Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya) Rp3967.575.974.929 sehingga Capaian Indikator Pada Tahun 2024 yakni 104%, sedangkan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah meliputi Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda 10 dibandingkan Total jumlah dokumen yang telah dirinci (11 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD 12 Dokumen S sehingga Capaian Indikator Pada Tahun 2022 yakni 83,33%.

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK (BAGIAN ORTALA)



PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA T.A.2024

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



(031)3952825-30



www.sekda.gresikkab.go.id

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban untuk Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Bupati dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% < 100%	sangat tinggi
2	76% < 90%	tinggi
3	66% < 75%	sedang
4	51% < 65%	rendah
5	< 50%	sangat rendah

SKALA PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- **Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- **Indikator Negatif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

RPJMD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

VISI :

“Mewujudkan Gresik Baru yang lebih mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah”

MISI :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif			
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	86.85
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.28
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	45.92
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota			
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.42
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.68
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	92.42
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah			
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.33
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5-6%

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
T.4	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	80.24
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	80
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	81.7
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	85
		Prevalensi Stunting	9-8.5
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9.7-10.96
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6.4
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	100%

Perjanjian Kinerja Bupati Gresik Tahun 2024 dan disusun sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

- Perjanjian Kinerja APBD ditetapkan tanggal 16 Januari 2024 dan;
- Perjanjian Kinerja PAPBD ditetapkan tanggal 31 Oktober 2024

Dalam pencapaian target kinerja yang diperjanjikan di perlukan anggaran sebesar Rp.3,974,761,570,922 meningkat sebanyak Rp.22.613.287.381 atau 0.57% dari anggaran tahun 2023 sebanyak Rp.3.952.148.283.541

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif						
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	86.85	85.94	98.95	SANGAT TINGGI
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.28	4.32	100.93%	SANGAT TINGGI
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	45.92	54.43	118.53%	SANGAT TINGGI
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota						
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.42	3.73	109.06%	SANGAT TINGGI
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90	89.71	99.68%	SANGAT TINGGI
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.68	60.12	99.08	SANGAT TINGGI
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	92.42	91.01	98.47%	SANGAT TINGGI
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah						
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5	4.79	95.80	SANGAT TINGGI
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.33	0.35	93.94%	belum rilis
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5-6%	1.63	29.64%	SANGAT RENDAH

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah						
T.4	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	80.24	78.93	98.37	SANGAT TINGGI
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	80	80.32	100.40	SANGAT TINGGI
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	81.7	82.41	100.87	SANGAT TINGGI
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	85	82.5	97.06	SANGAT TINGGI
		Prevalensi Stunting	9-8.5	8.14	106.97	SANGAT TINGGI
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik						
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9.7-10.96	10.32	100.10	SANGAT TINGGI
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6.4	6.45	99.22	SANGAT TINGGI
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	100%	118.96%	118.96	SANGAT TINGGI
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72	71.61	99.46	SANGAT TINGGI
	rata-rata capaian kinerja				98.18	SANGAT TINGGI

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan dan 13 indikator terdapat 12 indikator “SANGAT TINGGI” dan 1 Indikator “sangat rendah. akan tetapi Rata-rata Kinerja tahun 2024 sebesar 98.18% kategori “SANGAT TINGGI”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah berhasil menjalankan amanah yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	86.84	85.94	Penurunan kinerja (-0.9)
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,28	4.32	Peningkatan kinerja (+0.04)
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	45,92	54.43	Peningkatan kinerja (+8.51)
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota					
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.38	3.73	Peningkatan kinerja (+0.35)
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	89.62	89.71	Peningkatan kinerja (+0.09)
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,5	60.12	Peningkatan kinerja (+1.62)
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	90.78	91.01	Peningkatan kinerja (+0.23)
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	4.62	4.79	Peningkatan kinerja (+0.17)
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.35	0.35	blm rilis 2024
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3.2	1.63	Penurunan Kinerja (-1.57)

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.4	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	78,44	78.93	Peningkatan kinerja (+0.49)
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	79.16	80.32	Peningkatan kinerja (+1.16)
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	80.98	82.41	Peningkatan kinerja (+1.43)
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	82.2	82.5	Peningkatan kinerja (+0.3)
		Prevalensi Stunting	9.12	8.14	Peningkatan kinerja (+0.98)
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik					
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	10,96	10.32	Peningkatan kinerja (+0.64)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,82	6.45	Peningkatan kinerja (+0.37)
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	111,12	118.96%	Peningkatan kinerja (+7.84)
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.12	71.61	Peningkatan kinerja (+1.49)

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan seluruhnya mengalami peningkatan kecuali 1 indikator reformasi birokrasi mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan Nilai sementara RB Tematik Inflasi sebesar “0”.

Untuk indikator sasaran jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 dari 13 (tiga belas) terdapat 11 indikator mengalami peningkatan kinerja, 1 (satu) indikator indeks williamson belum dilakukan perhitungan oleh BPS. dan 1 (satu) indikator Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian mengalami penurunan dikarenakan Perekonomian Kabupaten Gresik masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 51,25

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	88,6	85.94	-
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,13	4.32	+
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	sangat inovatif (5,200)	inovatif 54.43	-
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota					
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3,72	3.73	+
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	7.6	89.71	+
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,18	60.12	-
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	93,64	91.01	-
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5,5	4.79	-
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.2-0.3	0.35	-
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5%-6%	1.63	-

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.4	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	81.12	78.93	-
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	74	80.32	+
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	83.6	82.41	-
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	73.3	82.5	+
		Prevalensi Stunting	7	8.14	-
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik					
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9-9.4	10.32	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.54	6.45	-
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>100%	118.96%	+
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78	71.61	-

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan terdapat 5 indikator belum melampaui target akhir tahun pembangunan jangka menengah 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. dan terdapat 1 (satu) indikator yang telah melampaui target akhir tahun yaitu indeks daya saing daerah.

Untuk indikator sasaran dari 13 (tiga belas) indikator terdapat 5 indikator yang melampaui target akhir tahun (2026) dan terdapat 8 indikator yang belum melampaui target (2026)

E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	80.56	85.94	Lebih tinggi (5.38) dari Prov. jatim
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.21	4.32	Lebih tinggi (1.11) dari rata-rata nilai kab/kota
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	87.23	54.43	Lebih rendah (32.8) dari Provinsi jatim
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota					
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.43	3.73	Lebih tinggi (0.3) dari Nasional
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	76.33	89.71	lebih tinggi (13.38) dari kab. Ngawi
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.24	60.12	Lebih rendah (11.12) dari Provinsi jatim
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	92.96	91.01	Lebih rendah (1.95) dari Provinsi jatim
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5.03	4.79	Lebih rendah (0.24) dari Nasional
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.632	0.35	Lebih tinggi (0.28) dari prov jawa tengah
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	0.67	1.63	Lebih tinggi (0.96) dari Nasional

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.4	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	75.35	78.93	Lebih tinggi (3.58) dari Prov. Jawa timur
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	76.47	80.32	Lebih tinggi (3.85) dari Nasional
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	66.61	82.41	Lebih tinggi (15.8) dari prov sulsel
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	-	82.5	belum tersedia data pembanding
		Prevalensi Stunting	21.5	8.14	Lebih tinggi (13.36) dari Nasional
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik					
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	12.16	10.32	Lebih tinggi (1.84) dari Kab. Lamongan
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6.49	6.45	Lebih tinggi (0.04) dari Kab. Sidoarjo
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	-	118.96	belum tersedia data pembanding
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68.37	71.61	Lebih tinggi (3.24) dari Kab. Sidoarjo

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan terdapat 5 (lima) indikator yang realisasinya lebih tinggi daripada realisasi nasional/provinsi Jawa Timur/Kab/Kota dan terdapat 1 (satu) indikator Pertumbuhan Ekonomi yang realisasinya lebih rendah 0.24 dari realisasi nasional.

Untuk indikator sasaran dari 13 indikator terdapat 8 indikator yang realisasinya lebih tinggi dari realisasi provinsi Jawa Timur / nasional/Kab/Kota. dan terdapat 3 indikator yang realisasinya lebih rendah dari provinsi Jawa Timur / nasional dan 2 (dua) indikator belum tersedia data pembandingan.

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif				
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	1.Upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi tidak berdampak secara signifikan 2.Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	1.Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur keberhasilan dari sasaran RB tematik 2.melakukan Perencanaan dan Penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di instansi 3.Melakukan Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.adanya kerangka kebijakan yang sangat kuat, perencanaan strategis yang matang, serta kualitas layanan berbasis elektronik yang optimal	1.Reviu Kebijakan SPBE 2.Perbaikan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 3.Perbaikan Peta Proses Bisnis 4.Penerapan Manajemen SPBE 5.Pelaksanaan Audit TIK 6.Pengembangan Layanan Elektronik
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	1.melakukan Penguatan Inovasi dan Mendorong pengembangan inovasi lokal dan daya saing teknologi	1.Membangun pusat inovasi daerah. 2.Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelaku industri. 3.Kompetisi inovasi daerah bagi pelaku usaha, mahasiswa, dan masyarakat. 4.Digitalisasi layanan publik. 5.Mengintegrasikan sistem layanan berbasis elektronik seperti SEPEKAN 6.penyelenggaraan Ginofest atau Gresik Inovasi Festival yaitu ajang pameran inovasi yang diadakan setiap tahun 7.penyelenggaraan kompetisi inovasi yang diikuti oleh Perangkat Daerah, dan Sekolah-sekolah.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	1. ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi 2. peningkatan pendidikan dan kompetensi tenaga kerja 3. keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil. 4. kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi	1. menetapkan aturan, baik yang bersifat tertulis (kebijakan) maupun tidak tertulis (norma perilaku), yang memengaruhi pelaku ekonomi agar dapat bertindak secara optimal. 2. memperluas pasar tenaga kerja 3. memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil 4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup bayi dalam kondisi sehat. dengan cara meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	1. Ketersediaan infrastruktur untuk ruang terbuka hijau khususnya untuk jalur pejalan kaki dan taman kota yang sangat memadai 2. ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang sangat memadai 3. ketersediaan jaringan irigasi yang cukup baik	1. peningkatan pembangunan bidang air bersih khususnya ketersediaan air baku, unit pengolahan air dan unit transmisi dan pelayanan 2. penataan kembali terkait perumahan dan permukiman khususnya pada aspek persampahan, sanitasi, drainase, listrik dan telekomunikasi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Menyelenggarakan Pengendalian terhadap Penurunan Kualitas LH 2. melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inovasi tersebut meliputi aspek sistem dan mekanisme kerja pelayanan maupun SDM pelayanan	1. Pembangunan TPST belahan rejo untuk menangani sampah wilayah gresik selatan 2. Pembangunan 10 stasiun pemantau kualitas udara ambien (SPKUA) real-time 3. pengiriman refuse derived fuel (RDF) hasil pengolahan sampah ke pabrik semen Indonesia 4. program kampung iklim 5. pembangunan 2 titik stasiun pemantau kualitas air real time (onlimo) 6. penanaman mangrove seluas 26.1 Ha dengan total 261.000 bibit. 7. memperluas ruang terbuka hijau 8. memperbanyak kampung zero waste
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	1. Kualitas pendidikan yang setara 2. Pemberdayaan ekonomi perempuan 3. Kesehatan dan kesejahteraan perempuan 4. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan 5. Pengurangan kesenjangan gender	1. Meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan. (seoper-sekolah perempuan) 2. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi. (program Bunda puspa) 3. Terdapat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta dilengkapi dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. 4. penyelenggaraan Musrenbang khusus perempuan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	1.Pertumbuhan Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. 2.pertumbuhan dari sisi pengeluaran, Konsumsi LNPRT sebesar 13,04 persen.	1.meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha bidang Pertambangan dan Penggalian 2.Kabupaten Gresik masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah lapangan usaha bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan memberikan berbagai bantuan atau subsidi pupuk untuk petani dan nelayan
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	1.pada 5 (lima) Kecamatan memiliki tiga aspek yaitu, keuntungan geografi (pusat pembangunan infrastruktur), pusat kawasan industri dan ketersediaan tenaga kerja terampil. 2.Sedangkan untuk wilayah di luar 5 (lima) Kecamatan tersebut dengan nilai ketimpangan rendah dikarenakan didominasi oleh penduduk yang berkerja pada sektor primer/ pertanian.	1.Mempercepat dan menginisiasi proses penganggaran berbasis kewilayahan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan, transportasi dan pertanian-perikanan 2.Pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan dapat mempercepat penurunan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Gresik 3.Mendorong koridor investasi Gresik dengan meningkatkan investasi-investasi baru di wilayah tertinggal pada Kabupaten Gresik
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	1.Hama 2.Perubahan iklim 3.Masalah infrastruktur 4.masalah pupuk 5.Harga komoditas pertanian yang fluktuatif 6.Keterbatasan teknologi dan inovasi 7.Tantangan ketenagakerjaan 8.Ketergantungan pada impor	1.Penanganan Hama 2.pembangunan infrastruktur penunjang pertanian 3.Pengawasan terkait distribusi pupuk 4.Monitoring Harga komoditas pertanian 5.pengembangan teknologi dan inovasi 6.Pembinaan SDM

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	1. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 mengalami peningkatan 2. harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada tahun 2024 meningkat 0,01 3. rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun	1. Pembangunan RSUD Gresik Sehati di wilayah Gresik Selatan 2. Pembangunan UPT SMP 34 Gresik
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	1. Meningkatkan Kualitas Hubungan Sosial 2. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial 4. Meningkatkan Kesadaran Sosial	1. kegiatan sosial. 2. keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi sosial. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesalehan sosial.
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	1. berdasarkan Data GTK 2024 Sem. Ganjil peningkatan Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan yang berkualifikasi D-IV/S1 semula 65.71% menjadi 81.43% 2. selain itu untuk Keberpihakan negara dalam pembiayaan dan menentukan regulasi dipengaruhi oleh peningkatan Anggaran pendidikan dari ketentuan minimal 20% (mandatory spending) jika dibandingkan dengan tahun 2023 3. berdasarkan Hasil SKM 2024 Sem. Ganjil Kepuasan Pelayanan Pendidikan 82.56 atau kategori "Baik"	1. Meningkatkan jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi D-IV / S1 2. meningkatkan akreditasi satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar memiliki akreditasi minimal c sebesar 97.69% 3. meningkatkan kemampuan literasi maupun numerasi

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2. Meningkatkan Akses Kesehatan 3. Meningkatkan Kemampuan Masyarakat 4. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan	1. pelatihan tenaga kesehatan dan peningkatan infrastruktur. 2. program layanan kesehatan gratis. 3. program pendidikan kesehatan kepada anak sekolah 4. Meningkatkan sumber daya kesehatan dengan investasi dalam teknologi dan infrastruktur. 5. pelayanan gizi kesehatan anak ibu dan balita 6. pemeriksaan kesehatan untuk usia produktif 7. pemeriksaan gigi dan mulut di lingkungan sekolah
		Prevalensi Stunting	1. Melakukan intervensi serentak pencegahan stunting yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kabupaten Gresik	1. memastikan pendataan seluruh catin, Ibu Hamil dan Balita yang ada di wilayah kerja untuk menjadi sasaran; 2. memastikan seluruh catin mendapat pendampingan serta memastikan kehadiran Ibu Hamil serta Balita datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); 3. memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu; 4. memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk Ibu Hamil dan Balita; 5. memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar; 6. memastikan intervensi pada Ibu Hamil dan Balita yang bermasalah gizi;

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. 2. Kualitas pendidikan yang baik dan merata. 3. Akses ke lapangan kerja yang luas dan merata. 4. Ketersediaan sumber daya, seperti infrastruktur dan teknologi.	1. pemanfaatan Intelligent Operational platform (IOP) untuk sinergitas antar opd pengampu program pengentasan kemiskinan agar tidak tumpang tindih 2. Program pembangunan rumah tidak layak huni 3. Program pemberian bantuan usaha untuk keluarga miskin 4. Program kejar paket gratis dan beasiswa bagi mahasiswa miskin 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Pelatihan Kerja bagi warga miskin
		Tingkat Pengangguran Terbuka	• Tingginya penyerapan tenaga kerja dibidang jasa dan manufaktur karena di pengaruhi oleh adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus dikabupaten Gresik	1. Pembangunan aplikasi AK1 untuk pelaporan mandiri perusahaan terkait penempatan tenaga kerja dan fasilitasi pencari kerja 2. penyelenggaraan job fair 3. program padat karya 4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Program Penempatan Tenaga Kerja 6. Program Pengembangan Ekspor 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulan gan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Gresik sejumlah 1,06 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 14,3 ribu penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja, dimana terjadi kenaikan angkatan kerja dari 739,01 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 764,97 ribu orang.	1. Pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri local 2. Kolaborasi dengan kawasan industri di Gresik. 3. Fokus pada sektor unggulan seperti manufaktur, petrokimia, dan agribisnis. 4. Peningkatan akses pendidikan vokasi. 5. Penyediaan beasiswa untuk pendidikan vokasi dan teknologi. 6. Workshop kewirausahaan untuk UMKM dan masyarakat lokal
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	- Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik - Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Bantuan Sosial Untuk Janda Miskin, Anak Yatim/piatu, Guru Ngaji, Marbot, Dan Penjaga Makam Di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024	- PKH Inklusi - Pemutakhiran data berkala penerima program jaminan kesehatan (UHC) - Kejar paket tuntaskan putus sekolah (JAKETKU) - beasiswa mahasiswa miskin

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya peningkatan investasi di Kabupaten Gresik sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian yang ada dan berdampak pada beberapa indikator yang lain seperti tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan dan tingkat kemiskinan yang juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

selain faktor investasi, komitmen pemerintah Kabupaten Gresik juga sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dibuktikan dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan strategis yang menunjang pencapaian kinerja seperti dilakukannya serta evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

G. ALOKASI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif						
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	19.36%	769,362,996,154.00	669,196,258,377.44	86.98
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	16.65%	661,927,474,121.00	570,115,569,426.16	86.13
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	2.70%	107,435,522,033.00	99,080,688,951.28	92.22
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota						
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	11.15%	443,090,561,544.17	407,032,783,780.30	91.86
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	10.06%	399,933,142,843.67	377,366,267,914.11	94.36
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0.24%	9,596,067,020.50	5,006,976,555.19	52.18
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	0.84%	33,561,351,680.00	24,659,539,311.00	73.48

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah						
T.3	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	0.68%	27,127,352,374	23,972,335,838.09	88.37
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.59%	23,373,619,734.67	21,768,908,535.65	93.13
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	0.09%	3,753,732,639	2,203,427,302	58.70
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah						
T.4	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	39.04%	1,551,682,399,021.00	1,471,239,533,342.10	94.82
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	0.03%	1,126,744,500.00	1,118,096,288.00	99.23
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	21.66%	860,927,107,442.00	827,944,337,193.00	96.17
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	17.22%	684,506,412,375.00	637,865,948,194.10	93.19
		Prevalensi Stunting	0.13%	5,122,134,704.00	4,311,151,667.00	84.17

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik						
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	7.66%	304,507,738,682.00	289,391,231,366.89	95.04
		Tingkat Pengangguran Terbuka	22.11%	878,990,523,147.17	836,743,832,224.42	95.19
S.9	Sasaran : Tersempatnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	7.66%	304,507,738,682.00	289,391,231,366.89	95.04
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	22.11%	878,990,523,147.17	836,743,832,224.42	95.19
	JUMLAH		100%	3,974,761,570,922.00	3,697,575,974,929.23	93.03%

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik disediakan pagu anggaran sebesar Rp.3,974,761,570,922.00 dan terealisasi sebesar Rp.3,697,575,974,929.23 atau 93.03% sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja keuangan termasuk dalam kategori “SANGAT TINGGI”

Dari 6 (enam) indikator tujuan terdapat 3 (tiga) indikator yang penyerapannya sangat tinggi dan 1 (satu) indikator dengan penyerapan “tinggi” dan 2 (dua) indikator dengan penyerapan “rendah” antara lain indikator pertumbuhan ekonomi karena Semakin pesatnya perkembangan umkm di tingkat kecamatan sejak dilakukannya Training of trainer di kecamatan sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan wilayah dan penggunaan anggaran bisa lebih efisien. dan untuk indikator tingkat pengangguran terbuka penyerapannya rendah karena ditetapkan perbup pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan berusaha sehingga meningkatkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja produktif, seperti sektor industri kreatif, perdagangan digital, atau pengembangan koperasi berbasis komunitas.

untuk indikator sasaran dari 13 indikator terdapat 6 indikator dengan penyerapan anggaran kategori “sangat tinggi”, 4 indikator dengan kategori “tinggi” dan 3 indikator kategori “rendah” antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja hal tersebut dikarenakan Dengan adanya aplikasi SIMETA, membantu proses pengawasan limbah B3, sehingga dapat mengefisienkan anggaran perjalanan dinas selain itu pembangunan cold storage tidak dilaksanakan karena terdapat kendala lokasi dilapangan

H. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	98.95	86.98	12.10%
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.93%	86.13	14.67%
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	118.53%	92.22	7.78%
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	109.06%	91.86	8.14%
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	99.68%	94.36	5.34%
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	99.08%	52.18	47.34%
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	98.47%	73.48	25.39%
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	95.80%	88.37	7.76%
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	93.94%	93.13	0.86%
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	29.04%	58.70	-98.07%

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.4	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	98.37	94.82	3.61%
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	100.40	99.23	0.77%
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	100.87	96.17	3.83%
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	97.06	93.19	3.99%
		Prevalensi Stunting	106.97	84.17	15.83%
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik					
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	100.10	95.04	4.96%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	99.22	95.19	4.06%
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	118.96	95.04	4.96%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	99.46	95.19	4.29%
	rata-rata		98.18%	93.03%	6.19%
	kategori		sangat tinggi	sangat tinggi	efisien

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKI \times CKI) - RAKI)}{\sum_{i=1}^n (PAKI \times CKI)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKI : Pagu anggaran keluaran i

RAKI : Realisasi anggaran keluaran i

CKI : Capaian keluaran i

- Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :
 - 1.dari 6 indikator tujuan seluruhnya telah efisien dalam penggunaan anggaran karna masih dalam batas -20% sampai dengan 20%
 - 2.dari 13 indikator sasaran terdapat 10 indikator yang telah efisien dalam penggunaan sumber daya karena masih dalam batas -20% sampai dengan 20% dan terdapat 3 indikator yang tidak efisien antara lain Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi penyerapan anggaran pada Tahun 2024.
- Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 adalah sebesar 98.18% kategori “SANGAT TINGGI”
- Rata-rata Penyerapan anggaran tahun 2024 adalah sebesar 93.03% dengan kategori “SANGAT TINGGI”
- Efisiensi adalah sebesar 6.19% sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik Efisien dalam penggunaan sumber daya

98.18%*capaian kinerja***93.03%***capaian keuangan***6.19%***EFISIENSI*

I. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif			
T.1	Tujuan 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	- PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI - PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	- PROGRAM PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH - FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota			
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM - PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENATAAN DESA - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah			
T.3	Tujuan 3 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	- PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
T.4	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	- PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	• PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN • PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN • PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN • PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		Prevalensi Stunting	• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN • PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN • PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	• PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL • PROGRAM REHABILITASI SOSIAL • PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL • PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN • PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN • PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Tingkat Pengangguran Terbuka	• PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA • PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulan gan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA • PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	• PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL • PROGRAM REHABILITASI SOSIAL • PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL • PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN • PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN • PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

TUJUAN 1 : MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GRESIK BARU YANG INOVATIF, KOLABORATIF DAN CERDAS BERDASARKAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE



Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil penilaian sementara oleh Kementrian PAN RB tahun 2024 sampai dengan penyusunan laporan menggunakan hasil penilaian sementara yakni sebesar 85.94 atau kategori “A-” jika dibandingkan dengan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebesar 86.85 maka capaian kinerja sebesar 98.95%. beberapa upaya yang dilakukan tahun ini guna meningkatkan indeks Reformasi birokrasi antara lain :

TAHUN	IRB
2021	69.47
2022	68.93
2023	86.84
2024	85.94

- 1.Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis elektronik sehingga nilai SPBE tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu dari 4.13 menjadi 4.32
- 2.meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum serta perbaikan sistem hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum dibuktikan dengan indeks reformasi hukum 96.24
- 3.tersedianya data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir sehingga hasil ujicoba penyelenggaraan statistik sektoral meningkat dari tahun lalu yakni dari 1.77 menjadi 2.93 dengan predikat “Baik”
- 4.meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN khususnya terkait aspek perencanaan kebutuhan , pengaduan, penggajian, penghargaan dan disiplin sehingga nilai sistem merit semula 300 menjadi 310.5 atau indeks 0.76

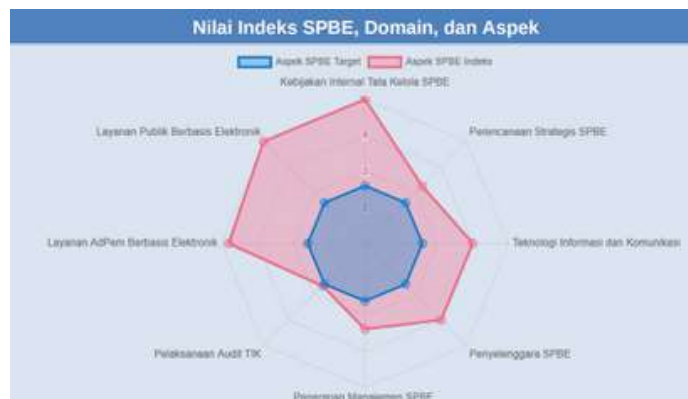
SASARAN 1: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH AKUNTABEL DENGAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS PEMANFAATAN TI



Indeks SPBE

Berdasarkan surat keputusan Kementrian PANRB nomor 663 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE sebesar 4.32 kategori “memuaskan”. indeks tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten sebesar 3.21 dan rata-rata provinsi 4.04. beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten gresik antara lain :

1. Reviu Kebijakan SPBE
2. Perbaikan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
3. Perbaikan Peta Proses Bisnis
4. Penerapan Manajemen SPBE
5. Pelaksanaan Audit TIK
6. Pengembangan Layanan Elektronik



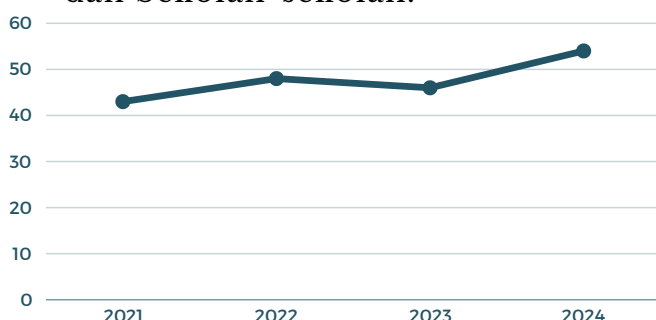
SASARAN 2 : MENGUATKAN INOVASI DAERAH BERLANDASKAN PEMBANGUNAN KOLABORATIF DI SEMUA LEVEL PEMERINTAHAN



Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan surat keputusan Kementrian Dalam negri nomor 400.10.11-4898 tahun 2024 tentang indeks inovasi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. dari hasil penilaian Kabupaten gresik memperoleh nilai 54.43 kategori “inovatif” jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar 45.92 meningkat sebanyak 8.51, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten gresik untuk membangun ekosistem inovasi yang inklusif antara lain :

- penyelenggaraan Ginofest atau Gresik Inovasi Festival yaitu ajang pameran inovasi yang diadakan setiap tahun.
- penyelenggaraan kompetisi inovasi yang diikuti oleh Perangkat Daerah, dan Sekolah-sekolah.



pertumbuhan nilai inovasi

Buka Ginofest 2024, Gus Yani Ajak Bangun Ekosistem Inovasi Inklusif di Gresik

Jemmi Purwodianto - detikjatim
Jumat, 20 Feb 2024 21:48 WIB



Program Penunjang untuk menguatkan inovasi di Kab Gresik adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan
5. Program Pengelolaan Arsip

Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

INDEKS DAYA SAING DAERAH

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
GRESIK	4,62	2,93	4,63	3,42	4,07	3,54	1,78	2,64	2,24	5,00	2,69	3,05	3,38
GRESIK	4,55	4,12	4,81	3,78	4,03	3,97	2,11	2,47	2,33	5,00	4,35	3,29	3,73

2023
2024

berdasarkan hasil penilaian IDSD tahun 2024 yang dilakukan oleh BRIN maka kabupaten Gresik menduduki angka 3.73 meningkat 0.35 jika dibandingkan dengan tahun 2023. selain itu jika dibandingkan dengan nasional 3.43 Kab Gresik lebih tinggi 0.3%

beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan indeks daya saing adalah karena meningkatnya nilai dari beberapa pilar antara lain :

1. Pilar 2 : ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi
2. Pilar 3 : pemanfaatan TIK telah tersebar dan diimplementasikan
3. Pilar 4 : kemampuan daerah dalam mengelola perekonomian dan merespon guncangan domestik maupun global.
4. Pilar 6 : tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja
5. pilar 7 : keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil.
6. Pilar 9 : Melalui pengelolaan yang efektif dan mitigasi risiko yang tepat, sistem keuangan mendorong dunia usaha agar tumbuh secara produktif dan berkelanjutan
7. pilar 11 : kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market)

Perlu dilakukan perbaikan pada beberapa sektor yang memiliki nilai rendah antara lain :

1. Pilar 1 : Institusi yang kokoh menjadi faktor utama dalam mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
2. pilar 5 : mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup bayi dalam kondisi sehat.
3. pilar 8 : Pasar tenaga kerja yang efisien dan sistem pengupahan yang adil berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan tenaga kerja.

*Sasaran 3 : Mewujudkan
Pembangunan Gresik Baru yang
berdaya saing*

INDEKS KEPUASAN INFRASTRUKTUR

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	Jalan dan jembatan	90,79	SANGAT BAIK	A	94,38	SANGAT PENTING	A
a	Jalan Nasional	96,30	SANGAT BAIK	A	94,44	SANGAT PENTING	A
b	Jalan Provinsi	94,00	SANGAT BAIK	A	94,86	SANGAT PENTING	A
c	Jalan Kabupaten	92,84	SANGAT BAIK	A	94,96	SANGAT PENTING	A
d	Jalan Poros Desa	86,73	BAIK	B	94,10	SANGAT PENTING	A
e	Jalan Lingkungan	85,48	BAIK	B	93,79	SANGAT PENTING	A
f	Jembatan	89,38	SANGAT BAIK	A	94,52	SANGAT PENTING	A
2	Trasportasi Darat	88,96	SANGAT BAIK	A	92,74	SANGAT PENTING	A
a	Bus	89,23	SANGAT BAIK	A	92,82	SANGAT PENTING	A
b	Kereta Api	90,17	SANGAT BAIK	A	92,15	SANGAT PENTING	A
b	Ojek	89,69	SANGAT BAIK	A	92,80	SANGAT PENTING	A
c	Angkutan Kota	86,94	BAIK	B	93,04	SANGAT PENTING	A
d	Terminal	88,06	BAIK	B	93,11	SANGAT PENTING	A
e	Stasiun	89,70	SANGAT BAIK	A	92,53	SANGAT PENTING	A
3	Air Bersih	87,30	BAIK	B	92,80	SANGAT PENTING	A
a	Sumber Air Baku	86,95	BAIK	B	93,04	SANGAT PENTING	A
b	Unit Pengolahan Air	87,49	BAIK	B	93,11	SANGAT PENTING	A
c	Unit Transmisi dan Pelayanan	87,45	BAIK	B	92,53	SANGAT PENTING	A
4	Jaringan irigasi	90,13	SANGAT BAIK	A	94,73	SANGAT PENTING	A
5	Perumahan dan Permukiman	89,69	SANGAT BAIK	A	96,01	SANGAT PENTING	A
a	Persampahan	89,59	SANGAT BAIK	A	93,55	SANGAT PENTING	A
b	Sanitasi	89,99	SANGAT BAIK	A	94,61	SANGAT PENTING	A
c	Drainase	84,06	BAIK	B	91,41	SANGAT PENTING	A
d	Listrik	90,93	SANGAT BAIK	A	95,01	SANGAT PENTING	A
e	Telekomunikasi	93,91	SANGAT BAIK	A	95,71	SANGAT PENTING	A
6	Ruang Publik	91,39	SANGAT BAIK	A	94,21	SANGAT PENTING	A
a	Jalur Pejalan Kaki	90,46	SANGAT BAIK	A	95,39	SANGAT PENTING	A
b	Taman Kota	92,33	SANGAT BAIK	A	94,95	SANGAT PENTING	A
RKJ 2024		89,71	SANGAT BAIK	A	93,83	SANGAT PENTING	A

Angka indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur dilakukan dengan melakukan survey terhadap responden yang dibagi perkecamatan sesuai dengan proporsi penduduk pada masing-masing kecamatan. Dari hasil penilaian indeks kepuasan infrastruktur Kabupaten Gresik memperoleh nilai 89,71 kategori “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar 89,62 meningkat sebanyak 0,9. dari hasil survey menunjukkan ruang terbuka hijau memiliki nilai tertinggi dan air bersih memiliki nilai terendah sehingga perlu diperhatikan untuk perencanaan kedepannya.

Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) mengalami peningkatan, dari 58.51 pada tahun 2023 menjadi 60.12 pada tahun 2024

upaya mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Pembangunan TPST belahan rejo untuk menangani sampah wilayah gresik selatan
2. Pembangunan 10 stasiun pemantau kualitas udara ambien (SPKUA) real-time
3. pengiriman refuse derived fuel (RDF) hasil pengolahan sampah ke pabrik semen Indonesia
4. program kampung iklim
5. pembangunan 2 titik stasiun pemantau kualitas air real time (onlino)
6. penanaman mangrove seluas 26.1 Ha dengan total 261.000 bibit.
7. memperluas ruang terbuka hijau
8. memperbanyak kampung zero waste



penghargaan proklam



penghargaan eco pesantren



penghargaan desa berser



penghargaan adiwiyata

Total potensi penurunan emisi kumulatif dari pembangunan rendah karbon selama periode 2010-2024 mencapai 20.753.834 ton CO₂EQ, menurut data dari platform AKSARA Kementerian PPN/Bappenas.



Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Berdasarkan hasil perhitungan BPS Indeks pembangunan gender tahun 2023 yang dirilis 27 maret 2024 mengalami peningkatan, dari 90.78 pada tahun 2022 menjadi 91.01 pada tahun 2023

dalam mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan. (sekoper-sekolah-perempuan)
2. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi. (program Bunda puspa)
3. Terdapat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta diperlengkapi dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
4. penyelenggaraan Musrenbang khusus perempuan

Program penunjang tercapainya sasaran tersebut antara lain:

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Pada tahun 2024 di perlukan anggaran sebesar Rp.33,561,351,680.00 terealisasi Rp.24,659,539,311.00 atau 73.48% rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan optimalisasi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan terkait isu gender dilaksanakan secara online



musrenbang perempuan desa



musrenbang perempuan kabupaten



pembekalan bunda puspa



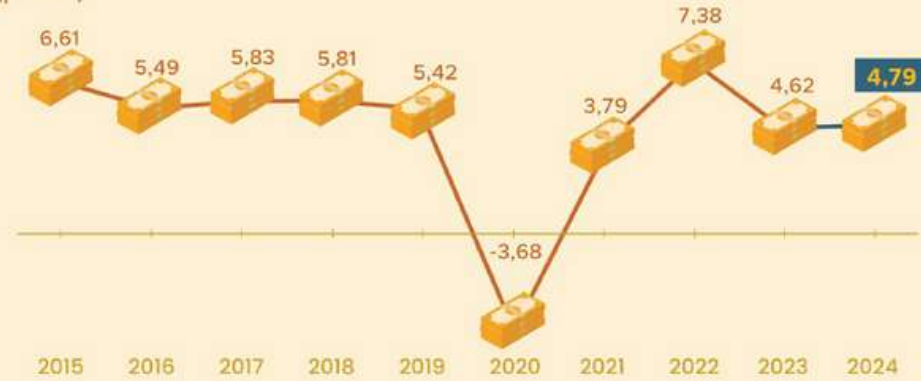
pelatihan perempuan

Tujuan 3 :

Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif

PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2015-2024 (persen)



Berdasarkan hasil perhitungan BPS Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 adalah 4.79 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 4.62 maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0.17

Perekonomian Kabupaten Gresik tahun 2024 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp188.604,51 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 119.274,42 miliar.

Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,04%.

Struktur perekonomian Kabupaten Gresik tahun 2024 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 51,25 persen. Sementara itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mendominasi perekonomian Kabupaten Gresik dari sisi pengeluaran sebesar 61,27%

Pada tahun 2024 di perlukan anggaran sebesar Rp.27,127,352,373.67 terealisasi Rp. 23,972,335,838.09 atau 88.37% hal tersebut dikarenakan Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha

*Sasaran 6 : Menurunnya
Ketimpangan Ekonomi
Antar Sektor dan Antar
Wilayah*

INDEKS WILLIAMSON

Berdasarkan hasil perhitungan indeks williamson tahun 2024 yaitu 0.35 dari target 0.33 maka capaian kinerja 93.94%

Wilayah dengan tingkat disparitas tinggi (nilai IW $50 <$) tersebut berada di wilayah yang berbatasan dengan Kota Surabaya, seperti Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Driyorejo. Hal ini dikarenakan pada 5 (lima) Kecamatan ini memiliki tiga aspek yaitu, keuntungan geografi (pusat pembangunan infrastruktur), pusat kawasan industri dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sedangkan untuk wilayah di luar 5 (lima) Kecamatan tersebut dengan nilai ketimpangan rendah dikarenakan didominasi oleh penduduk yang berkerja pada sektor primer/pertanian

Berdasarkan hasil model ekonometri, menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan ketimpangan tinggi pada kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo. Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gresik periode 2015-2023 dipengaruhi oleh beberapa kegiatan antara lain kegiatan industri yang merupakan sektor mendominasi struktur ekonomi di Kabupaten Gresik hingga mencapai 57,21% hal tersebut yang menyebabkan perbedaan ekonomi di Kabupaten Gresik.

Konsentrasi kemiskinan pada Kabupaten Gresik tahun 2016 sebesar 157.120 Jiwa. Pada tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan, namun tidak signifikan dimana persentase penduduk miskin tahun 2017 ke 2018 menurun sebesar 0,91% dan pada tahun 2019 ke 2020 menurun sebesar 1,52%. Lalu, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,03%. Dan dilanjutkan di tahun 2023 menjadi 149,75 ribu penduduk.

*Sasaran 7 : Menurunnya
Ketimpangan Ekonomi
Antar Sektor dan Antar
Wilayah*

PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN

Berdasarkan hasil perhitungan BPS laju pertumbuhan menurut lapangan usaha sektor pertanian sebesar 1.63% berarti bahwa sektor pertanian menyumbang 1.63% dari total PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3.2 maka menunjukkan sektor pertanian mengalami penurunan peran dalam struktur ekonomi Kabupaten Gresik.

dalam Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif, dilakukan beberapa faktor penyebab penurunan antara lain :

1. Permasalahan Pupuk
2. Hama
3. Perubahan iklim
4. Masalah infrastruktur
5. Harga komoditas pertanian yang fluktuatif
6. Keterbatasan teknologi dan inovasi
7. Tantangan ketenagakerjaan
8. Ketergantungan pada impor

Program penunjang tercapainya sasaran tersebut antara lain:

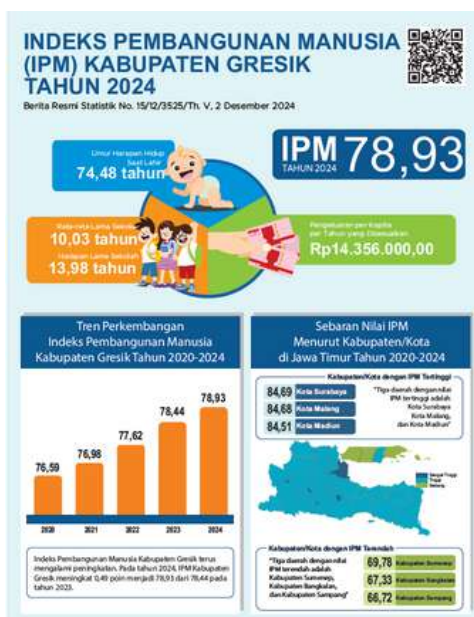
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pada tahun 2024 di perlukan anggaran sebesar Rp.3,753,732,639.00 terealisasi Rp. 2,203,427,302.44 atau 58.70% hal tersebut dikarenakan Semakin pesatnya perkembangan umkm di tingkat kecamatan sejak dilakukannya Training of trainer di kecamatan sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan wilayah dan penggunaan anggaran bisa lebih efisien.

TUJUAN 4 : MENGUATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA GRESIK BARU YANG BERKUALITAS & BERKEADILAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH



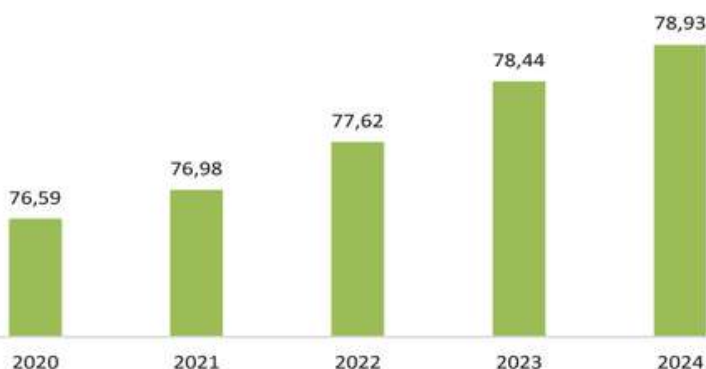
Indeks Pembangunan Manusia



Berdasarkan berita resmi statistik nomor 15/12/3525/Th.V,2 Desember 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik Tahun 2024 mencapai 78.93 meningkat 0,49 poin atau 0,62% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 78.44.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Gresik tahun 2024 tidak lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan secara nilai

Umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 sebesar 74,48 tahun, meningkat 0,24 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada tahun 2024 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,97 tahun menjadi 13,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun, dari 10,01 tahun menjadi 10,03 tahun pada tahun 2024.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian tujuan ini ditunjang oleh beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain :

- Pembangunan RSUD Gresik Sehati di wilayah Gresik Selatan
- Pembangunan UPT SMP 34 Gresik

SASARAN 8 : MENINGKATNYA NILAI NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT



Indeks Kesalehan Sosial



Indeks Kesalehan Sosial Kab. Gresik tahun 2024 sebesar 80.32 jika di bandingkan dengan target 80 maka capaian tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI. Jika dibandingkan dengan Nasional sebesar 76.47 kabupaten gresik lebih tinggi 3,85%.

Faktor penyebab keberhasilan indeks Kesalehan Sosial di kab. gresik adalah banyaknya pondok pesantren yang tersebar diseluruh wilayah baik perdesaan maupun perkotaan serta adanya kawasan religius sehingga Karakteristik Islami ini menyatu dalam kehidupan masyarakat Gresik. Menurut data Kementerian Agama, jumlah pesantren di kabupaten ini mencapai 94 pondok pesantren dengan santri sebanyak 23.551 orang

SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN



Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat



Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2024 sebesar 82.5 jika dibandingkan dengan target 2024 sebesar 85 maka capaian tahun 2024 sebesar 97.06% dengan kategori SANGAT TINGGI. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 82.2 maka mengalami peningkatan 0.3%. angka tersebut diperoleh dari 7 indikator antara lain :

1. Kesehatan balita 91.44
2. Kesehatan reproduksi 78.30
3. Pelayanan Kesehatan 79.16
4. Perilaku kesehatan 87.45
5. Penyakit tidak menular 74.49
6. Penyakit menular 71.24
7. kesehatan lingkungan 95.75

Indikator tertinggi diperoleh dari kesehatan lingkungan yang ditunjang oleh akses sanitasi dan kecukupan air bersih, selain itu indikator kesehatan balita juga berperan sangat besar dalam indeks pembangunan kesehatan masyarakat karena ditunjang oleh kegiatan pemberian imunisasi dasar lengkap, fasilitasi pemberian makanan tambahan pada balita dan layanan pemeriksaan balita secara berkala



SASARAN 10 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN



Pravelansi Stunting

Pravelansi Stunting tahun 2024 sebesar 8.14 jika di bandingkan dengan target 2024 sebesar 9-8.5 maka capaian tahun 2023 sebesar 106.97% dengan kategori SANGAT TINGGI. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 9.12 maka mengalami peningkatan 0.98

Beberapa strategi yang dilakukan antara lain :

- Melakukan intervensi serentak pencegahan stunting yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kabupaten Gresik :
 - a. memastikan pendataan seluruh catin, Ibu Hamil dan Balita yang ada di wilayah kerja untuk menjadi sasaran;
 - b. memastikan seluruh catin mendapat pendampingan serta memastikan kehadiran Ibu Hamil serta Balita datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - c. memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu;
 - d. memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk Ibu Hamil dan Balita;
 - e. memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar;
 6. memastikan intervensi pada Ibu Hamil dan Balita yang bermasalah gizi;
 - f. memastikan seluruh Ibu Hamil dan Balita diberikan edukasi di Posyandu
 - g. memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi e-PPGBM di hari yang sama;

- h. memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak; dan
 - i. memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan.
- Menggandeng berbagai stakeholder, seperti Dinas Pendidikan, KBPPPA, dan lainnya
 - Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

Program penunjang pencapaian sasaran ini antara lain :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



rembuk stunting 2024



Intervensi Stunting di Kabupaten Gresik Fokus Tiga Sasaran



Evaluasi capaian tim percepatan penurunan stunting



Turunkan Angka Stunting, Bupati Gresik Terima Penghargaan Kak Seto Award 2024

SASARAN 11 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN



Indeks Pendidikan

Berdasarkan hasil perhitungan indeks pendidikan tahun 2024 sebesar 82.41 jika dibandingkan dengan indeks pendidikan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1.43. beberapa dimensi yang mengalami peningkatan antara lain Human resource (Kualitas sumber daya manusia dalam standar kualifikasi tenaga ajar dengan nilai tambah kesetaraan gender) dan state partially (Keberpihakan negara dalam pembiayaan dan menentukan regulasi).

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Gresik antara lain :

- 1.berdasarkan Data GTK 2024 Sem. Ganjil peningkatan Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan yang berkualifikasi D-IV/S1 semula 65.71% menjadi 81.43%
- 2.selain itu untuk Keberpihakan negara dalam pembiayaan dan menentukan regulasi dipengaruhi oleh peningkatan Anggaran pendidikan dari ketentuan minimal 20% (mandatory spending) jika dibandingkan dengan tahun 2023
- 3.berdasarkan Hasil SKM 2024 Sem. Ganjil Kepuasan Pelayanan Pendidikan 82.56 atau kategori “Baik”

NO	DIMENSI	INDEKS 2024 (%)	INDEKS 2023 (%)
1	Achievement Outcomes	86.54	88.05
2	Sussequent Achievement	72.27	81.49
3	Infrastructure	77.61	75.1
4	Human Resource	84.35	75.57
5	State Partially	91.28	86.32
INDEKS PENDIDIKAN		82.41	80.98



Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

TINGKAT KEMISKINAN

Berdasarkan hasil perhitungan BPS Persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik Maret 2024 turun menjadi 10,32 persen

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Maret 2024 sebesar 10,32 persen, menurun 0,64 poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 142,39 ribu orang, menurun sekitar 7.36 ribu orang terhadap Maret 2023. Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp608.828,-/kapita/bulan, bertambah sebesar Rp20.512,-/kapita/bulan atau meningkat sebesar 3,14 persen dari kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp588.316,-/kapita/bulan.



Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik antara lain :

- pemanfaatan Intelligent Operational platform (IOP) untuk sinergitas antar opd pengampu program pengentasan kemiskinan agar tidak tumpang tindih
- Program pembangunan rumah tidak layak huni
- Program pemberian bantuan usaha untuk keluarga miskin
- Program kejar paket gratis dan beasiswa bagi mahasiswa miskin
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pelatihan Kerja bagi warga miskin

Sasaran 12 : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Berdasarkan hasil perhitungan BPS Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 mengalami kenaikan dari 70,12 persen di tahun 2023 menjadi 71,61 persen di tahun 2024 Hal ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan jumlah angkatan kerja khususnya penduduk usia kerja yang bekerja

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Gresik sejumlah 1,06 juta orang, meningkat sebanyak 14,3 ribu penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja, dimana terjadi kenaikan angkatan kerja dari 739,01 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 764,97 ribu orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 715,61 ribu orang, bertambah 26,97 ribu orang dari Agustus 2023. Sektor jasa menyerap jumlah pekerja terbanyak, yaitu 50,14 persen diikuti sektor manufaktur yang menyerap sebanyak 35,91 persen tenaga kerja. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja dengan porsi terkecil, yaitu sebesar 13,95 persen tenaga kerja Pekerja sektor formal mengalami penurunan dari tahun 2023 pada level 55,30 persen menjadi 54,16 persen di tahun 2024.

Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 86,80 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 56,37 persen. TPAK untuk perempuan yang sebesar 56,37 persen ini naik sebesar 2,06 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 54,37 persen. TPAK laki-laki juga terjadi kenaikan 0,98 persen poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 85,82

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Gresik antara lain :

- Pembangunan aplikasi AK1 untuk pelaporan mandiri perusahaan terkait penempatan tenaga kerja dan fasilitasi pencari kerja
- penyelenggaraan job fair
- pemanfaatan dana desa dengan program padat karya
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh dinas tenaga kerja maupun dinas cipta karya
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Sasaran 12 : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan

CAKUPAN PERLINDUNGAN SOSIAL WARGA MISKIN

No	Komponen	2024
1	PBI JKN	466,049
2	BPNT	85,619
3	PKH Reguler	47,421
4	PKH Plus	2,605
5	Permakanan Lansia APBN	442
6	Permakanan Disabilitas APBN	1,500
7	YAPI APBN	1,762
8	Marbot	1,438
9	Guru Ngaji	7,366
10	Penjaga Makam	1,038
11	Janda Miskin	17,799
12	Anak Yatim	4,674
13	DBHCHT	2,866
14	PKH Inklusif	1,354
15	Bantuan Alat Bantu Kemensos	100
16	Bantuan Alat Bantu CSR bagi Disabilitas	2
JUMLAH		642,035

berdasarkan hasil perhitungan dinas sosial cakupan perlindungan sosial warga miskin tahun 2024 adalah 118,96% angka tersebut diperoleh dari jumlah data penerima bantuan sosial sebanyak 642.035 orang dibagi jumlah data warga miskin berdasarkan DTKS adalah sebanyak 539.697 orang dikali 100 persen. dengan rincian penerima bantuan sebagaimana pada tabel disamping.



PERJANJIAN KINERJA APBD 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : BUPATI GRESIK

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Gresik, 16 Januari 2024

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	1 Indeks Kepuasan Infrastruktur	7.2
2	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.68
3	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	1 Indeks Pembangunan Gender	92.42
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.86
5	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	1 Indeks Inovasi Daerah	4780
6	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	1 Indeks Williamson	0.35
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	2 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	5-6 %
		1 Indeks Pendidikan	81.7
		2 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	83
8	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	3 Prevalensi Stunting	9-8.5
		1 Indeks Kesalehan Sosial	80
9	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72 %
		2 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	90

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 523,299,915,430	APBD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 427,998,994,798	APBD
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 40,015,950,000	APBD
4	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 497,572,698,131	APBD
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 183,332,108,682	APBD
6	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 7,120,621,350	APBD
7	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 535,884,000	APBD
8	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 2,498,292,243	APBD
9	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 20,504,881,571	APBD
10	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp. 35,741,598,000	APBD
11	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp. 16,106,764,953	APBD
12	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp. 7,464,823,583	APBD
13	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp. 7,000,000,000	APBD
14	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp. 74,490,000,000	APBD
15	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp. 400,000,000	APBD

236	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 100,000,000	APBD
237	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,938,674,158	APBD
238	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp. 2,286,220,427	APBD
239	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. 64,505,384,062	APBD
240	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 306,749,919	APBD
241	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 905,000,000	APBD
242	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 8,880,022,600	APBD
Jumlah			Rp. 3,887,408,009,350	

Gresik, 16 Januari 2024

BUPATI GRESIK


 H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PERJANJIAN KINERJA PAPBD 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Gresik, 31 Oktober 2024

Plt. BUPATI GRESIK


AMINATUN HABIBAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	1	Indeks Kepuasan Infrastruktur	7.2
2	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.68
3	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	1	Indeks Pembangunan Gender	92.42
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.86
5	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	1	Indeks Inovasi Daerah	4780 (Sangat Inovatif)
6	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	1	Indeks Williamson	0.35
		2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	5-6 %
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	1	Indeks Pendidikan	81.7
		2	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	83
		3	Prevalensi Stunting	9-8.5
8	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	1	Indeks Kesalehan Sosial	80
9	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72 %

		2	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	90
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 529,194,414,110	PAPBD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 461,021,403,246	PAPBD
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 40,782,750,000	PAPBD
4	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 500,084,813,673	PAPBD
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 247,444,298,793	PAPBD
6	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 7,500,173,850	PAPBD
7	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 535,884,000	PAPBD
8	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 2,863,482,243	PAPBD
9	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 21,898,616,476	PAPBD
10	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 700,000,000	PAPBD
11	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp. 30,541,134,842	PAPBD
12	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp. 25,785,806,975	PAPBD

13	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp. 7,614,824,583	PAPBD
14	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp. 8,310,079,096	PAPBD
15	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp. 70,795,928,150	PAPBD
16	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp. 1,639,781,264	PAPBD
17	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 199,628,253,651	PAPBD
18	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp. 434,358,000	PAPBD
19	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp. 1,102,827,903	PAPBD
20	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 17,014,119,085	PAPBD
21	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 373,478,827	PAPBD
22	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 19,237,015,451	PAPBD
23	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp. 10,296,197,824	PAPBD
24	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 19,414,719,786	PAPBD
25	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8,448,668,703	PAPBD
26	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,921,001,326	PAPBD
27	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7,459,417,200	PAPBD
28	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2,003,756,485	PAPBD

29	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 2,202,002,943	PAPBD
30	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,781,172,339	PAPBD
31	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 2,924,004,000	PAPBD
32	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 6,578,000,000	PAPBD
33	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 15,699,863,955	PAPBD
34	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 536,953,800	PAPBD
35	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 249,999,200	PAPBD
36	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7,103,820,500	PAPBD
37	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp. 79,438,800	PAPBD
38	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 2,800,000,100	PAPBD
39	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 757,516,500	PAPBD
40	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 800,000,000	PAPBD
41	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 898,000,000	PAPBD
42	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 353,379,000	PAPBD
43	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 1,500,000,000	PAPBD
44	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 430,468,000	PAPBD
45	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 430,769,000	PAPBD

46	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 50,000,000	PAPBD
47	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 647,631,475	PAPBD
48	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 112,777,350	PAPBD
49	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 70,000,000	PAPBD
50	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp. 34,990,000	PAPBD
51	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp. 10,840,010,000	PAPBD
52	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 15,071,883,323	PAPBD
53	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 1,617,363,735	PAPBD
54	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 7,359,973,677	PAPBD
55	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp. 199,999,830	PAPBD
56	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp. 261,035,530	PAPBD
57	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp. 296,000,000	PAPBD
58	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 37,999,975	PAPBD

59	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 24,232,479,224	PAPBD
60	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10,901,139,897	PAPBD
61	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 149,452,600	PAPBD
62	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 79,997,950	PAPBD
63	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 300,852,800	PAPBD
64	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 100,308,940	PAPBD
65	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,488,557,728	PAPBD
66	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 299,991,582	PAPBD
67	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp. 99,999,954	PAPBD
68	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 10,369,183,716	PAPBD
69	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2,836,399,375	PAPBD
70	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,481,033,997	PAPBD
71	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 461,400,000	PAPBD
72	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 6,037,045,000	PAPBD
73	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 9,193,299,980	PAPBD
74	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 56,470,619,003	PAPBD

105	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,131,366,618	PAPBD
106	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 1,924,815,925	PAPBD
107	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 3,132,021,000	PAPBD
108	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 899,993,314	PAPBD
109	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 3,155,000,000	PAPBD
110	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 536,599,982	PAPBD
111	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 413,399,767	PAPBD
112	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 600,005,015	PAPBD
113	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 16,944,334,326	PAPBD
114	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 24,035,151,000	PAPBD
115	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 4,614,413,095	PAPBD
116	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp. 555,499,671	PAPBD
117	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp. 531,651,764	PAPBD
118	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp. 60,000,000	PAPBD
119	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 3,417,035,658	PAPBD

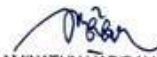
214	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 69,375,705	PAPBD
215	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 16,700,000	PAPBD
216	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 25,775,000	PAPBD
217	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 8,694,830	PAPBD
218	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 27,110,425	PAPBD
219	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 7,311,500	PAPBD
220	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 325,876,919	PAPBD
221	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 100,340,624	PAPBD
222	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 94,690,610	PAPBD
223	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 151,314,639	PAPBD
224	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 86,792,321	PAPBD
225	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 67,720,000	PAPBD
226	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 95,110,284	PAPBD

227	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 69,807,075	PAPBD
228	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 40,170,315	PAPBD
229	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 55,501,040	PAPBD
230	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 51,597,512	PAPBD
231	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 34,714,972	PAPBD
232	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 297,642,623	PAPBD
233	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 166,642,310	PAPBD
234	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 7,469,230	PAPBD
235	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 116,774,225	PAPBD
236	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 99,400,100	PAPBD
237	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 100,000,000	PAPBD
238	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,051,093,857	PAPBD
239	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp. 2,986,220,427	PAPBD

240	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. 64,823,921,382	PAPBD
241	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 306,749,919	PAPBD
242	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 905,000,000	PAPBD
243	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 8,880,022,600	PAPBD
Jumlah			Rp. 3,974,761,570,922	

Gresik, 31 Oktober 2024

PIL. BUPATI GRESIK


 AMINATUN HABIBAH

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapaun Program dan Kegiatan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisi, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sedangkan untuk Penugasan, selama tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Gresik tidak memberikan tugas Pembantuan secara eksplisit kepada Desa/Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulant Pembangunan Desa/Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat Desa/Kelurahan dalam proses pembangunan terus digalang melalui kegiatan Musrenbang.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gresik secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan dasar terdiri atas:

1. pendidikan anak usia dini;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun).

2. Pendidikan dasar;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang terbagi dalam dua jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Pertama.

3. Pendidikan kesetaraan;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan oleh Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel III.A.1 Target SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.156 orang	Tahun 2024	1. Angka partisipasi sekolah	84.23%	Tahun 2024
					2. Angka partisipasi murni	96.75%	Tahun 2024
					3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	91.35%	Tahun 2024
					4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1) Diplomat empat (D-IV)	91.5%	Tahun 2024
					5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	6.3%	Tahun 2024
					6. Kecukupan formasi guru ASN	4.59%	Tahun 2024
					7. Indeks distribusi guru	0.31%	Tahun 2024
					8. Proporsi PTK bersertifikat	57.7%	Tahun 2024
					9. Proporsi PTK penggerak	0.49%	Tahun 2024
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	164.451 orang	Tahun 2024	Sekolah Dasar (SD)		
					1. Angka partisipasi kasar	103.97%	Tahun 2024
					2. Angka partisipasi sekolah	99.47%	Tahun 2024
					3. Kemampuan literasi	87.84 Nilai	Tahun 2024
					4. Kemampuan numerasi	79.41 Nilai	Tahun 2024
					5. Perbedaan Skor Literasi	4.39 Nilai	Tahun 2024
					6. Perbedaan Skor numerasi	1.98 Nilai	Tahun 2024
					7. Indeks iklim keamanan	74.66 Nilai	Tahun 2024
					8. Indeks iklim kebhinekaan	74.91 Nilai	Tahun 2024
					9. Indeks iklim inklusivitas	57.87 Nilai	Tahun 2024
					10. Kecukupan formasi guru ASN	4,59%	Tahun 2024
					11. Indeks distribusi guru	0,42%	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					12. Proporsi PTK bersertifikat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	39,25%	Tahun 2024
					1. Angka partisipasi kasar	108.09%	Tahun 2024
					2. Angka partisipasi sekolah	98.32%	Tahun 2024
					3. Kemampuan literasi	87.57 Nilai	Tahun 2024
					4. Kemampuan numerasi	83.71 Nilai	Tahun 2024
					5. Perbedaan Skor Literasi	4.293 Nilai	Tahun 2024
					6. Perbedaan Skor numerasi	2.610 Nilai	Tahun 2024
					7. Indeks iklim keamanan	71.53 Nilai	Tahun 2024
					8. Indeks iklim kebhinekaan	74.03 Nilai	Tahun 2024
					9. Indeks iklim inklusivitas	58.31 Nilai	Tahun 2024
					10. Kecukupan formasi guru ASN	1.72%	Tahun 2024
					11. Indeks distribusi guru	0.33%	Tahun 2024
					12. Proporsi PTK bersertifikat	53.73%	Tahun 2024
					13. Proporsi PTK penggerak	0	Tahun 2024
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	1137 orang	Tahun 2024	1. Angka partisipasi kasar	0	Tahun 2024
					2. Angka partisipasi sekolah	23.74%	Tahun 2024
					3. Kemampuan literasi	76.44 Nilai	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			4. Kemampuan numerasi	67.06 Nilai	Tahun 2024
					5. Perbedaan Skor Literasi	4.53 Nilai	Tahun 2024
					6. Perbedaan Skor numerasi	3.06 Nilai	Tahun 2024
					7. Indeks iklim keamanan	68.35 Nilai	Tahun 2024
					8. Indeks iklim kebhinekaan	61.96 Nilai	Tahun 2024
					9. Indeks iklim inklusivitas	53.12 Nilai	Tahun 2024



4.1.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada Dinas Pendidikan bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Tabel III.A.2 Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
Urusan Pendidikan Kab. Gresik		501,804,153,246	474,101,903,811	94.48 %
Program Pengelolaan Pendidikan		461,021,403,246	443,209,211,591	96.41 %
1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		182,559,140,142	171,970,227,984	94.20 %
5.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,283,919,779	3,260,992,274	99.30 %
12.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	428,750,000	428,750,000	100 %
13.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,880,000,000	3,496,178,200	90.11 %
15.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	48,858,958,452	44,193,070,000	90.45 %
17.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50,000,000	35,229,500	70.46 %
18.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100,000,000	97,957,500	97.96 %
19.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	571,644,890	453,280,150	79.29 %
20.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8,680,921,318	7,867,267,960	90.63 %
21.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	106,790,105,482	102,998,474,620	96.45 %
38.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,972,248,347	1,802,618,921	91.40 %
39.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	1,212,121,434	1,211,491,434	99.95 %

	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Prasarana dan Utilitas Sekolah			
40.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	177,000,000	114,873,500	64.90 %
41.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	223,000,000	203,371,500	91.20 %
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6,330,470,440	5,806,672,425	91.73 %
	JUMLAH INDIKATOR	182,559,140,142	171,970,227,984	94.20 %
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	128,011,175,322	125,538,936,509	98.07 %
5.	Pembangunan Laboratorium	761,732,022	751,557,022	98.66 %
12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5,168,702,082	5,163,821,816	99.91 %
20.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,082,461,896	2,763,597,471	89.66 %
23.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,448,000,000	3,406,610,600	98.80 %
25.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	46,926,380,000	45,681,920,000	97.35 %
28.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50,000,000	47,029,300	94.06 %
30.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50,000,000	48,939,400	97.88 %
31.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4,173,089,000	3,687,578,590	88.37 %
32.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63,954,410,322	63,647,495,710	99.52 %
41.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	146,400,000	107,319,800	73.31 %
47.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	203,740,000	201,583,950	98.94 %

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
49.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	46,260,000	31,482,850	68.06 %
JUMLAH INDIKATOR		128,011,175,322	125,538,936,509	98.07 %
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		62,856,685,000	62,487,668,809	99.41 %
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	730,596,000	723,274,126	99.00 %
7.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	14,100,156,000	13,950,250,000	98.94 %
9.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	342,440,000	318,102,040	92.89 %
11.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7,694,400,000	7,692,600,000	99.98 %
12.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	450,000,000	440,509,050	97.89 %
13.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	38,666,760,000	38,491,842,000	99.55 %
14.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	872,333,000	871,091,593	99.86 %
JUMLAH INDIKATOR		62,856,685,000	62,487,668,809	99.41 %
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		87,594,402,782	83,212,378,289	95.00 %
2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	39,407,702,000	39,373,112,000	99.91 %
6.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35,318,400,782	31,044,060,989	87.90 %
7.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,813,300,000	2,740,560,000	97.41 %
8.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10,005,000,000	10,005,000,000	100.00 %
32.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50,000,000	49,645,300	99.29 %
JUMLAH INDIKATOR		87,594,402,782	83,212,378,289	95.00 %
JUMLAH PROGRAM		461,021,403,246	443,209,211,591	96.14 %
KEGIATAN LAINNYA				
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya				



Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40,782,750,000	30,892,692,220	75.75

4.1.4 Dukungan Personil

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Tabel III.A.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2024

No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)		1
a.	Pangkat/Golongan		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
b.	Pendidikan		
	S2	1	
	Administrator		5
a.	Pangkat/Golongan		
	Pembina Tk. I (IV/b)	2	
	Pembina (IV/a)	1	
	Penata Tk. I (III/d)	1	
	Penata (III/c)	1	
b.	Pendidikan		
	S3	1	
	S2	3	
	S1	1	
	Pengawas		12
a.	Pangkat/Golongan		
	Pembina (IV/a)	1	
	Penata Tk. I (III/d)	8	
	Penata (III/c)	1	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	
b.	Pendidikan		
	S2	3	
	S1	9	

No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum		51
a.	Pangkat/Golongan		
	Pembina (IV/a)	1	
	Penata Tk. I (III/d)	8	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	5	
	Penata Muda (III/a)	13	
	Pengatur Tk. I (II/d)	15	
	Pengatur (II/c)	6	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3	
b.	Pendidikan		
	S1	22	
	D3	2	
	SMA	27	
2.	Jabatan Fungsional Tertentu		4607
a.	Pangkat/Golongan		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	104	
	Pembina Tk. I (IV/b)	522	
	Pembina (IV/a)	433	
	Penata Tk. I (III/d)	441	
	Penata (III/c)	378	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	365	
	Penata Muda (III/a)	383	
	Pengatur Tk. I (II/d)	6	
	Pengatur (II/c)	6	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4	
	IX	1965	
b.	Pendidikan		
	S2	228	
	S1	4313	
	D4	2	
	D3	8	
	D2	37	
	SMA	19	
3.	NON ASN		107
a.	Pendidikan		
	S1	68	
	D3	4	
	D2	2	
	SMA	27	
	SMP	2	
	SD	4	
JUMLAH TOTAL PERSONIL			4783



4.1.5 Hasil Capaian

Hasil capaian atau realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan tiga jenis pelayanan dasar, SPM urusan Pendidikan mencapai 100%. Berikut capaian SPM Kesehatan Tahun 2024:

Tabel III.A.5. 2 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.156 Orang	38.156 Orang	100%	Angka partisipasi sekolah	84,23%	84,23	100%
						Angka partisipasi murni	96,75%	96,75%	100%
						Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	91,35%	91,35%	100%
						Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	91,5%	91,5%	100%
						Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	6,30%	6,30%	100%
						Kecukupan formasi guru ASN	4,59%	4,59%	100%
						Indeks distribusi guru	0,31%	0,31%	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	57,77%	57,77%	100%
						Proporsi PTK penggerak	0,49%	0,49%	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	164.451 orang	164.451 orang	100%	Sekolah Dasar (SD)			
						Angka partisipasi kasar	103,97%	103,97%	100%
						Angka partisipasi sekolah	99,47%	99,47%	100%
						Kemampuan literasi	87,84%	87,84%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
		(SD/Mi/SMP/MTs)				Kemampuan numerasi	79,41%	79,41%	100%
						Perbedaan Skor Literasi	4,39%	4,39%	100%
						Perbedaan Skor numerasi	1,98%	1,98%	100%
						Indeks iklim keamanan	74,66%	74,66%	100%
						Indeks iklim kebhinekaan	74,91%	74,91%	100%
						Indeks iklim inklusivitas	57,87%	57,87%	100%
						Kecukupan formasi guru ASN	4,59%	4,59%	100%
						Indeks distribusi guru	0,42%	0,42	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	39,25%	39,25%	100%
						Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
						Angka partisipasi kasar	108,09%	108,09%	100%
						Angka partisipasi sekolah	98,32%	98,32%	100%
						Kemampuan literasi	87,57%	87,57%	100%
						Kemampuan numerasi	83,71%	83,71%	100%
						Perbedaan Skor Literasi	4,29%	4,29%	100%
						Perbedaan Skor numerasi	2,61%	2,61%	100%
						Indeks iklim keamanan	71,53%	71,53%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						Indeks iklim kebinekaan	74,03%	74,03%	100%
						Indeks iklim inklusivitas	58,31%	58,31%	100%
						Kecukupan formasi guru ASN	1,72%	1,72%	100%
						Indeks distribusi guru	0,33%	0,33%	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	53,73%	53,73%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.137 orang	1.137 orang	100%	Angka partisipasi sekolah	23,74%	23,74%	100%
						Kemampuan literasi	76,44%	76,44%	100%
						Kemampuan numerasi	67,06%	67,06%	100%
						Perbedaan Skor Literasi	4,53%	4,53%	100%
						Perbedaan Skor numerasi	3,06%	3,06%	100%
						Indeks iklim keamanan	68,35%	68,35%	100%
						Indeks iklim kebinekaan	61,96%	61,96%	100%
						Indeks iklim inklusivisme	53,12%	53,12%	100%



4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun Permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan antara lain:

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya kemampuan dan pemahaman pelaksana teknis dalam menganalisis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- b) Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan belum mengacu pada perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor Pendidikan;
- c) Belum adanya sinkronisasi antara Renstra dan Renja dengan tahapan penerapan SPM sehingga indikator SPM belum sepenuhnya dimuat dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda);
- d) Pendataan terhadap Anak Tidak Sekolah belum dilaksanakan secara optimal;
- e) Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam keseluruhan tahapan penerapan dan pemenuhan SPM di Internal Dinas Pendidikan, baik dalam hal capaian indikator layanan SPM maupun anggaran yang mendukung kegiatan dan sub kegiatan SPM.

2. Solusi

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas pelaksana teknis pengampu indikator SPM;
- b) Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan perlu diselaraskan dengan perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor Pendidikan;



- c) Perlu adanya sinkronisasi perencanaan SPM dengan perencanaan daerah, dalam hal ini Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga sasaran yang dituju menjadi selaras dengan program dan kegiatan pendukungnya;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan operator sekolah mengenai validasi data anak putus sekolah pada Dashboard ATS sehingga dapat difasilitasi secara optimal dalam Pendidikan Kesetaraan untuk menurunkan angka ATS;
- e) Perlunya komitmen bersama, baik pengambil keputusan maupun pelaksana teknis pengampu SPM di Dinas Pendidikan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan penerapan dan pemenuhan SPM Pendidikan sehingga target setiap indikator yang direncanakan dapat dicapai secara maksimal dan anggaran yang mendukung pencapaian tersebut dapat dialokasikan secara efisien.

4.2 SPM Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Urusan Kesehatan digunakan sebagai dasar untuk menerapkan standar pelayanan minimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai Organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaa SPM Urusan Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang terdiri dari 12 pelayanan dasar yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita



5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibuhamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah Sasaran Ibu Bersalin di Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).}} \times 100\%$$

3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir

$$\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$



4. Pelayanan Kesehatan Balita

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar} &= \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar} + \text{Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\% \end{aligned}$$

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

$$\begin{aligned} \text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan} &= \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\% \end{aligned}$$

6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

$$\begin{aligned} \text{Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} &= \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standard dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\% \end{aligned}$$

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

$$\begin{aligned} \text{Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard} &= \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (numerator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja PKM dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100\% \end{aligned}$$

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

$$\begin{aligned} \text{Persentase penderita DM yang mendapatkan} &= \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\frac{\text{pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

$$\frac{\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

$$\frac{\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

$$\frac{\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

$$\frac{\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik di Tahun Anggaran 2024 sebagai OPD pelaksana SPM kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.2.1 Target SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu	16.166 orang	Tahun 2024	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	15.268 Vaksin	Tahun 2024
		Hamil yang			2. Tablet tambah darah (180 tablet X jumlah ibu hamil)	3.605.760 Tablet	Tahun 2024
		mendapat			3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	16.166 orang	Tahun 2024
		layanan			4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	16.166 Paket	Tahun 2024
		kesehatan			5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	16.166 Paket	Tahun 2024
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3.005 Paket	Tahun 2024
					7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining Triple Eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	16.166 Paket	Tahun 2024
					8. Kartu ibu/rekam medis ibu	16.166 Paket	Tahun 2024
					9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.166 Buku	Tahun 2024
					10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	16.166 Paket	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	1.336 Botol	Tahun 2024
					12. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal: dengan rasio 1;2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1;16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	121 Orang	Tahun 2024
					13. Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	366 Orang	Tahun 2024
					14. Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	564 Orang	Tahun 2024
					15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	108 Orang	Tahun 2024
					16. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 Orang	Tahun 2024
					17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	16.166 Orang	Tahun 2024
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan	16.687 Orang	Tahun 2024	1. Formulir Partograf	16.687 Formulir	Tahun 2024
					2. Kartu ibu (rekam medis)	16.687 Paket	Tahun 2024
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.687	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		kesehatan			4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	16.687 Paket	Tahun 2024
					5. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	121 Orang	Tahun 2024
					6. Tenaga kesehatan: Bidan	564 Orang	Tahun 2024
					7. Tenaga kesehatan: Perawat	366 Orang	Tahun 2024
					8. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	108 Orang	Tahun 2024
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 Orang	Tahun 2024
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	16.585 Oarng	Tahun2024	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	16.585 Vaksin	Tahun 2024
					2. Vitamin K1 injeksi	16.858 Ampul	Tahun 2024
					3. Salep/tetes mata antibiotik	16.585 Orang	Tahun 2024
					4. Formulir bayi baru lahir	16.585 Formulir	Tahun 2024
					5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	3.866 Formulir	Tahun 2024
					6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.585 Buku	Tahun 2024
					7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	16.585 Paket	Tahun 2024
					8. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis Anak	145 Orang	Tahun 2024
					9. Tenaga kesehatan: Bidan	564 Orang	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	366 Orang	Tahun 2024
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	108 Orang	Tahun 2024
					12. Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	37 Orang	Tahun 2024
					13. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 Orang	Tahun 2024
					14. Kader Kesehatan	7.726 Orang	Tahun 2024
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	71.151 Orang	Tahun 2024	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	71.151 Dokumen	Tahun 2024
					2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	71.151 Formulir	Tahun 2024
					3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	71.151 Orang	Tahun 2024
					4. Vitamin A Biru	8.525 Kapsul	Tahun 2024
					5. Vitamin A Merah	71.151 Kapsul	Tahun 2024
					6. Vaksin imunisasi dasar: B CG	6.444 Vaksin	Tahun 2024
					7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	10.170 Vaksin	Tahun 2024
					8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	5.085 Vaksin	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	15.255 Vaksin	Tahun 2024
					10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubela	2.543 Vaksin	Tahun 2024
					11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	5.126 Vaksin	Tahun 2024
					12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	2.563 Vaksin	Tahun 2024
					13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	71.151 Unit	Tahun 2024
					14. Peralatan Anafilaktik	1.157 Paket	Tahun 2024
					15. Formula Terapi Gizi Buruk	186 Paket	Tahun 2024
					16. Tenaga medis: Dokter	146 Orang	Tahun 2024
					17. Tenaga medis: Bidan	564 Orang	Tahun 2024
					18. Tenaga kesehatan: Perawat	366 Orang	Tahun 2024
					19. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 Orang	Tahun 2024
					20. Guru PAUD	4.617 Orang	Tahun 2024
					21. Kader Kesehatan	7.726 Orang	Tahun 2024
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang	175.618 Orang	Tahun 2024	1. Buku raport kesehatanku	175.618 Buku	Tahun 2024
					2. Buku pemantauan kesehatan	175.618 Buku	Tahun 2024
					3. Kuesioner skrining kesehatan	175.618 Dokumen	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	mendapatkan layanan kesehatan				4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	175.618 Formulir	Tahun 2024
					5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	175.618 Formulir	Tahun 2024
					6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	10.227 Tablet	Tahun 2024
					7. Alat Pemeriksaan Hb	52 Alat	Tahun 2024
					8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	5.261 Strip	Tahun 2024
					9. Media promosi kesehatan	175.618 Paket	Tahun 2024
					10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	28.763 Vaksin	Tahun 2024
					11. Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	224 Orang	Tahun 2024
					12. Tenaga kesehatan: Bidan	564 Orang	Tahun 2024
					13. Tenaga kesehatan: Perawat	366 Orang	Tahun 2024
					14. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 Orang	Tahun 2024
					15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	108 Orang	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	921.721 Orang	Tahun 2024	16. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 Orang	Tahun 2024
					17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	8.972 Orang	Tahun 2024
					18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	7.726 Orang	Tahun 2024
					1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	921.721 Paket	Tahun 2024
					2. Alat ukur lingkaran lengan atas (ULA)	757 Unit	Tahun 2024
					3. Alat: Tensimeter	134 Unit	Tahun 2024
					4. Alat: Glukometer	478 Unit	Tahun 2024
					5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	52 Unit	Tahun 2024
					6. Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	921.721 Unit	Tahun 2024
					7. Alat: KIT IVA Tes	33 Unit	Tahun 2024
					8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	5.261 Unit	Tahun 2024
					9. Kit Ophthalmologi Komunitas	366 Unit	Tahun 2024
					10. Kuesioner PUMA	921.721 Dokumen	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					11. Alat Pelayanan KB	1.389 Unit	Tahun 2024
					12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1 Dokumen	Tahun 2024
					13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	9.842 Vaksin	Tahun 2024
					14. Tenaga medis: Dokter	108 Orang	Tahun 2024
					15. Tenaga medis: Bidan	564 Orang	Tahun 2024
					16. Tenaga kesehatan: Perawat	366 Orang	Tahun 2024
					17. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 Orang	Tahun 2024
					18. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 Orang	Tahun 2024
					19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	7.726 Orang	Tahun 2024
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan	164.175 Orang	Tahun 2024	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	1.384 Paket	Tahun 2024
					2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	478 Paket	Tahun 2024
					3. Alat pemeriksaan kolesterol	478 Paket	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		kesehatan			4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	164.175 Paket	Tahun 2024
					5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	164.175 Paket	Tahun 2024
					6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	1 Buku	Tahun 2024
					7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	164.175 Paket	Tahun 2024
					8. Tenaga kesehatan: Dokter	108 Orang	Tahun 2024
					9. Tenaga kesehatan: Bidan	364 Orang	Tahun 2024
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	278 Orang	Tahun 2024
					11. Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	77 Orang	Tahun 2024
					12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 Orang	Tahun 2024
					13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	366 Orang	Tahun 2024
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas	97.053 Orang	Tahun 2024	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	97.053 Paket	Tahun 2024
					2. Obat Hipertensi	97.053 Paket	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		yang mendapatkan layanan kesehatan			3. Tensimeter	134 Unit	Tahun 2024
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	3 Aplikasi	Tahun 2024
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	97.053 Paket	Tahun 2024
					6. Tenaga kesehatan: Dokter	145 Orang	Tahun 2024
					7. Tenaga kesehatan: Bidan	364 Orang	Tahun 2024
					8. Tenaga kesehatan: Perawat	366 Perawat	Tahun 2024
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 Orang	Tahun 2024
					10. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	57 Orang	Tahun 2024
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	108 Orang	Tahun 2024
					12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 Orang	Tahun 2024
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan	48,882 Orang	Tahun 2024	1. Obat Diabetes Melitus	48.882 Paket	Tahun 2024
					2. Fotometer atau Glukometer	33 Unit	Tahun 2024
					3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar	48.882 Unit	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		kesehatan			gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet		
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	3 Formulir	Tahun 2024
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	48,882 Paket	Tahun 2024
					6. Tenaga kesehatan: Dokter	145 Orang	Tahun 2024
					7. Tenaga kesehatan: Bidan	364 Orang	Tahun 2024
					8. Tenaga kesehatan: Perawat	366 Orang	Tahun 2024
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	108 Orang	Tahun 2024
					10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 Orang	Tahun 2024
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 Orang	Tahun 2024
					12. Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	98 Orang	Tahun 2024
10	Pelayanan	Jumlah warga	2,515 Orang	Tahun 2024	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III)	32 Buku	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan			atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)		
					2. Penyediaan Psikofarmaka	2.515 Jenis	Tahun 2024
					3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2.515 Formulir	Tahun 2024
					4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	1 Formulir	Tahun 2024
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	32 Media	Tahun 2024
					6. Tenaga kesehatan: Dokter	2 Orang	Tahun 2024
					7. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	15 Orang	Tahun 2024
					8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	1 Orang	Tahun 2024
					9. Tenaga profesional lainnya	1 Orang	Tahun 2024
11	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah warga negara terduga	24.389 Orang	Tahun 2024	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	24.389 Paket	Tahun 2024
					2. Reagen Zn TB	554 Kit	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
Terduga Tuberkulosis	yang mendapatkan layanan kesehatan	tuberkulosis			3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	28.105 Paket	Tahun 2024
					4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	41.474 Paket	Tahun 2024
					5. Catridge tes cepat molekuler	15.636 Tes	Tahun 2024
					6. Formulir pencatatan dan pelaporan	2 Dokumen	Tahun 2024
					7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	5 Dokumen	Tahun 2024
					8. Tubeerkulin	1.458 Vial	Tahun 2024
					9. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	222 Orang	Tahun 2024
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	52 Orang	Tahun 2024
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	52 Orang	Tahun 2024
					12. Tenaga kesehatan masyarakat	37 Orang	Tahun 2024
					13. Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	98 Orang	Tahun 2024
					14. Tenaga kesehatan: Radiografer	14 Orang	Tahun 2024
					13. Kader Kesehatan	10 Orang	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang	21.244 Orang	Tahun 2024	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	21.244 Paket	Tahun 2024
					2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	21.244 Tes	Tahun 2024
					3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	21.244 Paket	Tahun 2024
					4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	21.244 Paket	Tahun 2024
					5. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	74 Orang	Tahun 2024
					6. Tenaga kesehatan: Bidan	52 Orang	Tahun 2024
					7. Tenaga kesehatan: Perawat	52 Orang	Tahun 2024
					8. Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	98 Orang	Tahun 2024
					9. Tenaga kesehatan masyarakat	37 Orang	Tahun 2024
					10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	13 orang	Tahun 2024

Diketahui bahwa pada tabel III.B.2 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2024 yaitu 100%. Hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM



4.2.3 Alokasi Anggaran

Anggaran lokasi adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

Tabel III.B.3.1 Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	760,000,000	713,012,500	93.82 %
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	335,733,500	303,913,950	90.52 %
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	717,633,178	564,704,150	78.69 %
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	400,953,500	305,391,750	76.17 %
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	633,791,900	619,818,300	97.80 %
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	227,734,000	215,629,000	94.68 %
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	138,955,000	117,208,000	84.35 %
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25,000,000	19,276,368	77.11 %
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	2,527,256,530	2,246,660,950	88.90 %

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	10.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	25,000,000	23,412,920	93.65 %
	11.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	3,013,278,500	2,923,727,900	97.03 %
	12.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	679,100,125	621,743,200	91.55 %
	JUMLAH INDIKATOR	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %
	JUMLAH PROGRAM	9,484,436,233	8,674,498,988	91.465

4.2.4 Dukungan Personil

Ketersediaan sumber daya manusia dalam upaya memberikan pelayanan minimal urusan kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Gresik tahun 2024 sebagai berikut:.

Tabel III.B.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
1.	JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)		1
	a. Eselon 2	Kepala Dinas	1
	Pangkat / Golongan	Pembina Utama Muda/IV.c	1
	Pendidikan	S2	1
2	ADMINISTRATOR		5
	a. Eselon 2	Sekretaris.	1
		Kepala Bidang	4
	Pangkat / Golongan	Pembina Tk. I	2
		Pembina	3
	Pendidikan	S2	4
		S1	1
3.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)		
	a. Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi		121
	Pangkat / Golongan	Pembina Muda Tk I	58
		Penata	25
		Penata Tk. I	21
		Pembina	9
		Pembina Tk. I	8
	Pendidikan	S2	41
		S1	80
	b. Dokter/ dokter spesialis anak		145
	Pangkat / Golongan	Pembina Muda Tk I	58



No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
		Penata	22
		Penata Tk. I	25
		Pembina	9
		Pembina Tk. I	21
		Pembina Utama Muda	10
	Pendidikan	S2	41
		S1	104
	c. Dokter/ dokter gigi		224
	Pangkat / Golongan	Pembina Muda Tk I	95
		Penata	30
		Penata Tk. I	31
		Pembina	15
		Pembina Tk. I	30
		Pembina Utama Muda	23
	Pendidikan	S2	50
		S1	174
	d. Perawat		366
	Pangkat / Golongan	Pengatur	132
		Pengatur Tk. I	49
		Penata Muda	38
		Penata Muda Tk. I	32
		Penata	45
		Penata Tk. I	70
	Pendidikan	S1	42
		D3	324
	e. Bidan		564
	Pangkat / Golongan	Pengatur	160
		Pengatur Tk. I	84
		Penata Muda	99
		Penata Muda Tk. I	88
		Penata	37
		Penata Tk. I	96
	Pendidikan	S1	460
		D3	504
	f. Tenaga Kefarmasian		108
	Pangkat / Golongan	Pengatur	32
		Pengatur Tk. I	3
		Penata Muda	2
		Penata Muda Tk. I	41
		Penata	16
		Penata Tk. I	14
	Pendidikan	S1	50
		D3	58
	g. Tenaga Kesehatan Masyarakat		37

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
	Pangkat / Golongan	Penata Muda	12
		Penata Muda Tk. I	14
		Penata	7
		Penata Tk. I	2
		Pembina	1
		Pembina Tk. I	1
	Pendidikan	S2	
		S1	37
	h. Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)		98
	Pangkat / Golongan	Pengatur	57
		Pengatur Tk. I	13
		Penata Muda	0
		Penata Muda Tk. I	8
		Penata	8
		Penata Tk. I	12
	Pendidikan	S1	5
		D3	93
	i. Radiografer		14
	Pangkat / Golongan	Pengatur	3
		Pengatur Tk. I	3
		Penata Muda	1
		Penata Muda Tk. I	
		Penata	3
		Penata Tk. I	4
	Pendidikan	D4	3
		D3	11
	TOTAL		1.683

4.2.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024 untuk seluruh indikator SPM Kesehatan mencapai 100%. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik:

Tabel III.B.5. 1. Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	16.166 orang	16.166 orang	100%	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	15.268 vaksin	15.268 vaksin	100%
						2 . Tablet tambah darah	3.605.760 tablet	3.605.760 tablet	100%
						3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	16.166 orang	16.166 orang	100%
						4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	16.166 paket	16.166 paket	100%
						5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	16.166 paket	16.166 paket	100%
						6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3.005 paket	3.005 paket	100%
						7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	16.166 paket	16.166 paket	100%
						8. Kartu ibu/rekam medis ibu	16.166 paket	16.166 paket	100%
						9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.166 paket	16.166 paket	100%
						10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	16.166 paket	16.166 paket	100%
						11. Gel USG	1.336 botol	1.336 botol	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						12. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	121 orang	121 orang	100%
						13. Tenaga kesehatan: Perawat	336 orang	336 orang	100%
						14. Tenaga Kesehatan: Bidan	564 orang	564 orang	100%
						15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	108 orang	108 orang	100%
						16. Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	57 orang	57 orang	100%
						17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	16.166 orang	16.166 orang	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	16.687 orang	16.687 orang	100%	1. Formulir Partograf	16.687 formulir	16.687 formulir	100%
						2. Kartu ibu (rekam medis ibu)	16.687 paket	16.687 paket	100%
						3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.687 buku	16.687 buku	100%
						4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	16.687 paket	16.687 paket	100%
						5. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	121 orang	121 orang	100%
						6. Tenaga kesehatan : Bidan	564 paket	564 paket	100%
						7. Tenaga kesehatan : Perawat	366 orang	366 orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	16.585 orang	16.585 orang	100%	8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	108 orang	108 orang	100%
						9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	57 orang	57 orang	100%
						1 . Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	16.585 vaksin	16.585 vaksin	100%
						2 . Vitamin K1 injeksi	16.585 ampul	16.585 ampul	100%
						3 . Salep/tetes mata antibiotik	16.585 orang	16.585 orang	100%
						4 . Formulir bayi baru lahir	16.585 formulir	16.585 formulir	100%
						5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	3.866 formulir	3.866 formulir	100%
						6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.585 buku	16.585 buku	100%
						7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	16.585 paket	16.585 paket	100%
						8 . Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis Anak	145 orang	145 orang	100%
						9. Tenaga kesehatan : Bidan	564 orang	564 orang	100%
						10. Tenaga kesehatan : Perawat	366 orang	366 orang	100%
						11. Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	108 orang	108 orang	100%
						12. Tenaga kesehatan: tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	37 orang	37 orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	71.151 orang	71.151 orang	100%	13. Tenaga kesehatan: tenaga gizi	57 orang	57 orang	100%
						14. Kader kesehatan	7.726 orang	7.726 orang	100%
						1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	71.151 dokumen	71.151 dokumen	100%
						2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	71.151 formulir	71.151 formulir	100%
						3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	71.151 orang	71.151 orang	100%
						4. Vitamin A Biru	8.525 kapsul	9.525 kapsul	100%
						5. Vitamin A Merah	71.151 kapsul	71.151 kapsul	100%
						6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	6.444 vaksin	6.444 vaksin	100%
						7. Vaksin imunisasi dasar: Polio tetes	10.170 vaksin	10.170 vaksin	100%
						8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	5.085 vaksin	5.085 vaksin	100%
						9.. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	15.255 vaksin	15.255 vaksin	100%
						10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - rubella	2.543 vaksin	2.543 vaksin	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	5.126 vaksin	5.126 vaksin	100%
						12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - rubella	2,563 vaksin	2,563 vaksin	100%
						13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	71.151 unit	71.151 unit	100%
						14. Peralatan Anafilaktik	1157 paket	1157 paket	100%
						15. Formula terapi gizi buruk	186 paket	186 paket	100%
						16. Tenaga kesehatan : Dokter	146 orang	146 orang	100%
						17. Tenaga kesehatan : Bidan	564 orang	564 orang	100%
						18. Tenaga kesehatan : Perawat	366 orang	366 orang	100%
						19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	57 orang	57 orang	100%
						20. Guru PAUD	4.617 orang	4.617 orang	100%
						21 . Kader Kesehatan	7726 orang	7726 orang	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	175,618 orang	175,618 orang	100%	1 . Buku raport kesehatanku	175,618 buku	175,618 buku	100%
						2 . Buku pemantauan kesehatan	175,618 buku	175,618 buku	100%
						3 . Kuesioner skrining kesehatan	175,618 dokumen	175,618 dokumen	100%
						4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	175,618 formulir	175,618 formulir	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani
					5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	175,618 formulir	175,618 formulit	100%
					6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	10.227 tablet	10.227 tablet	100%
					7 . Alat Pemeriksaan Hb	52 alat	52 alat	100%
					8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	5.261 strip	5.261 strip	100%
					9 . Media promosi kesehatan	175.618 paket	175.618 paket	100%
					10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	28.763 vaksin	28.763 vaksin	100%
					11. Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	224 orang	224 orang	100%
					12. Tenaga kesehatan : Bidan	564 orang	564 orang	100%
					13. Tenaga kesehatan : Perawat	366 orang	366 orang	100%
					14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	57 orang	57 orang	100%
					15. Tenaga Kesehatan : tenaga kefarmasian	108 orang	108 orang	100%
					16. Tenaga Kesehatan :	37 orang	37 orang	100%
					17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	8.872 orang	8.872 orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	7.726 orang	7.726 orang	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	921.721 orang	921.721 orang	100%	1 . Media promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	921.721 orang	921.721 orang	100%
						2 . Alat-Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	757 unit	757 unit	100%
						3. Alat : Tensimeter	134 unit	134 unit	100%
						4. Alat : Glukometer	478 unit	478 unit	100%
						5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	52 unit	52 unit	100%
						6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	921.721 unit	921.721 unit	100%
						7. Alat : KIT IVA Tes	33 unit	33 unit	100%
						8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	5.261 unit	5.261 unit	100%
						9. Kit Ophthalmologi Komunitas	366 unit	366 unit	100%
						10. Kuesioner PUMA	921.721 dokumen	921.721 dokumen	100%
						11. Alat Pelayanan KB	1.389 unit	1.389 unit	100%
						12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1 dokumen	1 dokumen	100%
						13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	9.842 ampul	9.842 ampul	100%
						14. Tenaga kesehatan : Dokter	108 orang	108 orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						15. Tenaga kesehatan : Bidan	564 orang	564 orang	100%
						16. Tenaga kesehatan : Perawat	366 orang	366 orang	100%
						17. Tenaga kesehatan : tenaga Gizi	57 orang	57 orang	100%
						18. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 orang	37 orang	100%
						19. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,726 orang	7,726 orang	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	164.175 orang	164.175 orang	100%	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	1.384 paket	1.384 paket	100%
						2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	478 paket	478 paket	100%
						3 . Alat pemeriksaan kolesterol	478 paket	478 paket	100%
						4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	164.175 paket	164.175 paket	100%
						5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	164.175 paket	164.175 paket	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	1 buku	1 buku	100%
						7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	164.175 paket	164.175 paket	100%
						8 . Tenaga kesehatan : Dokter	108 orang	108 orang	100%
						9 . Tenaga kesehatan : Bidan	364 orang	364 orang	100%
						10 . Tenaga kesehatan : Perawat	278 orang	278 orang	100%
						11 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	77 orang	77 orang	100%
						12 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 orang	37 orang	100%
						13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	366 orang	366 orang	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlahwarganegarape nderitahipertensi usia 15 tahun ke atas yangmendapatkanlay anan kesehatan	97.053 orang	97.053 orang	100%	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	97.053 paket	97.053 paket	100%
						2. Obat Hipertensi	97.053 paket	97.053 paket	100%
						3. Tensimeter	134 unit	134 unit	100%
						4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	3 aplikasi	3 aplikasi	100%
						5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	97.053 paket	97.053 paket	100%
						6 . Tenaga medis : Dokter	145 orang	145 orang	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Bidan	364 orang	364 orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
					100%	8. Tenaga kesehatan : Perawat	366 orang	366 orang	100%
						9. Tenaga kesehatan: tenaga gizi	57 orang	57 orang	100%
						10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	37 orang	37 orang	100%
						11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	108 orang	108 orang	100%
						12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 orang	37 orang	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	48,882 orang	48,882 orang	100%	1 . Obat Diabetes Melitus	48,882 paket	48,882 paket	100%
						2 . Fotometer atau Glukometer	33 unit	33 unit	100%
						3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	48,882 unit	48,882 unit	100%
						4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	3 formulir	3 formulit	100%
						5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	48,882 paket	48,882 paket	100%
						6. Tenaga kesehatan : Dokter	145 orang	145 orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						7. Tenaga kesehatan : Bidan	364 orang	364 orang	100%
						8. Tenaga kesehatan : Perawat	366 orang	366 orang	100%
						9. Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	108 orang	108 orang	100%
						10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	37 orang	37 orang	100%
						11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	57 orang	57 orang	100%
						12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	98 orang	98 orang	100%
						1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	32 buku	32 buku	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	2,515 orang	2,515 orang	100%	2 . Penyediaan Psikofarmaka	2,515 jenis	2,515 jenis	100%
						3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2,515 formulir	2,515 formulir	100%
						4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	1 formulir	1 formulir	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	24.389 orang	24.389 orang	100%	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	32 media	32 media	100%
						6. Tenaga kesehatan : Dokter	2 orang	2 orang	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	15 orang	15 orang	100%
						8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	1 orang	1 orang	100%
						9 . Tenaga profesional lainnya	1 orang	1 orang	100%
						1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	24.389 paket	24.389 paket	100%
						2 . Reagan Zn TB	554 kit	554 kit	100%
						3 . Masker bedah dan Masker N95	28.105 paket	28.105 paket	100%
						4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alcohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	41.474 paket	41.474 paket	100%
						5 . Cartridge tes cepat molekuler	15.636 test	15.636 test	100%
						6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	100%
						7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	5 dokumen	5 dokumen	100%
						8. Tuberkulin	1458 vial	1458 vial	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						9 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	222 orang	222 orang	100%
						10 . Tenaga kesehatan : Perawat	52 orang	52 orang	100%
						11. Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	52 orang	52 orang	100%
						12 . Tenaga kesehatan masyarakat	37 orang	37 orang	100%
						13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	98 orang	98 orang	100%
						14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	14 orang	14 orang	100%
						15 . Kader kesehatan	10 orang	10 orang	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immuno deficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	21.244 orang	21.244 orang	100%	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	21.244 paket	21.244 paket	100%
						2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	21.244 test	21.244 test	100%
						3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	21.244 paket	21.244 paket	100%
						4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan	21.244 paket	21.244 paket	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani
					kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			
					5 . Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	74 orang	74 orang	100%
					6 . Tenaga kesehatan : Bidan	52 orang	52 orang	100%
					7 . Tenaga kesehatan : Perawat	52 orang	52 orang	100%
					8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	98 orang	98 orang	100%
					9 . Tenaga kesehatan masyarakat	37 orang	37 orang	100%
					10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	13 orang	13 orang	100%



4.2.6 Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM urusan Kesehatan:

1. Pengumpulan Data

- Sasaran SPM bidang Kesehatan Tahun 2024 mengikuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.0107/MENKES/5675/2021 TENTANG Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 – 2025.
- Adanya kesenjangan sasaran proyeksi dan sasaran riil, sehingga capaian SPM tidak bisa 100%

2. Penghitungan Kebutuhan

Penyesuaian perhitungan kebutuhan yang didasarkan pada regulasi terbaru Tahun 2024 Permenkes 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknik Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dan belum tersedianya aplikasi perhitungan sesuai dengan regulasi tersebut. Aplikasi sistem perhitungan Kebutuhan masih dilakukan secara manual dan tidak berdasarkan sistem Costing Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan (SICOBIKES).

3. Perencanaan dan Penganggaran

Penyesuaian perhitungan kebutuhan yang didasarkan pada regulasi terbaru Tahun 2024 Permenkes 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknik Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dan Perhitungan anggaran tidak berdasarkan sistem Costing Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan (SICOBIKES).

4. Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan SPM berdasarkan regulasi terbaru Tahun 2024 Permenkes 6 Tahun 2024 2024 tentang Standar Teknik Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.



4.3 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik diampu oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jenis pelayanan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari,
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik,
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemda dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemkab. Gresik pada urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel III.B.2.1 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	39.367 Orang	Tahun 2024	JARINGAN PERPIPAAN		
					1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	12.684 Rumah Tangga	Tahun 2024
					2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	12.684 Rumah Tangga	Tahun 2024
					BUKAN JARINGAN PERPIPAAN		
					3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	0	Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	0	Tahun 2024
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.818 Orang	Tahun 2024	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik.	908 Rumah Tangga	Tahun 2024
					2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.	875 Rumah Tangga	Tahun 2024
					3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar.	33 Rumah Tangga	Tahun 2024



4.3.3 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 33.400.631.558,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.080.536.394,- (96,05%), yang mana didalamnya terdapat unsur APBD Murni, dan APBD DAK Fisik. Anggaran ini dialokasikan untuk, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan, serta pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara di bidang Pekerjaan Umum. Adapun alokasi dana penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik antara lain:

Tabel III.C.3 1 Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	33,400,631,558	32,080,536,394	96.05 %
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25,785,806,975	24,632,337,576	95.53 %
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25,785,806,975	24,632,337,576	95.53 %
26.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4,414,619,878	4,302,315,016	97.46 %
30.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1,193,133,722	1,190,179,970	99.75 %
32.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum	20,178,053,375	19,139,842,590	94.85 %

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	(SPAM) Jaringan Perpipaan			
	JUMLAH INDIKATOR	25,785,806,975	24,632,337,576	95.53 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,614,824,583	7,448,198,818	91.81 %
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	7,614,824,583	7,448,198,818	97.81 %
19.	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	200,001,000	119,288,644	59.64 %
22.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	5,579,130,000	5,560,082,420	99.66 %
32.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	200,000,000	197,565,391	98.78 %
33.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	300,000,000	299,981,806	99.99 %
38.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	650,003,583	624,452,229	96.07 %
39.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	685,690,000	646,828,328	94.33 %
	JUMLAH INDIKATOR	7,614,824,583	7,448,198,818	97.81

4.3.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

Tabel III.C.4 1 Dukungan Personil Penerapan SPM
Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama		1
	- Pangkat Golongan :		

No.	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
	- Pendidikan :		
	S2	1	
	Administrator		1
	- Pangkat Golongan :		
	Penata Tk.I (III/d)	1	
	- Pendidikan :		
	S2	1	
	Pengawas		1
	- Pangkat Golongan :		
	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
	- Pendidikan :		
	S1	1	
	Pelaksana / JFU		6
	- Pangkat Golongan :		
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	
	Pengatur (II/c)	1	-
	Penata Muda (III/a)	1	
	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
	Penata (III/c)	1	
	Penata Tk.I (III/d)	1	
	- Pendidikan :		
	S1	4	
	SMA	2	
2.	Jabatan Fungsional Tertentu		6
	- Pangkat Golongan :		
	Pembina (IV/a)	1	
	Penata Tk.I (III/d)	2	
	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	
	Penata Muda (III/a)	1	
	- Pendidikan :		
	S2	1	
	S1	5	
3.	Non ASN		34
	- Pendidikan		
	S1	12	
	D3	1	
	SMA/SLTA	12	
	SMK	2	
	SMP	3	
	SD	4	
JUMLAH TOTAL PERSONIL			49

4.3.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya. Tahun 2024 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.C.5 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			Capaian
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	39.367 orang	39.430 orang	100%	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	12.684 rumah tangga	12.704 rumah tangga	100 %
						2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	12.684 rumah tangga	12.704 rumah tangga	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			Capaian
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	
						menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau			
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.818 orang	4.143 orang	100%	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	908 rumah tangga	1335 rumah tangga	100 %
						2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	875 rumah tangga	1302 rumah tangga	100 %

No .	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	33 rumah tangga	33 rumah tangga	100 %



4.3.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
 - b. Minimnya anggaran yang dialokasikan dalam pemenuhan SPM PUPR kabupaten, seperti komitmen pendanaan untuk perbaikan sanitasi yang masih dibawah 2% dari total APBD Kabupaten.
 - c. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
 - d. Kendala terkait kurangnya lahan sarana prasarana sanitasi khususnya di wilayah perkotaan.
2. Upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data eksternal lintas sektor melalui Tim Pokja SPM Kabupaten dengan melibatkan berbagai instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data.
 - b. Perangkat daerah menggunakan anggaran yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk memenuhi target yang sudah ditentukan serta memanfaatkan sumber pendanaan lainnya seperti DAK.
 - c. Sosialisasi secara intensif dari hulu ke hilir, baik melalui tatap muka maupun media lainnya guna meningkatkan kesadaran masyarakat.
 - d. Pengarahan pembuangan limbah domestik ke IPAL Komunal.



4.4 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh daerah. Adapun SPM bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten

Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.2 1 Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	3.468 Orang	Tahun 2024	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	867 Rumah	Tahun 2024
					2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	
					3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	
					4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	0	Tahun 2024			Tahun 2024



4.4.3 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 20,983,478,827,- dan terealisasi sebesar Rp. 20,910,569,832,-. Anggaran ini dialokasikan untuk indikator identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau relokasi program kabupaten/kota dan pemenuhan pada program lain seperti program pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dan pengelolaan dana darurat dan mendesak, mengingat Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana.

Tabel III.D.3 1 Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	20,983,478,827	20,910,569,832	99.65 %
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	373,478,827	300,569,832	80.48 %
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	215,000,000	184,400,632	85.77 %
	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	215,000,000	184,400,632	85.77 %
	JUMLAH INDIKATOR	215,000,000	184,400,632	85.77 %
2.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	158,478,827	116,169,200	73.30 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	20,983,478,827	20,910,569,832	99.65 %
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	148,534,127	106,224,500	71,53 %
	6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	9,944,700	9,944,400	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR	158,478,827	116,169,200	73,30 %
	JUMLAH PROGRAM	373,478,827	300,569,832	80.48 %
	KEGIATAN LAINNYA			
2.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA	20,610,000,000	20,610,000,000	100.0

4.4.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

Tabel III.D.4 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama		1
	- Pangkat Golongan :		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
	- Pendidikan :		
	S2	1	
	Administrator		1
	- Pangkat Golongan :		
	Penata Tk.I (III/d)	1	
	- Pendidikan :		



No	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	S1	1	
	Pelaksana / JFU		6
	- Pangkat Golongan :		
	Pengatur Tk. I (II/d)	1	
	Penata Muda (III/a)	4	
	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
	- Pendidikan :		
	S1	2	
	D3	2	
	SMA	2	
2	Jabatan Fungsional Tertentu		2
	- Pangkat Golongan :		
	Pembina (IV/a)	1	
	Penata Tk.I (III/d)	1	
	- Pendidikan :		
	S2	1	
	S1	1	
3	Non ASN		2
	- Pendidikan		
	S1	2	
	JUMLAH TOTAL PERSONIL		12

4.4.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tahun 2024 capaian spm urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel III.D.5 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	3.468 orang	3.468 orang	100%	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	867 rumah	867 rumah	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	0 rumah	0 rumah	100%	(Pada Tahun 2024 tidak terdapat program relokasi pemerintah)	0 rumah	0 rumah	100%



4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan perumahan rakyat:

1) Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya ketersediaan basis data
- Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga perencanaan dan penganggaran untuk rumah korban bencana di awal tahun tidak dilakukan pada pagu APBD
- Bencana yang terjadi secara berkelanjutan mengakibatkan jumlah korban terus bertambah sehingga data terus mengalami perubahan
- Lokasi terjadinya bencana yang sulit dijangkau, sehingga penyedia jasa/ kontraktor tidak bersedia melaksanakan perbaikan rumah dengan kategori rusak berat.

2) Upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan kegiatan pada tahun 2025 untuk identifikasi dan pendataan guna melengkapi kekurangan data- data yang belum terakomodir pada tahun 2024.
- Mengajukan bantuan ke BNPB.
- Melakukan pendataan secara berkelanjutan menyesuaikan kondisi di lapangan.
- Melakukan koordinasi dengan BNPB terkait kendala yang dialami.



4.5 SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota . Adapun SPM bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel III.E.1 1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Kategori	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Kategori pencapaian trantibum	1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2	Kategori pencapaian kebencanaan	1. Pelayanan informasi rawan bencana
		2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
3	Kategori pencapaian damkar	1. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Damkar)
		2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		3. Pelayanan Pemadaman Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target SPM dibidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel III.E.2 1 Target SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	997 Orang	Tahun 2024	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	43 Unit	Tahun 2024
					2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	33 Dokumen	Tahun 2024
					3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	242 Orang	Tahun 2024
					4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2 Dokumen	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	
					6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	0	Tahun 2024
2	Pelayanan Informasi rawan bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	462.087 Orang	Tahun 2024	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 Dokumen	Tahun 2024
					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	462.087 Orang	Tahun 2024
					3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	462.087 Orang	Tahun 2024
					4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana 1	2 Unit	Tahun 2024
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	566 Orang	Tahun 2024	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	81 Unit	Tahun 2024
					2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	566 Orang	Tahun 2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	213.625 Orang	Tahun 2024	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1 Posko	Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	bencana (KEBENCANAAN)	penyelamatan dan evakuasi korban bencana			2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	213.625 Orang	Tahun 2024
					3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	3 Dokumen	Tahun 2024
					4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0	Tahun 2024
					5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	213.625 Layanan	Tahun 2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	580 Orang	Tahun 2024	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	173 Layanan	Tahun 2024
					2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman Dst.)	2 Dokumen	Tahun 2024
					3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	425 Unit	Tahun 2024
					4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5 Orang	Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1 Layanan	Tahun 2024
					6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2 Layanan	Tahun 2024



4.5.3 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel III.E.3 1 Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	URUSAN PEMERINTAHAN	11,665,176,628	10,569,653,823	90.61%
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	7,459,417,200	7,368,701,084	98.78%
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,195,780,000	5,193,650,082	99.96%
2.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	4,700,000,000	4,699,420,371	99.99 %
3.	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	92,000,000	90,710,700	98.60 %
14.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	264,515,000	264,465,838	99.98 %
15.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	139,265,000	139,053,173	99.85 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2,233,847,200	2,145,261,002	96.03 %
	1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	751,788,500	739,667,210	98.39 %
	2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80,000,000	73,472,000	91.84 %
	3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,402,058,700	1,332,121,792	95.01 %
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	29,790,000	29,790,000	100.00 %
	5. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	29,790,000	29,790,000	100.00 %
2.	Program Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)	2,003,756,485	1,521,068,708	75.91 %
	4. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	29,939.118	24.300.800	83.97 %
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	28,939,118	24,300,800	83.97 %
	5. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	407.639.104	405.703.800	99.53%
	4.45.1 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	32,390,000	32,165,500	99.31%
	16. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	359,984,100	358,767,000	99.66 %
	17. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	15,265,004	14,771,300	96.77 %
	6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	882,478,352	859,869,350	97.44 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
2.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	152,160,000	152,160,000	100.00 %
6.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	730,318,352	707,709,350	96.90 %
7. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		684,699,911	231,194,758	33.77 %
5.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	684,699,911	231,194,758	33.77 %
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	2,202,002,943	1,679,884,031	76.29 %
8. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1,727,591,419	1,351,374,971	78.22 %
2.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	477,327,700	364,856,246	76.44 %
5.	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	444,295,700	438,266,500	98.64 %
6.	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	183,543,690	162,692,060	88.64 %
14.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	622,424,329	385,560,165	61.94 %
9. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		72.814.000	58.829.300	80.79 %
1.	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	72,814,000	58,829,300	80.79 %
11. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		249,696,700	203,549,760	81.52 %
1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	109,756,400	86,637,490	78.94 %
2.	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	139,940,300	116,912,270	83.54 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	12. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	151,900,824	66,130,000	43.53 %
	1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	151,900,824	66,130,000	43.53 %

4.5.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tangani oleh 3 organisasi perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

- Kategori pencapaian **trantibum** mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Pencapaian Trantibum Tahun 2024

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/c)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	1
	Administrator	4
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1
	Pembina / (IV/a)	2
	Penata Tk. I / (III/d)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	4
	Pengawas	7
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina / (IV/a)	1
	Penata Tk.1 / (III/d)	5
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	1
	b. Pendidikan:	

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
	Strata 2 (S2)	3
	Strata 1 (S1)	3
	SMA	1
	Pelaksana /JFU	11
	a. Pangkat/Golongan:	
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	3
	Penata / (III/a)	1
	Pengatur Tk. I / (II/d)	1
	Pengatur / (II/c)	4
	Pengatur Muda / (II/a)	1
	Juru Tk. I / (I/d)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 1 (S1)	3
	D3	4
	SMA	3
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	84
	a. Pangkat Golongan:	
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	11
	Penata Muda (III/a)	37
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	32
	Pengatur (II/c)	4
	b. Pendidikan:	
	Strata 1 (S1)	11
	SMA	73
3.	Non ASN	133
	Pendidikan:	
	Strata 1 (S1)	50
	SMA	83
	Total	240

- Kategori pencapaian **kebencanaan** mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 2 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Kebencanaan Tahun 2024

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/c)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	1
	Administrator	4
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina / (IV/a)	4
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	4

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
	Pengawas	4
	a. Pangkat/Golongan:	
	Penata Tk.I / (III/d)	4
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	4
	Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum	8
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata / (III/c)	2
	Penata / (III/a)	4
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	1
	Pengatur / (II/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	6
	Diploma III (D3)	2
2	Jabatan Fungsional Tertentu	
	a. Pangkat/Golongan	
	b. Pendidikan	
3	Non ASN	25
	Pendidikan:	
	Strata 1 (S1)	8
	D3	2
	SMA	15
	TOTAL	42

- Kategori pencapaian **damkar** mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 3 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Damkar Tahun 2024

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	1
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/c)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	1
	Administrator	3
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina / (IV/a)	2
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	2

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
	Strata 1(S1)	1
	Pengawas	4
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina / (IV/a)	2
	Penata Tk.I / (III/d)	1
	Penata / (III/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	1
	Strata Dua (S2)	3
	Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum	18
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Muda Tk. I / (III/b)	5
	Penata / (III/a)	5
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	8
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	8
	Strata Dua (S2)	2
	SMA	8
2	JUMLAH	4
	a. Jabatan Fungsional Tertent (JFT)	4
	b. Pendidikan:	
	SMA	4
3	Non ASN	90
	Strata Satu (S1)	20
	Diploma III (D3)	6
	SMA	62
	SMP	1
	SD	1
	JUMLAH TOTAL PERSONIL	120

4.5.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2024 capaian SPM urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel III.E.5. 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota	997 orang	997 orang	100 %	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	43 unit	43 unit	100 %
						2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	33 dokumen	33 dokumen	100 %
						3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi	242 orang	242 orang	100 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	462,807 orang	462,807 orang	100 %	Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)			
						4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	2 dokumen	2 dokumen	100 %
						1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %
						2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	462,807 orang	462,807 orang	100 %
						3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk	462,807 orang	462,807 orang	100 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)			
						4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2 unit	2 unit	100 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	566 orang	566 orang	100 %	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	81 unit	81 unit	100 %
						2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	566 orang	566 orang	100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	213.625 orang	213.625 orang	100 %	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1 posko	1 posko	100 %
						2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	213.625 orang	213.625 orang	100 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	3 dokumen	3 dokumen	100 %
						5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	213.625 layanan	213.625 layanan	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	580	1034	100 %	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	173 layanan	583 layanan	100 %
						2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	2 dokumen	2 dokumen	100 %
						3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.),	425 unit	425 unit	100 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)			
						4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5 orang	18 orang	100 %
						5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1 layanan	1 layanan	100 %
						6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2 layanan	2 layanan	100 %



4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

➤ **Kategori pencapaian trantibum**

Kendala yang timbul adalah warga yang kurang kesadaran terhadap kepatuhan Perda dan Perkada.

Berbagai permasalahan yang timbul adalah :

1. Tidak ada QR code pada reklame/iklan.
2. PKL yang ditertibkan terus kembali lagi untuk keesokan harinya.
3. Tempat yang disediakan untuk menampung tangkapan yang terbatas.

Sehingga untuk solusinya yaitu :

1. Agar reklame sekarang mempunyai qr code sehingga memudahkan anggota untuk penertiban.
2. Agar Pemerintah Daerah mempunyai kawasan untuk relokasi PKL.
3. Anggaran untuk penampungan dan mamin tangkapan bias ditambah.

➤ **Kategori pencapaian kebencanaan**

INTERNAL

Kendala yang timbul adalah warga yang kurang kesadaran terhadap kepatuhan Perda dan Perkada. Berbagai permasalahan yang timbul adalah :

1. Keterbatasan personil TRC PB dan petugas pendataan JITUPASNA/R3P yang bertugas dalam penanganan kedaruratan dan pasca bencana bencana khususnya ketika bencana terjadi di Pulau Bawean Tidak ada QR code pada reklame/iklan;
2. Belum semua personil memiliki sertifikat/kompetensi dari lembaga terakreditasi dalam penanggulangan bencana



Sehingga untuk solusinya yaitu :

1. Mengusulkan Rekrutmen pegawai pranata pencarian dan pertolongan melalui usulan CPNS dan P3K
2. Mengusulkan diklat kebencanaan melalui anggaran APBD ke BKPSDM maupun ke BNPB

EXTERNAL

Kendala yang timbul adalah warga yang kurang kesadaran terhadap kepatuhan Perda dan Perkada. Berbagai permasalahan yang timbul adalah :

1. Belum terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten (FPRB);
2. Terbatasnya alokasi anggaran;
3. Kejadian bencana alam (gempa bumi) di Pulau Bawean terjadi diluar prediksi.

Sehingga untuk solusinya yaitu :

1. Pembentukan FPRB serta Menjalin kolaborasi dengan unsur pentahelix kebencanaan yaitu : pemerintah, masyarakat, media, akademisi-pakar, dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Gresik;
2. Menambah anggaran yang berkaitan dengan layanan dalam SPM yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas;
3. Kerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB dalam menangani kerusakan infrastruktur baik rusak ringan, sedang dan berat.

➤ Kategori pencapaian pemadam kebakaran

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :



1. Standar operasional prosedur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Standart Pelayanan penanganan Pemadaman dan Rescue telah sesuai dengan SOP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

2. Standar sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jumlah Sarana dan Pra sarana yang masih kurang memadai

3. Standar peningkatan kapasitas anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jumlah personil dan kurangnya kemampuan anggota yang memiliki sertifikasi Penyelamatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2. Layanan respon cepat (Response Time) penanganan:

Kurangnya penempatan POS damkar di beberapa titik yang mengakibatkan respon time tidak bisa terpenuhi

3. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran:

Kurangnya penempatan POS damkar di beberapa titik yang mengakibatkan respon time tidak bisa 100%.

4. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi:

Nihil.

5. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran:

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan kebakaran pertama apabila terjadi kebakaran.

6. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran:

masih banyak nya para pelaku usaha dan pemilik bangunan yang tidak dilengkapi dengan alat proteksi diri

7. Penanganan Pemadaman dan Penyelamatan Non Kebakaran :

Terbatasnya anggaran untuk mendukung standar pelayanan minimal (SPM)

Adapun yang solusi yang diupayakan guna meningkatkan penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :



1. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan:
 - a) Pembangunan POS damkar yang baru dan menambah jumlah personil
 - b) Bekerjasama dengan para pelaku usaha yang memiliki sarana pemadam kebakaran.
 - c) Membentuk relawan kebakaran di desa-desa
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran:
 - a) Pembangunan POS damkar yang baru dan menambah jumlah personil
 - b) Bekerjasama dengan para pelaku usaha yang memiliki sarana pemadam kebakaran.
 - c) Membentuk relawan kebakaran di desa-desa
3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi:
Nihil.
4. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran:
Sosialisasi dan simulasi ke masyarakat.
5. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran:
Kunjungan, Pendataan Inspeksi ke para pelaku usaha dan pemilik bangunan dan memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga yang mengajukan sebagai salah satu persyaratan perijinan pendirian bangunan (PPG)



4.6 SPM Bidang Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Sosial Tahun 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Sosial ada 5 jenis, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada bidang urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel III.F.2. 1 Target SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	6.309 orang	Tahun 2024	1. Layanan data dan pengaduan	6.309 orang	Tahun 2024
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	11 orang	
					3. Penyediaan permakanaan	1.520 orang	
					4. Penyediaan sandang	127 orang	
					5. Penyediaan alat bantu	129 orang	
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	17 orang	
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	4 orang	
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	233 orang	
					9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	16 orang	
					10. Akses kelanyanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas	271 orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					layanan pendidikan dan kesehatan		
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2 orang	
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1 orang	
					13. Layanan rujukan	4 orang	
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	7.351 orang	Tahun 2024	1. Layanan data dan pengaduan	6.380Orang	Tahun 2024
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	18 Orang	
					3. Penyediaan permakanan	62 Orang	
					4. Penyediaan sandang	57 Orang	
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	5 Orang	
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	5.895 Orang	
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	4 Orang	
					8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/	34 Orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					bukti dokumen kependudukan		
					9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	9 Orang	
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6 Orang	
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10 Orang	
					12. Layanan rujukan	10 Orang	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	19.529 Orang	Tahun 2024	1. Layanan data dan pengaduan	19.529 Orang	Tahun 2024
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	56 Orang	
					3. Penyediaan permakanaan	667 Orang	
					4. Penyediaan sandang	12 Orang	
					5. Penyediaan alat bantu	24 Orang	
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	17 Orang	
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	19.402 Orang	
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	12 Orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah/ bukti dokumen kependudukan	15 Orang	
					10. Akses pelayanan kesehatan dasar /fasilitas layanan kesehatan	17 Orang	
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20 Orang	
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5 Orang	
					13. Layanan rujukan	21 Orang	
4	Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	224 Orang	Tahun 2024	1. Layanan data dan pengaduan	224 Orang	Tahun 2024
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	200 Orang	
					3. Penyediaan permakanaan	200 Orang	
					4. Penyediaan sandang	200 Orang	
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	170 Orang	
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	200 Orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	150 Orang	
					8. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	35 Orang	
					9. Akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	170 Orang	
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	150 Orang	
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	150 Orang	
					12. Layanan rujukan	170 Orang	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat	9.829 Orang	Tahun 2024	1. Penyediaan pemakanan	8.625 Orang	Tahun 2024
					2. Penyediaan sandang	900 Orang	
					3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	13 Unit	
					4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	39 Orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	bencana	& pasca bencana			5. Pelayanan dukungan psikososial	252 Orang	



4.6.3 Alokasi Anggaran

Tahun 2024 Dinas Sosial memiliki anggaran PAPBD sebesar Rp. 31.769.993.294 dengan alokasi anggaran penerapan SPM sebesar Rp. 6.818.000.000. Rincian alokasi anggaran sesuai jenis layanan dasar adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	URUSAN SOSIAL KAB.GRESIK	6.818.000.000	6.223.025.269	91,27 %
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6,818.000.000	6.223.025.269	91,27 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.578.000.000	6.069.351.019	92,27 %
	3. Penyediaan alat bantu	174.420.750	157.218.250	90,14 %
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	5,880.000.000	5.447.586.505	92,65 %
	6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	100,000,000	68.723.230	68,72 %
	7. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	27.329.413	26,602,550	97,34 %
	8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	60,000,000	36.306.700	60,51 %
	9. Pemberian layanan data dan pengaduan	9.869.000	9,800,100	99,30 %
	10. Pemberian layanan kedaruratan	164.901,837	163.653.091	99,36 %
	12. Pemberian layanan rujukan	161.479.000	159.260.593	98,63 %
	JUMLAH INDIKATOR	6,578.000,000	6.069.351.019	98,63 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	240,000,000	153.677.250	51,91 %



No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Penyediaan makanan	175,000,000	90.835.250	51,91 %
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	35,000,000	34.850.000	99,57 %
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	30,000,000	27.992.000	93,31 %
JUMALAH INDIKATOR		240,000,000	153.677.250	64,03 %

4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Dukungan personil pada Bidang Urusan Sosial antara lain:

Tabel III.F.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial
Tahun 2024

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	1	
	a. Pangkat/golongan		
	Pembina Tk. I - IV/b	1	
	b. Pendidikan		
	S2	1	
	Administrator	4	
	a. Pangkat/golongan		
	Pembina Tk. I - IV/b	1	
	Pembina - IV/a	2	
	Penata Tk. I - III/d	1	
	b. Pendidikan		
	S2	4	
	Pengawas	7	
	a. Pangkat/golongan		
	Penata Muda Tk. I - III/b	1	
	Penata Tk. I - III/d	4	
	Pembina - IV/a	2	
	b. Pendidikan		
	S1	5	
	S2	2	
	Pelaksana / JFU	11	
	a. Pangkat/golongan		
	Pengatur Muda - II/a	1	
	Pengatur Muda Tk. I - II/b	1	
	Pengatur Tk. I - II/d	2	
	Penata Muda - III/a	5	
	Penata Muda Tk. I - III/b	1	

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	Penata Tk. I - III/d	1	
	b. Pendidikan		
	SMP	1	
	SMA	3	
	S1	7	
	JUMLAH		23
2	Non ASN	29	
	a. Pendidikan		
	SMA	11	
	S1	18	
	JUMLAH		29
	JUMLAH TOTAL PERSONIL		52

4.6.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2024 capaian SPM urusan Sosial Kabupaten Gresik mencapai angka 100 % dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel III.F.5. 1 Hasil Capaian Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Target	Prosentase Target	Jumlah Capaian	Prosentase Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	6.309	100 %	6.309	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	7.351	100 %	7.351	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	19.529	100 %	15.529	100 %

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Target	Prosentase Target	Jumlah Capaian	Prosentase Capaian
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	224	100 %	224	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	9.829	100 %	9.829	100

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM. Adapun permasalahan SPM urusan sosial meliputi:

- 1) Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM urusan sosial adalah sebagai berikut:
 - Pengumpulan data masih belum adanya sistem pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - Perhitungan kebutuhan untuk penanganan Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Tuna Sosial (terutama Gelandangan dan Pengemis) tidak dapat diprediksi karena sesuai kondisi yang ada
 - Perencanaan dan penganggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tergantung pada Pendapatan Daerah sehingga seringkali perencanaan tidak sesuai dengan penganggaran dan kebutuhan Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan, SDM Dinas Sosial masih terbatas terutama dalam pengelolaan data
 - Adanya penerima bantuan yang meninggal dunia, pindah domisili



tanpa memberitahu petugas desa/kelurahan setempat dan ada yang menolak diberikan bantuan karena merasa sudah cukup mampu membuat bantuan sosial tidak dapat tersalur 100%

- Kabupaten Gresik tidak memiliki Panti yang dikelola oleh Daerah sehingga harus berkoordinasi dengan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan jika tidak ada maka akan ditampung sementara di Shelter BLBK Cerme
- 2) Upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM urusan sosial adalah sebagai berikut:
- Pendataan PPKS dilakukan dan direkap secara manual dan membutuhkan waktu yang lama mengingat jumlah PPKS yg fluktuatif
 - Karena banyaknya kebutuhan PPKS sehingga hanya pelayanan dasar yang diberikan sesuai kemampuan APBD
 - Pelaksanaan kegiatan dibantu oleh mitra kerja Dinas Sosial seperti TKSK, Pendamping PKH, Tagana dan LK3
 - Kondisi ini tidak dapat diprediksi dan diluar jangkauan Dinas Sosial sedangkan bantuan yang diberikan harus melalui pengajuan SK Hukum terlebih dahulu
 - Diusulkan untuk membangun Panti milik Kabupaten Gresik

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 kami sampaikan. Kegiatan Penyusunan Capaian LPPD Tahun 2024. Evaluasi penerapan LPPD dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait di dalam LPPD telah dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam penetapan pembangunan pemerintah daerah sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah kabupaten Gresik dapat memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.